



**KONFLIK PKI DAN PELAJAR ISLAM INDONESIA UNDERBOW
MASYUMI DI KANIGORO KEDIRI
TAHUN 1965**

SKRIPSI

Oleh :

**Niken Permata Rina
NIM 160210302043**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**KONFLIK PKI DAN PELAJAR ISLAM INDONESIA UNDERBOW
MASYUMI DI KANIGORO KEDIRI
TAHUN 1965**

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Strata Satu (1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh :

**Niken Permata Rina
NIM 160210302043**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu Parmiasi dan Bapak Supomo yang tercinta;
2. Guru-Guru dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Semua guru TK, SD, SMP, SMA, dan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
4. Almamater yang saya banggakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

MOTTO

“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang Mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

(Terjemahan surat At-Taubah: 105)¹



¹ Surat At-Taubah Ayat 105. <https://umma.id/post/surat-at-taubah-ayat-105.id> (Diakses tanggal 20/10/2020)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Niken Permata Rina

NIM : 160210302043

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Konflik PKI dan Pelajar Islam Indonesia Underbow Masyumi di Kanigoro Kediri Tahun 1965” benar-benar karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap Ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 November 2020

Yang menyatakan,

(Niken Permata Rina)
NIM 160210302043

SKRIPSI

**KONFLIK PKI DAN PELAJAR ISLAM INDONESIA UNDERBOW
MASYUMI DI KANIGORO KEDIRI
TAHUN 1965**

Oleh :

Niken Permata Rina
NIM. 160210302043

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sumardi, M. Hum
Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Marjono, M. Hum

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Konflik PKI dan Pelajar Islam Indonesia underbow Masyumi di Kanigoro Kediri Tahun 1965” telah diuji dan di sahkan pada :

hari, tanggal :

tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Sumardi, M. Hum.
NIP. 196005181989021001

Drs. Marjono, M.Hum.
NIP. 196004221988021001

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Nurul Umamah, M.Pd.
NIP. 19690204419932008

Drs. Kayan Swastika, M.Si.
NIP. 196702102002121002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.Pd

NIP. 196006121987021001

RINGKASAN

Konflik PKI dan Pelajar Islam Indonesia Underbow Masyumi di Kanigoro Kediri Tahun 1965; Niken Permata Rina, 160210302043; 2020; xiii + 142 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Peristiwa Kanigoro tahun 1965 adalah sebuah peristiwa konflik antar partai yang terjadi di Desa Kanigoro Kecamatan Keras Kabupaten Kediri. Ketika kader-kader PII (Pelajar Islam Indonesia) underbow Masyumi mengadakan latihan mental dikepung, dan ditangkapi massa PKI. Masjid dan Asrama pada waktu shubuh diserbu PKI. Orang PKI menginjak-injak Al Quran dan menyeret kader PII kemudian mengaraknya keliling kota dan desa-desa untuk dipermalukan. Akibatnya, solidaritas umat Islam bangkit dan bergerak melawan PKI. Namun, hampir tak ada yang menyinggung gerakan perlawanan yang dilakukan PII (Pelajar Islam Indonesia). Permusuhan politik inilah yang menjadi latar belakang terjadi penyerangan dan intimidasi antar kelompok Komunis dan Islam ini. Keterlibatan beberapa aparaturnya Negara juga menyoroti peristiwa ini memang terjadi tidak hanya keinginan secara pribadi namun juga karena kepentingan politik pada masa itu.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Apa latar belakang terjadinya konflik PKI dan PII di Kanigoro Tahun 1965; (2) Bagaimana Momentum dan Penyelesaian Peristiwa Kanigoro di Kediri Tahun 1965; (3) Bagaimana dampak konflik PKI dan PII di Kanigoro secara lokal dan nasional . Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan politikologis. Langkah-langkah penelitian yaitu Heuristik yakni pengumpulan sumber-sumber melalui kegiatan studi kepustakaan terkait topik penelitian yang dilakukan, Kritik yakni mengkritik sumber dokumen untuk memperoleh keabsahan sumber, dengan menyeleksi secara fisik sumber yang telah diperoleh (kritik ekstern) dan mengkritik sumber dengan cara membandingkan informasi satu dengan yang lainnya (kritik intern), Interpretasi yakni menggabungkan fakta-fakta berupa informasi yang didapat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan Historiografi yakni pemaparan hasil dari interpretasi dengan menuliskan fakta penelitian sejarah yang dilaksanakan.

Tujuan Penelitian adalah (1) Untuk mengkaji secara mendalam latar belakang terjadinya Konflik PKI dan PII di Kanigoro pada Januari 1965 dilihat dari aspek sejarah

nasional dan aspek sejarah lokal (2) Untuk mengkaji secara mendalam Momentum dan Penyelesaian Peristiwa Kanigoro tahun 1965 (3) Untuk mengkaji secara mendalam bagaimana dampak konflik PKI dan PII di Kanigoro secara nasional dan lokal terhadap peristiwa ini.

Manfaat Penelitian adalah (1) Menambah pengetahuan penulis tentang Peristiwa Kanigoro yang merupakan awalan penumpasan orang-orang PKI oleh Aktivis Islam di Kediri Tahun 1965 (2) Menambah pengetahuan pembaca mengenai khasanah kesejarahan, sehingga dapat menilai peristiwa sejarah dengan kritis dan objektif (3) Memberi gambaran Peristiwa Besar atau Penting yang terjadi di Kediri tahun 1965 (4) Hasil penelitian diharapkan memberikan motivasi terhadap para pembaca mengenai pentingnya mempelajari peristiwa sejarah.

Hasil penelitian adalah Konflik PKI dan PII di Kanigoro tahun 1965 ada faktor yang menyebabkan faktor persaingan politik pada Pemilu tahun 1955 dimana PKI kalah unggul dari Masyumi kemudian keterlibatan ABRI yakni perintah AH Nasution serta Konflik antara PKI dan Masyumi pada Tahun 1965 masih memiliki dendam atas Peristiwa Madiun 1948 dimana banyak anggota PKI yang terbunuh pada Peristiwa tersebut. Konflik ini melahirkan Peristiwa Kanigoro dari awal tahun 1965 hingga saat meletusnya Peristiwa G 30 S PKI. Dampak konflik PKI dan PII di Kanigoro ini terjadi secara luas setelah berakhirnya G 30 S PKI dan bebasnya tahanan Ketua PII yang terlibat Mental Training di Kanigoro salah satu pemicu terjadinya konflik Kanigoro dan umat Islam yang tau akan peristiwa Kanigoro saat PKI lemah dalam penguasaannya membunuh habis orang PKI di penjuru Indonesia, khususnya di Kediri pembunuhan besar terjadi dan mayat orang PKI dibuang di Sungai Brantas.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Latar Belakang terjadinya konflik PKI dan Pelajar Islam Indonesia underbow Masyumi di Kanigoro adalah karena basis PKI di Kanigoro dijadikan tempat mental training para pemuda PII. (2) Proses terjadinya Konflik PKI dan PII di Kanigoro ini adalah penangkapan para anggota peserta mental training oleh PKI dan penyanderaan (3) Dampak Konflik PKI dan PII di Kanigoro Tahun 1965 secara Nasional menyebabkan meletusnya pembantaian besar-besaran oleh umat Islam terhadap PKI di seluruh Indonesia setelah peristiwa G 30 S/PKI dan dampak secara lokal menyebabkan Kanigoro dan Kediri menjadi tempat pembersihan PKI dan trauma masyarakat disekitar terjadinya Peristiwa Kanigoro.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konflik PKI dan Pelajar Islam Indonesia Underbow Masyumi di Kanigoro Kediri Tahun 1965”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Iwan Taruna, M. Eng, selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Bambang Soepeno, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sumardi, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jember sekaligus Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember sekaligus Penguji Utama dalam penulisan Skripsi ini;
5. Drs. Marjono, M.Hum, selaku dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
6. Drs. Kayan Swastika, M.Si, selaku penguji anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini;
7. Dosen-dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember yang sudah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan selama perkuliahan;
8. Ibu Parmiami dan Bapak Supomo yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
9. Kakak kandung saya Santi Purwaningsih yang telah memberikan acuan semangat secara tidak langsung;

10. Teman-teman saya se daerah Kediri dalam IMAKA serta teman seperjuangan angkatan 2016 Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dorongan dan;

11. Semua pihak yang tidak disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Penulis,

Jember, 13 November 2020



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
PENGESAHAN	vii
RINGKASAN.....	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Judul	7
1.3 Ruang Lingkup	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan	10
1.6 Manfaat	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
BAB 3. METODE PENELITIAN	28
BAB 4. LATAR BELAKANG TERJADINYA KONFLIK PKI DAN PII DI KANIGORO TAHUN 1965	37
4.1 Sebab Umum/Tidak Langsung	37
4.1.1 Faktor Politik dan Militer.....	37
4.1.2 Ketegangan antara Masyumi dan PKI tahun 1965.....	43
4.1.3 Faktor Agama.....	52
4.1.4 Faktor Sosial Ekonomi	57

4.2 Sebab Khusus/Langsung.....	64
BAB 5. MOMENTUM DAN PENYELESAIAN PERISTIWA KANIGORO DI KEDIRI TAHUN 1965	70
5.1 Momentum Peristiwa Kanigoro Tahun 1965.....	70
5.1.1 Perspektif Pelajar Islam Indonesia (PII).....	70
5.1.2 Perspektif PKI	85
5.2 Penyelesaian Konflik PKI dan PII di Kanigoro Tahun 1965.....	90
5.2.1 Penyelesaian Di Tingkat Pusat/Nasional	90
5.2.2 Penyelesaian Di Tingkat Daerah/Lokal	95
BAB 6. DAMPAK KONFLIK PKI DAN PII UNDERBOW MASYUMI DI KANIGORO TAHUN 1965	105
6.1 Dampak Konflik PKI dan PII underbow Masyumi di Kanigoro Tahun 1965 secara Nasional	105
6.2 Dampak Konflik PKI dan PII underbow Masyumi di Kanigoro Tahun 1965 secara Lokal	111
6.2.1 Di Kediri.....	111
6.2.2 Di Jawa Timur.....	117
BAB 7. PENUTUP	123
7.1 Simpulan	123
7.2 Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	131
Lampiran 1. Telegram CIA.....	131
Lampiran 2. Hasil Pemilu Tahun 1955	134
Lampiran 3. Memorandum Peristiwa 1965 dan keterlibatan AH Nasution	135
Lampiran 4. Arsip foto Peristiwa Kanigoro 1965.....	137

Lampiran 5. Peta Pembunuhan Massal di Jawa Timur Dampak Konflik PKI dan PII di Kanigoro tahun 1965	139
Lampiran 6. Matrik Penelitian	140



BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan pendahuluan yang meliputi : (1) latar belakang; (2) penegasan judul; (3) ruang lingkup penelitian; (4) rumusan masalah; (5) tujuan penelitian; dan (6) manfaat penelitian.

1.1 Latar Belakang

Peristiwa Kanigoro terjadi pada tahun 1965 dengan melibatkan orang-orang PKI dan PII yang berlatar belakang di desa Kanigoro Keras Kabupaten Kediri yang mengakibatkan penyerangan darurat politik di Jawa Timur sebelum terjadinya peristiwa besar G-30/S PKI di lubang buaya Jakarta. Memasuki tahun 1965 pada bulan pertama, memang berbagai konfrontasi serta bentrokan disertai kekerasan terus mewarnai kehidupan politik di Jombang dan Kediri. Sekitar awal Januari 1965, di Kediri diselenggarakan rapat umum dengan ribuan peserta untuk mendukung keputusan Soekarno agar Indonesia keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam rapat umum itu wakil-wakil dari seluruh organisasi buruh dan tani juga menuntut bupati supaya menurunkan harga bahan-bahan pokok (Sulistyo, 2000: 138-139).

Konflik PKI dan PII berkesinambungan dengan adanya krisis politik tahun 1965, karena PKI dan PII adalah partai komunis dan organisasi yang berunderbow partai Islam. Alasan yang menjadikan latar belakang konflik PKI dan PII ini terjadi adalah menjadikan Peristiwa Kanigoro sebagai salah satu catatan dimana banyaknya peristiwa yang terjadi akibat konflik PKI dan PII. Konflik ini disebut sebagai awal dari pemberontakan PKI terhadap partai Islam serta TNI AD sehingga apakah alasan PKI melakukan penyerangan terhadap PII dilakukan untuk menggertak dua kubu yang menjadi musuh PKI tersebut (Abiyoso & Herfanda, 1995: 19).

Pada koran Harian Rakjat edisi 8 Januari awal permulaan Konflik Kanigoro ini, dituding bahwa pelaksanaan Mental Training yang dilakukan oleh Masyumi dapat perintah langsung dari Jenderal AH Nasution untuk meratakan kegiatan politik yang tidak pro PKI di basis-basisnya. Kanigoro menjadi salah satu tempat dijadikannya kegiatan Pemuda Islam Indonesia mengadakan training politiknya sehingga menimbulkan amarah bagi PKI karena tempat basisnya telah dijajah oleh lawan politiknya. Hal ini didukung dengan munculnya surat izin bagi PII dari Kabupaten

Kediri yaitu surat Nomor Sek. 77/U/28/A.A. Dugaan kuat PKI bahwa PII memang mendapat perintah langsung dari elit politik tinggi.

Konflik Kanigoro disebutkan sebagai aksi massa ofensif revolusioner, awal mula aksi ini dimulai dari aksi-aksi poster dan spanduk, seperti terlihat di Kota-kota besar di Indonesia. Isi poster pada umumnya berisi program tuntutan PKI. Kegiatan ini merupakan aksi ofensif paling ringan, namun nilai propagandanya besar, karena dilakukan secara serentak. Bentuk aksi yang lebih berat lagi adalah demonstrasi dan rapat umum dengan memobilisasi massa untuk melakukan tindak kekerasan, seperti dalam aksi sepihak. Tujuannya adalah merongrong kewibawaan pemerintah dan menekan inisiatif musuh PKI dengan cara menunjukkan kekuatannya (show of force). Aksi-aksi semacam ini dimulai dari bawah, seperti di daerah perkebunan, pedesaan dan berlanjut sampai ke kota-kota provinsi. Disinilah PKI melaksanakan aksi-aksi ofensif manipolis maupun aksi ofensif revolusioner (Pusjarah TNI, 1999: 52).

Peristiwa Kanigoro (konflik PKI dan PII) merupakan salah satu dari aksi-aksi PKI tersebut adalah peristiwa ofensif revolusioner. Setelah peristiwa itu pihak PKI ramai-ramai membela diri. Surat kabar PKI *Harian Rakjat* memberitakan pembelaannya. Pengurus Besar Front Nasional mengutus Mayor Said Pratalikusuma dan Hartoyo disertai oleh beberapa anggota Pengurus Daerah Front Nasional Jawa Timur mengadakan peninjauan ke Kanigoro. Hasil peninjauan yang dilaporkan menyatakan, bahwa antara BTI dan Pemuda Rakyat di satu pihak NU serta GP Ansor di lain pihak tidak terdapat perasaan permusuhan setelah terjadinya Peristiwa Kanigoro. Laporan itu ditutup oleh Tim PB Front Nasional dengan kata-kata “bahwa peristiwa Kanigoro sudah dapat diatasi karena kesadaran dan kewaspadaan rakyat untuk melawan setiap gerakan kontra revolusi”. Namun ada tambahan keterangan bahwa “disinyalir” adanya kontra revolusi yang dilakukan oleh anggota-anggota bekas partai terlarang (Pusjarah TNI, 1999: 53).

Alasan kuat mengapa terjadinya Konflik Kanigoro karena kondisi-kondisi yang terjadi di Kediri pada saat itu yaitu tahun 1965 adalah dalam bidang politik, salah satu diantaranya adalah berkembangnya sikap apresiatif dan keterbukaan yang lebih eksplisit di kalangan masyarakat terhadap suatu organisasi dan paham politik yang dinamis dan kritis. Demikian juga halnya di Kediri secara umum kondisi kehidupan politik yang berkembang praktis dapat dikatakan terproyeksikan secara utuh dan sikap dan

karakteristik masyarakat sehari-hari. Dan bukan hal yang mengejutkan jika dikatakan Kediri termasuk daerah Dinamika kehidupan politik yang tinggi dengan warna sikap kritis masyarakat yang tinggi dan kental dalam memandang suatu kekuatan politik serta di Kediri juga mempunyai pengaruh agama yang kuat. (Susanto & Emingahayu, 2007: 77-78)

Peristiwa Kanigoro disebut sebagai peristiwa sejarah yang memiliki sisi sejarah nasional karena disebutkan bahwa daerah ini yang terkenal sebagai basis PKI didatangi oleh musuh terbesarnya yaitu orang-orang Masyumi untuk mengadakan kegiatan politik yang jelas akan memancing konflik antara dua kelompok ini. Disebutkan terdapat konspirasi yang berkembang seputar penyelenggaraan Mental training tersebut, dimana elit-elit PII telah mendapat perintah dari Jenderal Nasution agar mengintensifkan kegiatan seperti ini di basis PKI. Setidaknya PII underbow Masyumi sudah memiliki izin termasuk surat Nomor Sek.77/U/28/A.A dari Kantor Kabupaten (Susanto & Emingahayu, 2007: 80).

Disamping itu aspek agama pun mempunyai pengaruh yang cukup dominan dalam Kehidupan Politik di Kediri, karena latar belakang sejarah dan realitas sosial masyarakat dalam kaitannya dengan agama yang dianutnya kebetulan menemukan fenomena yang cukup kuat pengaruhnya yaitu santri dan abangan. Di Kediri, dalam hal yang menyangkut aspek spiritualitas basis santri cukup beragam walaupun sebagian besar adalah Nahdliyin. Begitupula dengan kekuatan Islam yang lain yaitu abangan juga mendapat pengaruh yang besar pula. Dengan memperhatikan aspek ini maka tak pelak lagi faktor spiritualitas sangat berpengaruh terhadap kehidupan politik. Kemudian yang nampak adalah wajah politik kekuatan agama dan kekuatan non agama sangat dominan. Bila di asumsikan umum bahwa kekuatan agama yang konservatif dan non agama menjadi basis pertarungan Politik, maka situasi politik yang berkembang sangatlah keras dan berimbang. Buktinya ketika menyimak pertarungan dan perolehan dalam pemilu 1955. Di mana NU mendapat perolehan suara peringkat pertama dan diikuti PKI di Kota madya Kediri sedangkan di Kabupaten Kediri PKI peringkat pertama diikuti NU. Memang diakui Kediri bukanlah pusat atau tempat berdirinya organisasi-organisasi pergerakan, khususnya organisasi-organisasi besar. Namun demikian ternyata merupakan lahan yang subur bagi perkembangan intelektual dan basis organisasi-organisasi tersebut. Tidak kurang seperti PKI yang telah berdiri di Kediri sejak 1926 dan telah

memobilisir masa mogok di Perusahaan Goni di Pare dan Perkebunan Rosella (Rami). Selain itu juga banyak peristiwa terjadi pada saat memasuki masa kritis politik pada tahun 1965, di Kediri juga ikut bergejolak dengan peristiwa yang melibatkan PKI dan kelompok Islam (Susanto dan Emingahayu, 2007: 80).

Meskipun PKI berhasil mengintimidasi partai-partai politik dan organisasi massa Islam, tetapi gagal sama sekali melumpuhkan kekuatan pengikut partai-partai dan organisasi massa tersebut. Organisasi partai politik dan organisasi massa Islam melakukan pula usaha untuk membendung intimidasi dan penyusupan pengaruh komunis ke dalam organisasi dengan cara memperkuat keislaman dan ketaqwaan para anggotanya. Usaha seperti itu dilakukan antara lain oleh Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Timur di desa Kanigoro, Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Ketika menyelenggarakan mental training pada bulan Januari 1965. Ketika pelatihan itu sedang berlangsung, subuh tanggal 13 Januari 1965 kompleks pesantren tempat pelatihan diadakan, diserang oleh massa Pemuda Rakyat (PR) dan Barisan Tani Indonesia (BTI). Massa Komunis ini tidak hanya menyiksa para peserta latihan, tetapi juga menginjak-injak Al-Qur'an sambil mengeluarkan ucapan-ucapan yang menghina agama Islam. Beberapa peserta pelatihan, pria dan wanita, serta tokoh-tokoh agama setempat yang tertangkap. Berkat campur tangan Camat Kras, para korban penangkapan dibebaskan hari itu juga, tetapi pelaksanaan mental training terpaksa dihentikan (Pusat Sejarah TNI, 2008: 36-37).

Menurut Dahlan (2020: 146) Pada koran Harian Rakjat edisi 11,12,13 Februari Peristiwa Kanigoro terjadi karena soal politik bahwa pada Maret 1964 Partai NU Kras dalam Statement telah melarang Samelan, bekas anggota partai terlarang (Masjumi) untuk melakukan pengajian-pengajian. Oleh pemuda Rakyat dan BTI, tokoh bernama Samelan itu ditengarai hadir sekaligus saat itu meminta tanggung jawab panitia yang sebelumnya sudah berjanji tak menghadirkan Samelan dan terdapat peranan aparat yang menumpas orang-orang PKI.

Selain itu Harian Rakjat yang memuat berita Kanigoro edisi 11 Februari 1965 mengatakan bahwa ada campur tangan pihak ABRI yang dituding AH Nasution memerintahkan kepada elit PII untuk mengadakan mental training / kegiatan politik di basis-basis PKI agar keberadaannya dapat terendus oleh ABRI. Tudingan PKI ini masih abu-abu karena sejatinya AH Nasution dalam bukunya tidak menyebutkan

bahwa dirinya melakukan hal tersebut, namun yang menjadi bukti bahwa PKI mencari AH Nasution untuk dibunuh saat Peristiwa G 30 S /PKI meskipun AH Nasution berhasil melarikan diri. Jenderal-jenderal TNI AD menjadi korban kebingungan PKI dalam mempertahankan politiknya pada 30 September 1965 dan menjadi suatu kesadaran bagi rakyat Indonesia apalagi yang mengalami tindakan ofensif revolusioner di berbagai daerah termasuk Kanigoro bahwa kejadian terbesar ini diklaim sebagai puncak dimana PKI benar-benar ingin menguasai politik Indonesia pada masa itu (Pusjarah TNI, 2000: 14).

Peranan aparat seperti tentara dan polisi dalam menumpas orang-orang PKI setelah kejadian Peristiwa Kanigoro, berfokus pada Oktober 1965 karena terjadi penyerangan balik atau pembabatan habis untuk orang-orang PKI oleh Aktivis Islam yang merasa bahwa perbuatan PKI pada penyerangan di desa Kanigoro pada Januari 1965 tidak bisa dibiarkan begitu saja. Setelah peristiwa Gerakan 30 September, dengan tekad kuat bersatu untuk menghabisi orang-orang PKI terutama di daerah Kediri dan sekitarnya. Kelompok-kelompok Islam ini saling berkoordinasi dan meminta aparat untuk mengusut tuntas penyerbu Mantra PII di Kanigoro. Pada Februari 1965, Suryadi berhasil diamankan polisi, dengan tuduhan melakukan tindak provokasi terhadap penyerbuan tersebut. Tanggal 13 Oktober 1965, dalam rapat besar di Alun-alun Kediri yang dihadiri kelompok Islam dari NU-Muhammadiyah, Masyumi dan lainnya menyatakan perang. Penggerebekan PKI pun terjadi di setiap sudut kota. Meskipun sempat terjadi situasi menjadi tak terkendali namun dapat dengan cepat mereda setelah datang tim dari pemerintah dalam mengendalikan situasi tersebut.

Namun begitu aksi sepihak dimulai, tuan tanah Muslim di Kediri memiliki tekanan yang dikonfirmasi oleh perampasan tanah oleh kelompok ratusan petani bersenjatakan tombak bambu tajam dan senjata mentah lainnya. Para pemimpin Muslim sering berbicara tentang apa yang telah PKI alami pada tahun 1948 ketika garis pertempuran surut dan mengalir - ketika PKI mengendalikannya telah menyerang desa-desa santri dan sekolah-sekolah agama Islam. Pemimpin desa Santri jelas memiliki sedikit kesulitan meyakinkan komunitas bahwa aksi itu bukan hanya upaya tidak adil untuk merebut tanah, tetapi bahwa ditujukan terhadap nilai-nilai dan keberadaan komunitas santri. Seperti pada tahun 1948, karakteristik utama komunis di mata penduduk desa Muslim adalah permusuhan terhadap Islam, kecenderungan untuk

melakukan kekerasan dan sihir hitam abangan . Selebaran diedarkan pada tahun 1965 (di Kediri dan sekitarnya) untuk mengingatkan orang-orang percaya bahwa 'ribuan Muslim dibunuh oleh pihak lain' dalam insiden Madiun pada tahun 1948 (Cribb, 1990: 77).

Uraian diatas sebagai awal ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Konflik PKI dan PII di Kanigoro Kediri, Penulis sangat tertarik membahas mengenai bagaimana Peristiwa ini berlangsung di awal tahun 1965 dengan melibatkan PII dalam pemberontakan PKI dan terjadinya secara lokal namun memiliki dampak politik nasional sehingga meletusnya peristiwa G 30 S/PKI. Alasan pertama adalah Peristiwa ini terjadi di tahun terjadinya krisis politik dan melibatkan dua kubu partai serta proses terjadinya yang berakhir dengan tertangkapnya Abiyoso dan Suryadi masing-masing kubu. Permainan politik dibuktikan dengan fakta-fakta kesaksian abiyoso yang merupakan pentolan PII tertangkap, setelah berlangsungnya diskriminasi PKI terhadap peserta mental training dan akhirnya berakhir, penangkapan masing-masing pentolan dan memasuki bulan oktober terjadi G 30 S PKI, Anis Abiyoso dibebaskan namun Suryadi pimpinan PKI tetap ditahan dan tidak diketahui nasibnya setelah itu oleh Abiyoso. Alasan kedua, belum ada yang meneliti mengenai Konflik Kanigoro dipandang sebagai awal terjadinya pemberontakan PKI sebelum terjadinya G 30 S PKI dan pembahasan alasan-alasan lain yang belum di bahas oleh berbagai pihak yang ditulis dalam bentuk tulisan karya ilmiah.

Penelitian ini dianggap penting karena Konflik Kanigoro mempunyai dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat di sekitar Kanigoro baik saat terjadinya peristiwa tersebut hingga setelah berakhir. Peristiwa Kanigoro merupakan peristiwa lokal secara penulisan sejarah karena regionalnya terjadi di satu tempat namun dampaknya juga pada penyebaran basis-basis PKI yang terungkap setelah peristiwa kanigoro ada di seluruh penjuru Jawa Timur dan peristiwa ini ternyata diungkapkan oleh Suryadi pentolan PKI yang terlibat dalam Konflik Kanigoro merupakan gertakan sebelum mencapai puncak peristiwa nasional G 30 S PKI di Jakarta. Dalam hal ini melihat konflik kanigoro ini peran PKI dan PII yang sangat disorot sebagai andilnya peristiwa perang politik di kasus kanigoro ini dan penyelesaiannya setelah berakhir krisis politik tahun 1965.

Tulisan ini juga penting untuk pembelajaran sejarah guna upaya membentuk karakter siswa dalam menanamkan pentingnya memilah ideologisme dan menanamkan sikap nasionalisme. Pendidikan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam mengerti peristiwa sejarah dari sisi politik yang bersih dan ideologi yang bersih. Berdasarkan peristiwa sejarah konflik Kanigoro ini perlu adanya strategi yang pragmatis dalam membentuk masyarakat Indonesia yang sadar akan bahaya komunisme maupun ideologi beraliran kuat. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui sektor pendidikan. Melalui pembelajaran, guru dapat mengajarkan pengetahuan tentang bahayanya komunisme di Indonesia dan memiliki ideologi beraliran kuat yang menyebabkan perpecahan kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia. Jadi Peristiwa Kanigoro yang menjadi konflik antar PKI dan PII dapat dijadikan sebagai materi sejarah untuk sejarah Peristiwa tahun 1965 sekaligus memberikan dampak pembentukan karakter diri nasionalisme dan mencegah tumbuhnya komunisme dan ideologi kuat yang membahayakan masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peneliti menganggap tulisan mengenai Konflik PKI dan PII di Kanigoro Kediri tahun 1965 untuk diungkapkan agar mencapai kajian sejarah ilmiah dan menambah pengetahuan dalam historiografi nasional orde baru. Maka peneliti memilih judul : **“Konflik PKI dan PII underbow Masyumi di Kanigoro Kediri Tahun 1965”**.

1.2 Penegasan Judul

Penegasan pengertian judul dimaksudkan untuk lebih memperjelas dan menghindari terjadinya salah pengertian, penegasan pengertian judul juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahan persepsi terhadap kata-kata atau istilah yang terdapat dalam judul “Konflik PKI dan PII underbow Masyumi di Kanigoro Kediri Tahun 1965”.

Menurut Dahrendorf (2008: 137) Conflict is seeing conflict as a social system that sees social elements of disintegration and change, by looking at the order that exists in society as a result of coercion of its members by those at the top and emphasizing the role of power in maintaining order in society.

Konflik adalah melihat pertikaian sebagai sebuah sistem sosial yang melihat elemen kemasyarakatan terhadap disintegrasi dan perubahan, dengan melihat keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap

anggotanya oleh PKI yang berada di atas dan menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Konflik PKI dan PII pada tahun 1965 terjadi karena ketidak stabilan politik yang tidak berlandaskan keseragaman ideologi karena banyak partai politik yang berideologi komunis, nasionalis, dan agamis. Konflik yang terjadi antar partai politik yang berideologi komunis memang tidak satu pemikiran dengan partai-partai Islam yang memang beragama kuat. Apalagi di daerah-daerah yang tidak padat penduduknya seperti di desa Kanigoro. Desa ini menjadi basis pertahanan orang-orang simpatisan PKI yang menjadi salah satu dasar terjadinya konflik politik antara Masyumi yang memiliki organisasi di bawahnya yaitu PII/GPII (Abiyoso & Herfanda, 1965: 6).

Pengertian Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai yang menganut aliran komunis yang artinya tidak mempercayai adanya Tuhan. PKI memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat komunis, baik secara parlementer maupun revolusioner. Sebagaimana yang tercantum pada mukkadimah AD/ART PKI yang juga terdapat dalam pedoman ABC Revolusi Indonesia. Gerakan partai komunis Indonesia tidak berbeda dengan berbagai kegiatan organisasi komunis di negara-negara lain, khususnya di negara-negara berkembang (Pusjarah TNI, 2009: 33).

PII atau GPII (Pelajar Islam Indonesia atau Gerakan Pelajar Islam Indonesia) berdiri pada tanggal 20 Oktober 1945. Pendirian GPII merupakan jawaban atas tidak adanya organisasi pemuda yang tumbuh pada masa setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, yang memiliki ideologi Islam sebagai landasan Perjuangannya. Sementara di lain pihak tumbuh keinginan dari kalangan Islam (tokoh-tokoh Masyumi jaman Jepang dan para pemuda Islam STI) pada masa itu, untuk membentuk suatu organisasi pemuda Islam yang berjuang berlandaskan Islam. Suatu hal yang wajar apabila dalam Kongres Umat Islam di Yogyakarta disebutkan, GPII satu-satunya organisasi pemuda Islam yang bergerak dalam bidang politik. Kiprahnya sebagai organisasi pemuda yang mencetak kader-kader yang memiliki tanggung jawab terhadap Islam mendapat hambatan yang serius dari kalangan yang anti terhadap Islam. Dalam perkembangan akhirnya kemudian keterlibatannya dalam organisasi pemuda, bersinggung kalangan komunis. Tindakan PKI melalui organisasi pemudanya, Pemuda Rakyat, juga berusaha untuk memberantas organisasi pemuda yang dianggap kontra revolusioner melalui hasutan dan pengucilan (Pusjarah TNI, 1999: 70).

Berdasarkan uraian diatas yang terkandung dalam judul “Konflik PKI dan PII underbow Masyumi di Kanigoro Kediri Tahun 1965” adalah Peristiwa aksi sepihak PKI terhadap Pelajar Islam Indonesia underbow Masyumi yang melakukan mental training politik di Kanigoro Kediri pada Tahun 1965.

1.3 Ruang Lingkup

Penentuan ruang lingkup penelitian ini sangat penting bagi peneliti. Penentuan ruang lingkup dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang dibahas. Pembatasan ruang lingkup dilakukan supaya terfokus pada permasalahan yang akan dibahas. Ruang lingkup penelitian melingkupi waktu (temporal), tempat (spasial) dan materi.

Segi waktu (temporal) penelitian dimulai awal tahun 1965 yaitu bulan Januari yang menjadi awal terjadinya Peristiwa Kanigoro terjadi. Tepatnya berjalan selama setahun di desa Kanigoro wilayah kecamatan Keras, Kediri para peserta mental training Pelajar Islam Indonesia (PII) diserang oleh orang-orang PKI yang membalaskan dendam pada Peristiwa Madiun 1948. Dalam penuturan Anis Abiyoso dalam buku Teror Subuh di Kanigoro Peristiwa Kanigoro melemah gejolaknya sebelum terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan dirinya dibebaskan dari penjara setelah dituduh menjadi dalang terjadinya Peristiwa Kanigoro. Peristiwa ini berakhir ketika Anis Abiyoso dengan Luhung Priyokusumo dibebaskan dengan suatu upacara pelepasan di Kantor Kabupaten Kediri.

Ruang lingkup tempat (spasial) dalam penelitian ini adalah Kediri dan desa Kanigoro. Fokus utama dalam penelitian ini adalah Peristiwa Kanigoro yang menjadi sorot utama konflik PKI dan orang-orang PII yang merupakan afiliasi dari Masyumi.

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah latar belakang penyebab terjadinya Peristiwa Kanigoro pada Januari 1965 kemudian bagaimana proses terjadinya Konflik PKI dan PII di Kanigoro Tahun 1965 dan Penyelesaian Konflik PKI dan PII di Kanigoro Tahun 1965.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Apa Latar Belakang terjadinya konflik antara PKI dan PII di Kanigoro Tahun 1965 ?

2. Bagaimana Momentum dan Penyelesaian Peristiwa Kanigoro di Kediri Tahun 1965 ?
3. Bagaimana Dampak dari Konflik antara PKI dan PII di Kanigoro Tahun 1965 secara Nasional dan Lokal ?

1.5 Tujuan

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang dikaji adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji secara mendalam Latar Belakang Terjadinya Konflik PKI dan PII di Kanigoro pada Januari 1965 dilihat dari dua aspek sejarah nasional dan lokal.
- b. Untuk mengkaji secara mendalam Momentum dan Penyelesaian Peristiwa Kanigoro di Kediri Tahun 1965.
- c. Untuk mengkaji secara mendalam bagaimana dampak konflik PKI dan PII di Kanigoro secara nasional dan lokal terhadap peristiwa ini.

1.6 Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait, yakni :

- a. Menambah pengetahuan penulis tentang Peristiwa Kanigoro yang merupakan awal penumpasan orang-orang PKI oleh Aktivis Islam di Kediri tahun 1965
- b. Menambah pengetahuan pembaca mengenai khasanah kesejarahan, sehingga dapat menilai peristiwa sejarah dengan kritis dan objektif.
- c. Memberi gambaran bagi pembaca mengenai peristiwa sejarah besar di Kediri yang melibatkan Aktivis Islam dalam menumpas PKI hingga ke akarnya di daerah tersebut terutama di desa Kanigoro.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi generasi muda untuk mempelajari dan mengkritisi peristiwa sejarah di daerahnya untuk menambah wawasan pengetahuan kesejarahan di negara sendiri.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka mengemukakan pendapat para ahli dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu Konflik PKI dan PII underbow Masyumi di Kanigoro Kediri Tahun 1965, baik yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun yang tidak diterbitkan misalnya berupa laporan penelitian dan skripsi. Pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian terdahulu ini digunakan sebagai kerangka berpikir dalam penulisan ini. Pada bab ini juga penulis akan memaparkan pendekatan dan teori yang akan digunakan. Berbagai kajian teori, pendekatan dan penelitian terdahulu diperoleh dari sumber-sumber berupa buku, jurnal penelitian dan skripsi.

Penelitian yang dilakukan Sulistyono (2000: 30-39) mengemukakan bahwa dalam bukunya Berbagai bentrokan disertai kekerasan mencapai puncaknya dengan terjadinya insiden yang dikenal Peristiwa Kanigoro. Pada minggu kedua Januari 1965, Pelajar Islam Indonesia (PII), sayap pelajar Masyumi, menyelenggarakan sebuah pelatihan untuk kader-kader barunya di desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kediri. Kegiatannya disebut “latihan mental” dan Kanigoro dipilih sebagai tempat untuk mencoba keberanian anggota baru, sebab desa ini dikenal sebagai salah satu basis PKI. Anis Abiyoso, Ketua PII Jawa Timur, memimpin pelatihan tersebut. Salah seorang pengajarnya, Samelan, anggota Masyumi yang mendorong berdirinya cabang NU setahun sebelumnya, dilarang memberikan ceramah oleh Komandan Kodim Kediri. Perintah tersebut dikeluarkan pada 11 Januari 1965. Keesokan harinya, Anis Abiyoso memrotes keputusan itu dan meneruskan ceramah Samelan. Anggota BTI dan Pemuda Rakyat lalu mulai menyiapkan diri untuk menyerang masjid dan ruang kelas madrasah yang digunakan sebagai tempat penginapan peserta. Pada subuh 13 Januari, sekitar 2.000 anggota BTI dan Pemuda Rakyat menyerang tempat pelatihan tersebut. Dengan meneriakkan “Bunuuuh ! Bunuuuuuh ! Ganyaaaang !” Orang PKI masuk ke dalam masjid dengan membawa pedang, pisau, celurit, dan menyeret seluruh peserta sebanyak 120 orang ke halaman sekolah dan menyuruh berbaris untuk diikat bersama dengan seutas tali.

Penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan bagaimana peristiwa kanigoro terjadi namun dalam menjelaskan masih terlalu dangkal dalam mengemukakan latar belakang atau penyebab terjadinya Peristiwa Kanigoro sehingga peneliti mencari celah

dari penelitian terdahulu tersebut dengan mengkaji lebih dalam latar belakang terjadi konflik PKI dan PII di Kanigoro tahun 1965. Dimana peneliti membahas dan memfokuskan penelitian tentang Konflik yang terjadi antara PKI dan PII di Kanigoro dengan mengkaji latar belakang konflik PKI dan PII di Kanigoro, jalannya peristiwa dan dampak secara nasional dan lokal dari konflik ini.

Abiyoso dan Herfanda (1995: 50-60) mengatakan bahwa Cukup banyak catatan sejarah tentang teror dan kejahatan politik yang dilakukan kaum komunis, sejak Peristiwa Madiun sampai Pemberontakan G.30.S/ PKI. Tak kurang, yang masuk dalam buku-buku sejarah formal, diangkat ke film maupun sinetron. Namun hampir tak ada yang menyinggung gerakan perlawanan yang di lakukan PII (Pelajar Islam Indonesia). Tak banyak yang tahu, bahwa PII merupakan kelompok anak muda yang paling keras melakukan perlawanan terhadap PKI sekaligus menjadi organisasi pelajar yang paling diteror oleh aktivis partai tersebut. Karena itu, ketika Anis Abiyoso (mantan Ketua Departemen Kader PII wilayah Jawa Timur) menyodorkan catatan tertulis tentang “Peristiwa Kanigoro”, penulis langsung tertarik untuk mengemasnya menjadi tulisan bersambung di Harian Umum Republika. Apalagi, sebelumnya, penulis sempat mendengar cerita dari beberapa senior tentang teror yang dilakukan PKI terhadap anak-anak PII yang sedang mengikuti Batra di Kanigoro itu – sebuah peristiwa sejarah yang ketika itu cukup menggemparkan.

Penuturan tertulis dalam bentuk “kasar” itu ditawarkan melalui Dr. Sinasari Ecip (ketika itu Redaktur Pelaksana Republika) yang sudah kenal baik dengan Anis Abiyoso. Pada mulanya catatan tersebut hanya akan dikemas menjadi tiga tulisan pendek untuk Republika. Tetapi, setelah melihat materinya yang begitu penting dan menarik, bahkan tertulis tersebut lantas penulis kemas (tuliskan kembali) dalam gaya novel realistik setelah melakukan beberapa kali wawancara ulang dan recheck terhadap pelaku (korban) utama “teror Kanigoro” yakni Anis Abiyoso sendiri. Tulisan (buku) ini barangkali dapat dianggap sebagai “novel sejarah” atau “kisah nyata” yang bernilai sejarah dan bermuatan sebagai karya sastra (novel) sekaligus bernilai sebagai karya jurnalistik. Dr. Sinasari Ecip dan sejumlah pembaca pernah menyebut Teror subuh di Kanigoro ini sebagai salah satu contoh karya jurnalistik sastra atau karya jurnalistik bergaya sastra (literary journalism) – sebuah gaya jurnalistik yang muncul di Amerika Serikat sejak tahun

1970-an yang disebut *new journalism* dan kini banyak mempengaruhi gaya penulisan berita di berbagai belahan benua lain, termasuk Indonesia.

Disebutkan oleh Thomas B. Connery dalam *A Sourcebook of American Literary Journalism*, jurnalistik sastra adalah penyajian fakta-fakta (informasi) bernilai jurnalistik dengan teknik narasi fiksi realis. *Teror Subuh di Kanigoro* – melihat muatan informasi dan proses penulisannya, agaknya cukup tepat untuk disebut demikian. Namun, tak meleset jika disebut “*novel sejarah*” mengingat cukup besarnya peranan imajinasi dalam menghidupkan kisahnya. Apapun sebutan untuk tulisan ini, penulis yakin *Teror Subuh di Kanigoro* – sebagai sebuah catatan sejarah – tetap penting dan menarik untuk dibaca oleh generasi kini dan masa datang. Jikapun sejarah formal enggan mencatatnya, ia akan menjadi catatan “*sejarah pinggiran*” yang, Insya Allah, takkan henti-hentinya memberikan hikmah sekaligus peringatan atas bahaya komunisme bagi kehidupan umat beragama.

Namun penulisan Abiyoso mengenai Konflik PKI dan PII di *Kanigoro* ini tidak mengkaji secara mendalam, beliau hanya bersaksi berdasarkan apa yang dialaminya selama peristiwa *Kanigoro* itu terjadi dan saat beliau menjadi tahanan politik, kebenaran sejarah dari Peristiwa *Kanigoro* dikaji dari sisi PKI juga dengan mengumpulkan beberapa sumber yang mendukung penulisan penelitian. Konflik PKI dan PII di *Kanigoro* dilihat dari berbagai sisi karena semua kajian yang ditulis oleh beberapa peneliti/penulis adalah berdasarkan pada pihak masing-masing dan tidak membahas seluk beluk politik sebelum peristiwa ini terjadi.

Susanto SJ & Emingahayu (2007: 68-78) mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *Sisi Senyap Politik Bising* bahwa Dari studi kasus di empat kecamatan di Kabupaten Kediri, dengan jeli Sari mencatat bahwa sebelum 1965an masyarakat di daerah Kediri tidaklah tanpa konflik (justru) karena keakraban dengan perbedaan berdasar kelas sosial, yang tentunya juga berkaitan dengan restu dan kutuk dari ajaran keagamaan yang ada. Pertanyaan yang nampaknya mau dijawab oleh Penelitian Sari, dan mau dia bagikan kepada sesama generasi muda masa kini yaitu : bagaimana mungkin dalam beberapa bulan peristiwa tahun 1965an dapat menghasilkan korban pembantaian massal sedahsyat itu. Kalangan muda Indonesia beberapa tidak semua yang entah kapan sekali waktu akan menjadi sadar dan radikal sesudah membaca tulisan Sari yang berusaha menyambung lidah (sebagian) rakyat yang dilibat-libatkan dalam

peristiwa tahun 1965an di Jawa Timur. Sebagaimana dia sendiri dan banyak orang muda radikal lainnya yang juga pernah membaca naskah tulisan Pipit Rukhiyat- Saya PKI atau Bukan PKI- tulisan Sari berikut ini adalah bersuara seirama, meskipun tidak seseram naskah pipit.

Menurut Sari Emingahayu, Kediri adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang mayoritas bersuku Jawa. Tipikal suku Jawa yang berada di Kediri lebih cenderung inklusif, dinamis dan agak kasar (brangsan). Hal ini sangat berbeda dengan tipikalnya suku Jawa yang berada di Jawa Tengah atau Yogyakarta yang cenderung agak kalem, lemah lembut dan dikenal lebih tenang serta kalau berdialog penuh dengan bahasa simbolik. Tipikal orang Kediri yang berbeda tersebut menjadi karakteristik sikap dasar yang kemudian membawa implikasi-implikasi tertentu terhadap aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Kediri. Dalam bidang politik, misalnya salah satu diantaranya adalah berkembangnya sikap apresiatif dan keterbukaan yang lebih eksplisit di kalangan masyarakat terhadap suatu organisasi dan paham politik yang dinamis dan kritis. Demikian juga halnya di Kediri secara umum kondisi kehidupan politik yang berkembang praktis dikatakan terproyeksikan secara utuh dari sikap dan karakteristik masyarakat sehari-hari.

Aspek agama pun mempunyai pengaruh yang cukup dominan dalam kehidupan politik di Kediri, karena latar belakang sejarah dan realitas sosial masyarakat dalam kaitannya dengan agama yang dianutnya kebetulan menemukan fenomena yang cukup kuat pengaruhnya yang santri dan abangan. Di Kediri, dalam hal yang menyangkut aspek spiritual basis santri cukup beragam walaupun sebagian besar adalah Nahdliyin. Begitupula dengan kekuatan Islam yang lain yaitu abangan juga cukup mendapat pengaruh yang besar pula. Dengan memperhatikan aspek ini maka tak pelak lagi faktor spiritualitas sangat berpengaruh dalam kehidupan politik. Kemudian yang nampak adalah wajah politik kekuatan agama dan non agama sangat dominan. Ini berarti jika asumsi umum bahwa kekuatan agama yang konservatif dan non agama menjadi basis pertarungan politik, maka situasi politik yang berkembang sangatlah keras dan berimbang. Buktinya ketika kita menyimak pertarungan dan perolehan dalam Pemilu 1955. Dimana NU mendapat perolehan suara peringkat pertama dan diikuti PKI di Kotamadya Kediri sedangkan di Kabupaten Kediri PKI peringkat pertama diikuti NU.

Penelitian lainnya mengenai Peristiwa Kanigoro adalah termuat dalam Buku Putih mengenai PKI berjudul Benturan NU-PKI 1948-1965 yang ditulis oleh Tim PBNU menyebutkan bahwa pada 13 Januari 1965 PII sebuah organisasi pelajar yang berafiliasi ke Masyumi, mengadakan pelatihan di Kanigoro, Kediri. Pada pagi dini hari pesantren pusat latihan PII tersebut diserbu oleh ribuan Pemuda Rakyat dan BTI yang bersenjata lengkap. Qur'an dan berbagai macam buku agama di injak-injak. Para pengasuh Pesantren Kiai Said Koenan dan KH Jauhari dianiaya. Sementara para pengurus PII digiring ke Polsek, dengan tuduhan Masyumi sebagai organisasi terlarang, telah melakukan tindakan makar dengan menyelenggarakan training politik di Kanigoro tersebut.

Dalam buku Benturan NU PKI 1948-1965, disebutkan juga bahwa ada hal yang berkaitan dengan alur peristiwa kanigoro terjadi, pimpinan pesantren yang ditempati training PII tersebut adalah Milik tokoh NU Kiai Jauhari, yang anaknya adalah pengasuh pesantren Lirboyo dan sekaligus sesepuh Banser. Maka pada 13 Januari 1965 segera dilakukan serangan balasan untuk membebaskan para Kiai dan pengurus PII yang ditahan polisi dan BTI. Delapan truk berisi Banser Kediri menyerbu menggerebek rumah para pimpinan PKI dan menangkap pelaku penyerbuan PII yaitu Suryadi dan Harmono yang kemudian diserahkan ke Kantor Polisi. Seterusnya para aktivis PII banyak minta perlindungan pada para kiai dan tokoh NU Kanigoro. Maka dengan mudah dikepung oleh PKI sehingga pelaksanaan Pelatihan tersebut terhenti. Saat itu Pemuda Anzor beserta segenap santri Lirboyo yang dipimpin Gus Maksum datang untuk membebaskannya.

Dalam penelitian Robbert Crib mengenai Peristiwa tahun 1965, di dalam bukunya yang berjudul *The Indonesian Killings 1965-1966, Studies from Java and Bali* menyebutkan adanya Peristiwa Kanigoro pada Januari 1965, bahwa Setelah aksi sepihak dimulai, namun tuan tanah Muslim di Kediri memiliki ketakutan terburuk yang dikonfirmasi oleh perampasan tanah oleh kelompok ratusan petani bersenjata tombak bambu tajam dan senjata mentah lainnya. Para pemimpin Muslim sering berbicara tentang apa yang telah dialami pada tahun 1948 ketika garis pertempuran surut dan mengalir - ketika PKI mengendalikan telah menyerang desa-desa santri dan sekolah-sekolah agama Islam. Para pemimpin desa Santri selalu memiliki sedikit kesulitan meyakinkan komunitasnya bahwa aksi itu bukan hanya upaya tidak adil untuk

merebut tanah, tetapi bahwa ditujukan terhadap nilai-nilai dan keberadaan komunitas santri. Seperti pada 1948, karakter utama komunis di mata penduduk desa Muslim adalah permusuhan PKI terhadap Islam, kecenderungan PKI untuk melakukan kekerasan dan sihir hitam abangnya. Selebaran diedarkan pada tahun 1965 (di Kediri dan sekitarnya) untuk mengingatkan orang-orang percaya bahwa ribuan Muslim dibunuh oleh pihak lain dalam insiden Madiun pada tahun 1948.

Konstruksi Muslim atas situasi di Kediri sangat diperkuat ketika PKI menyerang sebuah sekolah yang dioperasikan oleh organisasi siswa Pemuda Islam Indonesia (PII, Pemuda Islam Indonesia) di Kanigoro di kecamatan Keras di selatan Kediri pada Januari 1965. PII adalah mantan afiliasi Partai Masyumi Muslim, yang telah dilarang oleh pemerintah nasional pada tahun 1960. Kelompok PKI menemukan siswa PII dan menyerahkannya kepada polisi sebagai subversif. Kisah Muslim tentang insiden itu menekankan tuduhan bahwa kader-kader PKI memasuki masjid dengan kaki kotor, menganiaya kyai sekolah dan menginjak-injak Alquran. Peristiwa ini, dan satu lagi yang melibatkan bentrokan antara Muslim dan komunis di pesantren Lodoyo pada tahun 1964, berfungsi baik untuk menyulut desas-desus populer di kalangan santri tentang kelakuan buruk para 'ateis' dan untuk memperketat tekad kyai dalam oposisinya terhadap PKI. Jelas bahwa bahan untuk kebakaran tersebut telah dibangun ke tingkat yang sangat mudah terbakar. Begitu percikan api masuk dari api politik nasional, PKI akan menyalakan campuran Jawa Timur yang bergejolak ini dan membakar di sini dengan intensitas tinggi.

Dari uraian beberapa hasil penelitian diatas penyajian mengenai Peristiwa Kanigoro yang merupakan konflik antara PKI dan PII underbow Masyumi di Kediri ternyata masih ada celah-celah yang belum diteliti yaitu mengenai tentang menguraikan Peristiwa ini dengan mengetahui faktor politik saat terjadinya Konflik PKI dan PII di Kanigoro yang terjadi sekitar tahun 1965 sebelum peristiwa nasional yaitu Gerakan 30 September dan jalannya peristiwa ini juga berlangsung sesudahnya setelah peristiwa 1 Oktober 1965, peneliti harus mencari perspektif lokal dan nasional dalam kajian sejarah yang ditulis oleh penelitian ini.

Menurut Sartono Kartodirjo (1992: 4) Peristiwa sejarah sangat tergantung pada pendekatan dari segi mana kita memandangnya, dimensi yang diperhatikan dan unsur-unsur yang diungkapkan. Hasil penulisan akan ditentukan oleh jenis pendekatan yang

dipakai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Politikologis. Sedangkan teori yang digunakan adalah Teori Konflik Dahrendorf.

Pendekatan politikologis menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan, dan lain sebagainya. Dengan sendirinya jelaslah bahwa sebagai pendekatan itu hanya dapat dilakukan dengan bantuan pengetahuan konsep dan teori ilmu sosial, yaitu sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Secara lebih rinci kemudian akan dijelaskan lebih lanjut. Dalam menghadapi gejala yang serba kompleks, setiap penggambaran atau deskripsi menuntut adanya pendekatan yang memungkinkan penyaringan data yang diperlukan. Suatu seleksi akan dipermudah dengan adanya konsep yang berfungsi sebagai kriteria (Kartodirjo, 1992: 4).

Tema yang telah dipilih dalam penulisan sejarah ini adalah Peristiwa Kanigoro menggunakan pendekatan politikologis karena konsep dari pendekatan ini sendiri sesuai dengan penelitian. Maka bisa dikatakan bahwa Penulisan Sejarah ini menggunakan Pendekatan Politikologis. Konflik PKI dan Pemuda Islam Indonesia ini juga menyinggung struktur kekuasaan namun juga mengenai pertentangan kekuasaan terutama oleh daerah basis yang memicu konflik di Kanigoro.

Teori Konflik Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap teori itu merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena sosial. Dahrendorf menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama (kemudian dia menyempurnakan posisi ini dengan menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat dianalisa dengan fungsionalisme struktural dapat pula dianalisa dengan teori konflik dengan lebih baik (Poloma, 2003: 130).

Masalah konflik tidak kurang kompleksnya daripada masalah integrasi masyarakat, diketahui sekarang bahwa upaya untuk mengurangi semua sebenarnya terjadi konflik sosial kelompok dengan prinsip umum, seperti pada topik pembahasan penelitian yang menegaskan adanya konflik sosial kelompok politik pada tahun 1965 yaitu PKI dan PII yang berunderbow Masyumi. Seperti persaingan kelas, hal ini mengarah ke setiap pengalaman masyarakat atau secara empiris penyederhanaan yang tidak dapat dibenarkan seperti Sejarah semua masyarakat sejauh ini yaitu sejarah perjuangan kelas (Dahrendorf, 1958: 170-183).

Ada perang dan ada konflik antar partai politik ternyata dua jenis perjuangan yang berbeda. Berkenaan dengan masyarakat tertentu, misalkan PKI sebagai A dapat mengatakan ada konflik eksogen yang dibawa atau ke A dari luar, dan ada konflik endogen yang dihasilkan di dalam A. Sejauh menyangkut kondisi organisasi kelompok, ada faktor yang memiliki kondisi sosial tertentu yang efektif, misalnya komunikasi diantara anggota kuasi grup (PKI atau PII) dan metode rekrutmen tertentu ke dalam kuasi-grup. Selanjutnya ada kondisi politik tertentu yang harus dipenuhi jika ingin muncul kelompok kepentingan. Disini, di atas segalanya, jaminan kebebasan koalisi menjadi penting, seperti kelompok PKI dan PII akhirnya memiliki kondisi teknis tertentu harus dipenuhi, sebuah organisasi harus memiliki sarana material, pendiri, pemimpin dan ideologi. Kelompok PKI mempunyai sarana material sendiri, pendiri sebagai pentolannya DN Aidit dan pada peristiwa Kanigoro dipimpin oleh Suryadi dan ideologi PKI adalah komunis, sementara PII mempunyai sarana material sendiri, pendiri sekaligus pentolannya adalah Yoesdi Gazali dan pada peristiwa kanigoro pemimpin yang terlibat adalah Anis Abiyoso, dan ideologi yang PII anut adalah agamis dan nasionalis (Dahrendorf, 1958: 170-183).

Teori konflik sosial, masih dalam keadaan yang sangat mendasar, pendekatan yang didasarkan pada mendalilkan perubahan sosial dan konflik sosial yang terjadi di mana-mana, "disfungsionalitas" dari semua elemen struktur sosial dan karakter penghambat persatuan sosial. Pertimbangan kami menempatkan kami pada posisi untuk merumuskan beberapa persyaratan dari teori semacam itu:

1. Teori konflik harus menjadi teori ilmiah (seperti teori integrasi sosial), yaitu harus dirumuskan dengan mengacu pada penjelasan yang masuk akal dan demonstrable dari fenomena empiris (konflik Kanigoro antara PKI dan PII).
2. Unsur-unsur teori tidak boleh bertentangan dengan model konflik masyarakat. Konflik Kanigoro dipicu juga oleh konflik politik antara kelompok partai.
3. Kategori yang digunakan harus, jika memungkinkan, sesuai dengan teori integrasi atau setidaknya sesuai dengannya
4. Teori konflik harus memungkinkan untuk memperoleh konflik sosial dari pengaturan struktural dan dengan demikian menunjukkan konflik ini secara sistematis

5. Harus memperhitungkan keragaman bentuk konflik dan tingkat intensitasnya (Dahrendorf, 1958: 170-183).

Tujuan terakhir dari teori sosial adalah menjelaskan perubahan sosial. Teori integrasi memberi kita alat untuk menentukan titik tolak proses. Untuk menemukan lokus kekuatan yang mendorong proses dan perubahan sosial adalah tugas teori konflik. Ia harus mengembangkan model yang membuat asal-usul struktural konflik sosial dapat dipahami. Ini tampaknya hanya mungkin jika kita memahami konflik sebagai perjuangan di antara kelompok-kelompok sosial, yaitu, jika kita membuat tugas kita tepat sejauh itu mereduksi ke analisis struktural kelompok-kelompok yang berkonflik. Di bawah anggapan ini, tiga pertanyaan muncul terutama ke permukaan yang harus dijawab oleh teori konflik:

1. Bagaimana kelompok-kelompok (PKI dan PII) yang berkonflik muncul dari struktur masyarakat?
2. Apa bentuk perjuangan di antara PKI dan PII tersebut?
3. Bagaimana konflik di antara PKI dan PII tersebut mempengaruhi perubahan dalam struktur sosial? (Dahrendorf, 1958: 170-183).

Konsep teori konflik yang disampaikan Dahrendorf dalam memecahkan masalah penelitian ini adalah berdasarkan beberapa faktor dan syarat yang dikemukakan diatas, judul terumuskan bahwa konflik antar dua kelompok berbeda yang memiliki kepentingan politik masing-masing yang ingin berlomba mendapat kelas untuk menjadi paling unggul. Teori konflik sosial Dahrendorf juga mendukung bagaimana bentuk perjuangan antara kelompok-kelompok tersebut dalam mempertahankan kelas PKI dan PII pada saat berkonflik yaitu mempertahankan basis pertahanan tempatnya seperti PKI yang mempunyai basis di Kanigoro sementara kelompok PII yang mengadakan mental training (kegiatan politik) di daerah basis PKI yang kemudian menyebabkan konflik.

Antitesis terbaiknya ditunjukkan oleh karya Dahrendorf (1958) menjelaskan Teori Konflik didasarkan pada :

1. Setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan
2. Melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial
3. Berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan

4. Melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya
5. Menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Dasar teori Dahrendorf adalah penolakan dan penerimaan parsial serta perumusan kembali teori Karl Marx. Dalam usaha melakukan penyangkalan parsial teori Marx itu Dahrendorf menunjukkan beberapa perubahan yang terjadi dalam masyarakat industri semenjak abad kesembilan belas. Di antara perubahan-perubahan itu ialah : (1) dekomposisi modal, (2) dekomposisi tenaga kerja, dan (3) timbulnya kelas menengah baru. Secara singkat kita akan membahas masing-masing perubahan yang dimaksud (Poloma, 2003: 131).

Pendapat ini mendukung struktur konflik yang menjadi pembahasan penelitian mengenai kepentingan kelompok penguasa yang pada tahun 1965 PKI (sebelum pemberontakan besar 30 September) yang menjadi “penguasa” di Indonesia yang memiliki ideologi komunis dalam kekuasaannya serta kelompok lain yang berbeda ideologi menimbulkan ancaman antara hubungan sosial dan ideologi kelompok lain seperti PII, maka konflik PKI dan PII yang menjadi permulaan konflik besar antar partai politik selama berbulan-bulan sampai akhirnya meletusnya G 30 S/PKI.

Perspektif Teori Konflik Dahrendorf dari segi Kelompok pertentangan, pertentangan kelompok dan perubahan sosial

Menurut perumusan Dahrendorf (1959: 206) pertentangan kelas harus dilihat sebagai “kelompok-kelompok pertentangan yang berasal dari struktur kekuasaan asosiasi-asosiasi yang terkoordinir secara pasti”. Kelompok-kelompok yang bertentangan itu, sekali PKI dan PII ditetapkan sebagai kelompok kepentingan akan terlibat dalam pertentangan yang niscaya akan menimbulkan perubahan struktur sosial. Pertentangan antara buruh dan manajemen, yang merupakan topik permasalahan utama bagi Marx, misalnya, akan terlembaga lewat serikat-serikat buruh. Pada gilirannya, serikat buruh tersebut akan terlibat dalam pertentangan yang mengakibatkan perubahan di bidang hukum serta ekonomi dan perubahan-perubahan konkrit dalam sistem pelapisan masyarakat. Timbulnya kelas menengah baru, yang sebelumnya diuraikan dalam Bab ini, sebenarnya merupakan suatu perubahan struktural yang berasal dari institusional pertentangan kelas (Poloma, 2003: 136).

Dahrendorf menegaskan bahwa teori konfliknya merupakan model pluralitas yang berbeda dengan model dua-kelas yang sederhana dari Marx. Marx menggunakan seluruh masyarakat sebagai unit analisa, dengan orang-orang yang mengendalikan sarana produksi lewat pemilikan sarana tersebut atau orang yang tidak ikut dalam pemilikan yang demikian. Manusia dibagi ke dalam kelompok yang punya dan yang tidak. Dalam menggantikan hubungan-hubungan kekayaan dengan hubungan kekuasaan sebagai inti dari teori kelas, Dahrendorf (1959: 213) menyatakan bahwa model dua-kelas ini tidak dapat diterapkan pada masyarakat secara keseluruhan tetapi hanya pada asosiasi-asosiasi tertentu yang ada dalam suatu masyarakat:

“Bilamana dalam suatu masyarakat tertentu terdapat lima puluh asosiasi, kita seharusnya berharap menemukan seratus kelas, atau kelompok-kelompok pertentangan dalam pengertian studi ini. Terlepas dari hal itu, mungkin terdapat jumlah kelompok-kelompok pertentangan yang tak terhitung dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari antagonisme yang berbeda dengan pertentangan yang berdasarkan atas struktur kekuasaan asosiasi”.

Dahrendorf mengakui bahwa penyebaran kelompok-kelompok yang ekstrim serta pertentangan-pertentangan tersebut jarang sekali terjadi dalam kenyataan. Biasanya dalam masyarakat historis tertentu pertentangan yang berbeda saling tumpang tindih, jadi dalam kenyataannya medan pertentangan itu berada di beberapa arena yang dominan saja. Fenomena ini mengandung makna bahwa figur kekuasaan sebuah institusi (misalnya gereja) tidak perlu mengambil bagian dalam kekuasaan institusi lain (misalnya negara). Bilamana pemisahan itu terjadi di dalam sebagian besar institusi, maka intensitas pertentangan akan meningkat. Dengan perkataan lain bila terdapat hubungan yang kuat di mana anggota-anggota suatu kelompok berada di struktur bawah, kemudian juga merupakan anggota kelompok lain dengan kedudukan yang sama, maka setiap ledakan konflik akan menjadi semakin tajam. Dahrendorf (1959: 215) mengungkapkan hal itu dalam pernyataan yang mirip proposisi sebagai berikut: “bilamana kelompok-kelompok kepentingan saling bertemu dalam beberapa asosiasi dan dalam beberapa pertikaian, maka semua energi yang digunakan akan disatukan dan sebuah konflik kepentingan yang keras akan lahir”. Dalam contoh tentang kaum wanita sebagai suatu kelompok semu yang telah berubah menjadi kelompok kaum wanita adalah bagian dari lapisan yang diperintah. Menurut hukum seorang wanita harus

tunduk kepada suaminya, kemudian di kantor-kantor ia tetap diabaikan dalam promosi jabatan, dan di dalam organisasi sukarela pun sering tidak diikuti dalam struktur kekuasaan oleh karena jenis kelamin itu. Pengucilan yang berganda dari struktur kewenangan semacam itu dapat diamati di dalam sejarah hubungan-hubungan kelompok minoritas, hubungan-hubungan perburuhan dan hubungan-hubungan antar bangsa (Poloma, 2003: 137-138).

Dahrendorf berpendapat bahwa kekayaan, status ekonomi, dan status sosial walau bukan merupakan determinan kelas, demikian menurut istilah yang ia pergunakan benar-benar dapat mempengaruhi intensitas pertentangan. Ia menyetujui proposisi berikut ini: “semakin rendah korelasi antara kedudukan kekuasaan dan aspek-aspek status sosial ekonomi lainnya, semakin rendah intensitas pertentangan kelas dan sebaliknya” (1959: 218). Dengan perkataan lain, kelompok-kelompok yang menikmati status ekonomi relatif tinggi memiliki kemungkinan yang rendah untuk terlibat dalam konflik yang keras dengan struktur kekuasaan daripada mereka yang terbuang dari status sosial ekonomi dan kekuasaan (Poloma, 2003: 138).

Bagi Dahrendorf, dan juga bagi Coser dalam masyarakat pertentangan itu tidak dapat dihilangkan. Pertentangan tersebut fungsional bagi perkembangan dan perubahan struktur sosial. Yang penting ialah bahwa pertentangan itu diatur melalui institusionalisasi daripada melalui usaha-usaha untuk menekannya (Poloma, 2003: 138).

Dahrendorf (1968) menjelaskan bahwa di dalam masyarakat terdapat perbedaan di antara mereka yang memiliki sedikit dan banyak kekuasaan/wewenang. Perbedaan dominasi itu dapat terjadi secara drastis. Tetapi pada dasarnya tetap terdapat dua kelas sosial yaitu mereka yang berkuasa dan yang dikuasai. Dalam analisisnya Dahrendorf menganggap bahwa secara empiris, pertentangan kelompok mungkin paling mudah di analisis bila dilihat sebagai pertentangan mengenai legitimasi hubungan-hubungan kekuasaan. Dalam setiap asosiasi, kepentingan kelompok penguasa merupakan nilai-nilai yang merupakan ideologi keabsahan kekuasaannya, sementara kepentingan-kepentingan kelompok bawah melahirkan ancaman bagi ideologi serta hubungan-hubungan sosial yang terkandung di dalamnya (Soepeno, 2014: 86-87).

Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap teori tersebut merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena sosial. Ralf Dahrendorf menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik

dan sisi kerja sama, atau dengan arti lain bahwa masyarakat mempunyai dua wajah yakni konflik dan konsensus. Sehingga teori sosiologi harus dibagi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus.

Teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan tersebut. Dahrendorf mengakui bahwa terbentuknya sebuah masyarakat tidak akan terlepas dari adanya unsur yakni konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lainnya. Meski ada hubungan timbal balik antara konsensus dan konflik, Dahrendorf tidak optimis mengenai pengembangan teori sosiologi tunggal yang mencakup kedua proses itu. Dia menyatakan “mustahil menyatukan teori untuk menerangkan masalah yang telah membingungkan pemikir sejak awal perkembangan filsafat barat”. Untuk menghindarkan dari teori tunggal tersebut, Dahrendorf membangun teori konflik Masyarakat.

Dahrendorf sangat dipengaruhi oleh teori fungsionalisme struktural. Ia menyatakan bahwa, menurut fungsionalis, sistem sosial dipersatukan oleh kerja sama sukarela atau oleh konsensus bersama oleh kedua-duanya. Tetapi, menurut teoritis konflik bahwa masyarakat dipersatukan oleh “ketidakbebasan yang dipaksakan”. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis”. (Soepeno, 2014: 101).

Dahrendorf memusatkan perhatiannya pada struktur sosial yang lebih luas. Inti tesisnya adalah gagasan bahwa berbagai posisi dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Hal ini sama halnya dengan pembahasan mengenai konflik PKI dan PII di Kanigoro yang juga mengalami teori konflik yang dikemukakan Dahrendorf ini, dimana bahwa kelompok otoritas yaitu PKI yang menguasai Kanigoro sebagai basisnya dan lebih mendominasi penyerangan terhadap PII yang mengadakan mental training disana.

Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi; karena itu hanya ada dua kelompok konflik yang memegang posisi otoritas dan kelompok konflik yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu. Di dalam setiap asosiasi, orang yang berada pada posisi dominan berupaya mempertahankan *status quo*, sedangkan orang yang berada dalam posisi subordinat berupaya mengadakan perubahan. Konflik kepentingan di dalam asosiasi selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersembunyi. Ini berarti legitimasi otoritas mulai terancam.

Ralf Dahrendorf kemudian memaparkan tentang kelompok, konflik dan perubahan. Dahrendorf membedakan tiga tipe utama kelompok. (1). Pertama adalah kelompok semu (quasi group) (2). Kedua adalah kelompok kepentingan. (3). Ketiga adalah kelompok konflik yang muncul dari berbagai kelompok kepentingan (Soepeno, 2014: 101-102).

Aspek terakhir teori konflik dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan. Dalam hal ini Dahrendorf mengakui pentingnya pemikiran Lewis A coser yang memusatkan perhatian pada fungsi konflik dalam mempertahankan status quo. Akan tetapi, Dahrendorf menganggap fungsi konservatif dari konflik hanyalah satu bagian realitas sosial, konflik juga mengakibatkan perubahan dan perkembangan.

Singkatnya Dahrendorf menyatakan bahwa segera setelah kelompok konflik muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang melakukan perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal. Bila konflik disertai dengan tindakan kekerasan maka akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba (Soepeno, 2014: 102).

Teori konflik telah dikritik dengan berbagai alasan. Misalnya teori ini diserang karena mengabaikan ketertiban dan stabilitas, sedangkan fungsionalisme structural diserang karena mengabaikan konflik dan perubahan, teori konflik juga dikritik karena berideologi radikal, sedangkan fungsionalisme structural dikritik karena ideology konservatifnya. Bila dibandingkan dengan fungsionalisme structural, teori konflik tergolong tertinggal dalam perkembangannya. Teori ini hampir tak secanggih fungsionalisme, mungkin karena merupakan teori turunan.

Kritik Utama terhadap Teori Konflik Dahrendorf menjadi subjek sejumlah analisis kritis (misalnya, analisis Hazelrigg, 1972; Turner, 1973; Weingart, 1969),

termasuk pemikiran kritis oleh Dahrendorf sendiri (1968). Hasil analisis kritis itu sebagai berikut :

1. Bila dibandingkan dengan fungsionalisme struktural, teori konflik tergolong tertinggal perkembangannya, teori ini hampir tak secanggih fungsionalisme, mungkin karena merupakan teori turunan.
2. Model Dahrendorf tak secara jelas mencerminkan pemikiran Marxian seperti yang ia nyatakan. Teori konflik merupakan terjemahan yang tak memadai dari teori Marxian ke dalam sosiologi.
3. Teori konflik lebih banyak kesamaannya dengan fungsionalisme struktural ketimbang dengan teori Marxian. Penekanan Dahrendorf pada hal-hal seperti sistem (asosiasi yang dikoordinasikan secara paksa), posisi dan peran, secara langsung mengkaitkannya dengan fungsionalisme struktural. Akibatnya teorinya menderita kekurangan yang sama dengan fungsionalisme struktural. Misalnya konflik tampak muncul secara misterius dari sistem yang sah (sebagaimana dalam fungsionalisme struktural). Selanjutnya teori konflik menderita berbagai masalah konseptual dan logika seperti yang dialami fungsionalisme struktural (misalnya konsep yang samar-samar, tautologi) (Turner, 1975, 1982).
4. Seperti fungsionalisme struktural, teori konflik hampir seluruhnya bersifat makroskopik dan akibatnya sedikit sekali yang ditawarkan kepada kita untuk memahami pemikiran dan tindakan individu.
5. Fungsionalisme dan teori konflik Dahrendorf adalah tak memadai karena masing-masing hanya berguna untuk menerangkan sebagian saja dari kehidupan sosial. Sosiologi harus mampu menerangkan ketertiban maupun konflik, struktur maupun perubahan.

Alasan penggunaan Teori Konflik Dahrendorf dalam penelitian ini adalah konsep teori konflik yang disampaikan Dahrendorf dalam memecahkan masalah penelitian ini adalah berdasarkan penyebab dan syarat yang dikemukakan sebelumnya, judul penelitian yang sudah terumuskan bahwa konflik antar dua kelompok berbeda yang memiliki kepentingan politik masing-masing yang ingin berlomba mendapat

mendapat kelas yang paling unggul. Teori konflik sosial Dahrendorf juga mendukung bagaimana bentuk perjuangan antara kelompok-kelompok (PKI dan PII) dalam mempertahankan kelas mereka pada saat berkonflik pada konsepnya yaitu basis pertahanan yang diperebutkan seperti PKI yang mempunyai basis di Kanigoro sementara kelompok PII yang mengadakan mental training (kegiatan politik) di daerah basis PKI yang kemudian menyebabkan konflik politik disana.

Kerangka pemikiran penulis dalam memandang Konflik PKI dan Pelajar Islam Indonesia di Kanigoro Kediri adalah dimulai dari Teori Konflik yang dikemukakan Dahrendorf. Pemikiran Dahrendorf mengenai Teori Konflik dalam memecahkan masalah penelitian ini adalah berdasarkan beberapa faktor dan syarat yang dikemukakan di atas, judul terumuskan bahwa konflik antar dua kelompok berbeda yang memiliki kepentingan politik masing-masing yang ingin berlomba mendapatkan kelas untuk menjadi paling unggul. Teori konflik sosial Dahrendorf juga mendukung bagaimana bentuk perjuangan antara kelompok-kelompok tersebut dalam mempertahankan kelas mereka pada saat berkonflik yaitu mempertahankan basis pertahanan tempat mereka seperti PKI yang mempunyai basis di Kanigoro sementara kelompok PII yang melakukan kegiatan mental training politik di daerah basis PKI yang kemudian menyebabkan konflik. Pendekatan Politikologis dalam menyorot Peristiwa Kanigoro tahun 1965 ini adalah bahwa struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan, dan lain sebagainya. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan bantuan pengetahuan konsep teori ilmu sosial yaitu sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Penentuan Teori dan Pendekatan yang sudah dipilih oleh peneliti sudah cukup sesuai untuk menyoroti tema penelitian ini dan sesuai dengan judul penelitian yang terumuskan berdasarkan pendapat ahli untuk Teori Konflik Dahrendorf dan Pendekatan Politikologis Sartono Kartodirjo. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yaitu mengkaji Konflik Kanigoro ini dari perspektif lokal dan nasional serta mengkaji secara mendalam bagaimana sebenarnya peristiwa ini bisa terjadi.

Kerangka Berpikir antara Teori dan Pendekatan ‘sesuai judul penelitian’

Teori Konflik ‘Dahrendorf’

Konsep teori konflik yang disampaikan Dahrendorf dalam memecahkan masalah penelitian ini adalah berdasarkan beberapa faktor dan syarat yang dikemukakan diatas, judul terumuskan bahwa konflik antar dua kelompok berbeda yang memiliki kepentingan politik masing-masing yang ingin berlomba mendapat kelas untuk menjadi paling unggul. Teori konflik sosial Dahrendorf juga mendukung bagaimana bentuk perjuangan antara kelompok-kelompok tersebut dalam mempertahankan kelas mereka pada saat berkonflik yaitu mempertahankan basis pertahanan tempat mereka seperti PKI yang mempunyai basis di Kanigoro sementara kelompok PII yang mengadakan mental training (kegiatan politik) di daerah basis PKI yang kemudian menyebabkan konflik.

Pendekatan Politikologis

Pendekatan politikologis menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan, dan lain sebagainya. Dengan sendirinya jelaslah bahwa sebagai pendekatan itu hanya dapat dilakukan dengan bantuan pengetahuan konsep dan teori ilmu sosial, yaitu sosiologi, antropologi, dan ilmu politik.

Konflik PKI dan PII underbow Masyumi di Kanigoro

Penentuan Teori dan Pendekatan yang sudah dipilih oleh peneliti sudah cukup sesuai dengan judul penelitian yang terumuskan berdasarkan pendapat ahli untuk Teori Konflik Dahrendorf dan Pendekatan Politikologis Sartono Kartodirjo.

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yaitu mengkaji Konflik Kanigoro ini dari perspektif lokal dan nasional serta mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana sebenarnya peristiwa ini bisa terjadi.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah, pada waktu melakukan kegiatan penelitian harus menggunakan metode yang sesuai dengan bidang ilmunya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian sejarah, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses mengkaji serta menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau manusia (Gottschalk, 1985: 32). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah adalah prosedur kerja sejarawan untuk menguji dan menganalisa sumber-sumber sejarah peninggalan masa lampau secara kronologis, kritis, dan logis yang kemudian disajikan dalam cerita sejarah. Adapun langkah-langkah metode penelitian sejarah meliputi empat tahap, yaitu : (1) Heuristik (Pengumpulan Sumber), (2) Kritik, (3) Interpretasi, (4) Historiografi (Penulisan) (Gottschalk, 2008: 18).

1. Heuristik

Berdasarkan langkah-langkah metode penelitian sejarah, maka kegiatan pertama yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ialah mengumpulkan dan menemukan sumber-sumber sejarah berupa jejak-jejak sejarah atau fakta sejarah yang disebut Heuristik (Sjamsuddin, 1996: 67). Sumber yang dikumpulkan tentunya adalah sumber-sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Berkaitan dengan kegiatan heuristik, penulis berusaha mencari sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan Peristiwa Kanigoro: Konflik PKI dan PII underbow Masyumi di Kediri Tahun 1965..

Pada penelitian dilakukan pencarian berbagai sumber sejarah berupa buku, laporan penelitian, artikel, jurnal yang diperoleh di perpustakaan-perpustakaan antara lain: (1) Perpustakaan dan laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah, (2) Perpustakaan Universitas Jember, (3) Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, (4) Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Jember. Pada proses pengumpulan sumber ini, sumber yang terkumpul di klasifikasikan menjadi dua yaitu: Sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang ditulis seaman dengan peristiwa yang terjadi, yakni orang yang hadir pada peristiwa yang dikisahkannya disebut saksi pandangan mata (Gottschalk, 2008: 35).

Pada tahap pengumpulan sumber ini peneliti hanya menemukan (alasan) 8 sumber primer berupa bukti telegram yang diterbitkan Amerika Serikat tanggal 25 November 1965 mengenai terjadinya Peristiwa 1965 di Jawa Timur yang berkaitan

dengan PKI dengan kelompok Islam dan memorandum yang terbit setelahnya menjelaskan tentang keterlibatan AH Nasution Serta kesaksian Anis Abiyoso dalam buku Teror Subuh di Kanigoro yang merupakan Saksi terlibat dalam Peristiwa Kanigoro yang pada saat itu menjabat sebagai ketua PII Jawa Timur. Abiyoso juga sempat dipenjara karena dituduh telah menyebabkan Peristiwa Kanigoro. Ketiga terdapat sumber primer yaitu koran Harian rakjat tanggal 8 dan 9 Januari 1965 sebagaimana permulaan Peristiwa Kanigoro. Kemudian sumber sekunder yang digunakan penulis dan berdasarkan kritik sumber yang telah penulis lakukan, fakta-fakta, data statistik yang terdapat dalam sumber sekunder yang penulis gunakan mengandung unsur-unsur primer dan paling relevan dengan penelitian serta foto yang diambil saat terjadinya Peristiwa Kanigoro tahun 1965, foto ini disimpan di arsip kabupaten kediri. Selanjutnya terdapat koran Harian Rakjat edisi 11, 12, 13 Februari 1965 yang menjelaskan secara spesifik konflik PKI dan PII di Kanigoro ini dari perspektif BTI dan Pemuda Rakyat yang dimuat dalam koran berhaluan kiri tersebut pada tahun tersebut.

Sumber sekunder yang paling relevan dan paling mendekati sumber primer tersebut antara lain : (1) *Palu Arit di Ladang Tebu* buku yang ditulis oleh Hermawan Sulistyono, buku ini sangat relevan untuk digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini. Data yang diperoleh di dalamnya mengandung unsur-unsur primer yang dapat dipertanggung jawabkan langsung; (2) Tulisan TNI yang diterbitkan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah mengenai Buku Panduan Monumen Pancasila Sakti, di dalam buku ini terdapat penjelasan mengenai Peristiwa Kanigoro dengan sudut pandang kenegaraan sehingga penulis dapat menulis rujukan dengan berbagai sudut pandang mengenai peristiwa ini; (3) *1965 Indonesia dan Dunia* ditulis oleh Bernd Schaefer dan Wardaya T Baskara, di dalam buku juga menuliskan berbagai Peristiwa Sekitar 1965 di berbagai daerah di Indonesia sehingga buku ini mendukung unsur isi dalam penelitian ini dengan memakai sudut pandang historis, (4) *Indonesian Communism Under Soekarno* ditulis oleh Rex Mortimer yang terbit tahun 2011 yang isi dalam buku ini menulis tentang pemberontakan sekitar tahun 1965 di Indonesia dan berbagai daerah yang ada di Indonesia serta menjelaskan dari segi sejarah sekitar tahun 1965-1966 dan isinya juga dapat dipertanggung jawabkan; (5) *Tahun yang tak pernah berakhir memahami pengalaman korban 65* di tulis oleh John Roosa yang terbit tahun 2004 berisi tentang pengakuan korban-korban yang mengalami peristiwa sekitar tahun

1965 yang ada beberapa pendukung mengenai penelitian ini di Jawa Timur dan isinya dapat dipertanggung jawabkan karena buku ini menyusun dengan mewawancarai korban tahun 1965; (6) *Sisi Senyap Politik Bising* ditulis oleh Budi Susanto dan Sari Emingahayu yang bukunya menulis tentang beberapa tulisan yang terjadi tentang berbagai peristiwa sekitar tahun 1965, namun penulis menyoroti tulisan Emingahayu mengenai peristiwa Kanigoro yang merupakan terjadinya konflik politik antara simpatisan PKI dengan orang-orang PII yang sedang melaksanakan mental training politik di Kanigoro, Kediri; (7) *Benturan NU-PKI 1948-1965* ditulis oleh Tim PBNU yang disebut sebagai buku putih mengenai PKI dengan berbagai konfliknya dengan partai Islam terutama NU buku ini memuat alur terjadinya peristiwa Kanigoro di Kediri tahun 1965; (8) *The Indonesian Killing 1965-1966, Studies from Java and Bali* ditulis oleh Robert Cribb menyebutkan Peristiwa Kanigoro terjadi di Kediri tahun 1965 dan mulai terjadinya adalah pada Januari 1965. Peristiwa ini dipelopori oleh Konflik simpatisan PKI dengan orang-orang PII yang mengadakan mental training politik di desa Kanigoro kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

Peneliti memperoleh sumber sekunder dari UPT Perpustakaan Universitas Jember, Internet dan koleksi pribadi peneliti. Dari sumber-sumber diatas tidak kemungkinan sumber yang akan digunakan peneliti bertambah dengan seiringnya perjalanan melakukan penelitian.

2. Kritik

Langkah selanjutnya setelah pengumpulan sumber ialah kritik sumber untuk mencari keautentikan sumber yang telah diperoleh. Oleh karena itu setelah mendapatkan sumber-sumber tidak langsung digunakan penulis sebagai bahan acuan sehingga, sumber yang diperoleh perlu dikiritisi untuk mencari kebenaran sumber (Sjamsuddin, 1996: 103). Dalam tahap ini peneliti melakukan uji keabsahan tentang keaslian sumber dengan melakukan dua tahap kritik yaitu kritik ekstern dan intern (Abdurrahman, 2007: 68).

Kritik sumber yang dilakukan mencakup dua hal yakni kritik intern dan kritik ekstern. Tahapan pertama ialah kritik ekstern peneliti melakukan verifikasi gaya tulisan, bahasa, kalimat, ungkapan huruf yang digunakan dalam sumber tersebut. Identifikasi sumber oleh penulis dilakukan dengan cara memilah sumber-sumber yang diperoleh sesuai dengan kajian akan dibahas. Selain itu penulis melakukan identifikasi apakah

sumber yang diperoleh merupakan sumber asli ataukah tiruan. Sumber sejarah dikatakan asli atau otentik jika sumber tersebut merupakan produk yang orang yang membuatnya (Sjamsuddin, 1996: 105). Dengan demikian, setelah melakukan tahapan tersebut akan diperoleh sumber yang benar-benar asli atau otentik.

Pada tahapan kedua dilakukan kritik intern ini menekankan pada aspek “dalam” yaitu isi dari sumber; kesaksian (testimony) (Sjamsuddin, 1996: 105). Hal yang dilakukan penulis untuk mendapatkan sumber yang kredibel serta reliabilitas dalam buku maupun dokumen adalah dengan membandingkan sumber-sumber yang didapat sehingga sumber yang digunakan benar-benar kredibel. Setelah mengkaji sumber-sumber tersebut penulis menemukan fakta-fakta sejarah yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Fakta tersebut digunakan dalam pembahasan Peristiwa Kanigoro: Konflik PKI dan PII underbow Masyumi di Kediri tahun 1965.

Pertama, peneliti mengkritik sumber yang berupa buku. Buku dari Anis Abiyoso dan Ahmadun Y Herfanda yang berjudul “*Teror Subuh di Kanigoro*”. Buku dari Anis Abiyoso dan Ahmadun Y Herfanda merupakan buku penunjang dari peneliti dikarenakan buku tersebut ditulis oleh tokoh yang terlibat langsung pada konflik PKI dan PII di Kanigoro tahun 1965 yaitu Anis Abiyoso yang menjabat sebagai ketua departemen Kader PII wilayah Jawa Timur. Selanjutnya ada buku dari kumpulan tulisan beberapa tokoh yang membahas tentang peristiwa Kanigoro khususnya Peristiwa-peristiwa tahun 1965. Seperti Hermawan Sulistyono dengan bukunya yang berjudul *Palu Arit di Ladang tebu, Buku Panduan Monumen Pancasila Sakti* ditulis oleh TNI, *Buku 1965 Indonesia dan Dunia* ditulis oleh Bernd Schaefer dan Wardaya T Baskara, *Buku Indonesian Commusim Under Soekarno* ditulis Rex Mortimer, *Buku Tahun yang tak pernah berakhir memahami pengalaman korban 65* ditulis oleh John Roosa, *Buku Sisi Senyap Politik Bising* ditulis Budi Santosa dan Sari Emingahayu, *Buku Benturan NU –PKI 1948-1965* ditulis oleh Tim PBNU dan *Buku The Indonesian Killing 1965-1966: Studies from Java and Bali* ditulis oleh Robert Cribb. Buku-buku ini adalah sumber sekunder dalam penulisan penelitian. Dalam kritik ekstern buku ini diterbitkan setelah tahun 1965, meskipun begitu tulisan-tulisan dari penelitian yang dilakukan sebelum dan sesudah Peristiwa Kanigoro terjadi.

Kemudian peneliti mendapatkan sumber bukti telegram yang terbit pada tahun 1965 yang menjelaskan adanya ketegangan politik PKI dan PII di Kediri Jawa Timur,

karena waktu terbit telegram yaitu saat terjadinya Peristiwa Kanigoro maka peneliti menggunakan isi telegram tersebut dijadikan penunjang penelitian dan peneliti bisa mendapatkan fakta mengenai konflik PKI dan PII di Kanigoro yang bisa digunakan dalam penulisan penelitian. Selanjutnya koran Harian Rakjat yang terbit pada tanggal 8 dan 9 Januari 1965. Dalam koran ini memang banyak sekali pendapat 'pro' PKI terhadap kegiatan mental training yang dilakukan di Kanigoro dan menuding elit tokoh yang tidak 'pro' terhadapnya, hal ini disampaikan oleh Sari Emingahayu di dalam bukunya. Koran Harian Rakjat pada 8 dan 9 Januari 1965 merupakan surat kabar pertama yang keluar saat Peristiwa Kanigoro akan terjadi. Selanjutnya juga penulis mendapat kliping Koran Harian Rakjat pada 11, 12, 13 Februari 1965. Di dalam koran tersebut terdapat informasi secara spesifik bagaimana jalannya konflik PKI dan PII di Kanigoro yang dijelaskan dari sudut pandang PKI karena koran ini merupakan koran berhaluan kiri. Jadi peneliti bisa menghindari subyektifitas dalam penulisan karena mendapat kesaksian dari sisi PKI dan PII terkait kejadian di Kanigoro Kediri tersebut.

Selanjutnya yaitu kritik intern, pada tahap ini peneliti melakukan penilaian terhadap kesahihan sumber yang diperoleh. Kesaksian dalam sejarah merupakan faktor paling menentukan sah tidaknya bukti atau fakta sejarah (Abdurrahman, 2007: 70). Kritik intern untuk dokumen atau buku dilakukan peneliti dengan cara memahami maksud dari kesaksian penulis dalam dokumen atau buku tersebut, sehingga peneliti dapat mengetahui dan memahami isi sumber dokumen atau buku yang digunakan dan kemudian membandingkan kesaksian dari berbagai sumber itu untuk memperoleh fakta sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Untuk kritik intern penulis menguji buku-buku dan jurnal dan bukti telegram yang didapatkan.

Pertama, peneliti mengkritik sumber yang berupa buku, Buku dari Anis Abiyoso dan Ahmadun Y. Herfanda yang berjudul "*Teror Subuh di Kanigoro*". Buku dari Anis Abiyoso dan Ahmadun Y. Herfanda merupakan sumber primer dari penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan penulis dari buku tersebut yaitu Anis Abiyoso merupakan tokoh yang terlibat langsung dalam Peristiwa Kanigoro bahkan dia sempat menjadi tahanan politik setelahnya. Selain itu, kesaksian dari Anis Abiyoso dapat dipertanggungjawabkan karena Anis Abiyoso adalah mantan Ketua Departemen Kader PII Wilayah Jawa Timur tahun 1965 dan Anis Abiyoso terlibat langsung dalam mental training di Kanigoro pada Januari 1965 saat Peristiwa Kanigoro dimulai.

Selanjutnya ada buku dari kumpulan tokoh yang membahas peristiwa Kanigoro seperti Hermawan Sulistyono dengan bukunya yang berjudul *Palu Arit di Ladang tebu, Buku Panduan Monumen Pancasila Sakti* ditulis oleh TNI, *Buku 1965 Indonesia dan Dunia* ditulis oleh Bernd Schaefer dan Wardaya T Baskara, *Buku Indonesian Commusim Under Soekarno* ditulis Rex Mortimer, *Buku Tahun yang tak pernah berakhir memahami pengalaman korban 65* ditulis oleh John Roosa, *Buku Sisi Senyap Politik Bising* ditulis Budi Santosa dan Sari Emingahayu, *Buku Benturan NU –PKI 1948-1965* ditulis oleh Tim PBNU dan *Buku The Indonesian Killing 1965-1966: Studies from Java and Bali* ditulis oleh Robert Cribb. Buku-buku ini adalah sumber sekunder dalam penulisan penelitian. Dalam kritik intern, penulis menggunakan buku ini karena berisi mengenai tulisan-tulisan penelitian mengenai Peristiwa Kanigoro sebelum dan sesudah terjadinya Peristiwa Kanigoro. Kesaksian yang dapat dipertanggungjawabkan dari tulisan ini adalah hasil dari fakta-fakta yang dipaparkan di buku-buku tersebut adalah hasil riset dan ditulis oleh para ahlinya seperti ahli sejarah John Roosa.

Sumber-sumber yang dipaparkan oleh peneliti diatas adalah sumber yang baru ditemukan oleh peneliti. Peneliti akan mencari sumber yang lain dan relevan dengan penelitian. Sumber yang akan dicari yang paling penting adalah dokumen-dokumen penting seperti bukti konkret dokumen-dokumen tentang peristiwa Kanigoro, buku-buku yang relevan dengan jalannya konflik PKI dan PII di Kanigoro ataupun sumber lain yang menunjang penelitian.

Langkah selanjutnya setelah melakukan kritik sumber adalah peneliti melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan dari hasil proses kritik. Interpretasi adalah kegiatan untuk menafsirkan dan menetapkan makna yang saling berhubungan antar fakta-fakta sejarah. Proses Intepretasi ini sering dianggap sebagai penyebab subjektifitas peneliti,. Subjektifitas peneliti memang diakui namun tanpa penafsiran sejarawan tidak dapat berkata apa-apa. Oleh karena itu, sejarawan perlu mencantumkan keterangan dari data yang diperoleh (Kuntowijoyo, 2013: 78).

Interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan fakta-fakta sejarah sehingga menjadi suatu bentuk hubungan yang logis, rasional, faktual dan kausalitas, sehingga diharapkan dapat membentuk kisah sejarah yang mendekati kebenaran. Hal ini dilakukan karena fakta sejarah yang diperoleh melalui proses kritik tersebut terpisah berdiri sendiri, belum tersusun secara sistematis sehingga belum bisa disebut ceritera

sejarah. Kegiatan peneliti pada tahap ini yaitu melakukan penafsiran terhadap Konflik PKI dan PII di Kanigoro dengan menghubungkan fakta-fakta yang didapat dari hasil studi kepustakaan kemudian merangkai secara kronologis dengan aspek sebagai berikut : (1) Latar belakang terjadinya konflik PKI dan PII underbow Masyumi tahun 1965; (2) Proses terjadinya Konflik PKI dan PII di Kanigoro tahun 1965; (3) Penyelesaian konflik PKI dan PII di Kanigoro tahun 1965. Oleh karena itu, berbagai fakta yang berdiri sendiri harus di interpretasikan sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis yang sedekat mungkin dengan kebenaran. Sumber yang digunakan untuk menulis ini adalah Anis Abiyoso dan Herfanda berjudul Teror Subuh di Kanigoro menceritakan bagaimana jalannya Peristiwa Kanigoro yang dijelaskan langsung oleh Anis Abiyoso yang kala itu menjabat sebagai Sekjen PII di Jawa Timur dan mengikuti mental training di sana. Sumber yang digunakan untuk menulis bab pembahasan yaitu bab 4,5 dan 6 adalah semuanya pengakuan Anis Abiyoso di dalam buku yang ditulisnya tersebut. Dalam mencari kesaksian asli orang dari sisi PKI hanya berupa koran-koran trompet masyarakat yang kurang kredibel alur peristiwa tersebut.

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah Historiografi. Historiografi adalah kegiatan akhir dari langkah penelitian sejarah yang merupakan kegiatan merekonstruksi secara imajinatif fakta-fakta sejarah yang disebutkan secara terpisah (Gottschalk, 2008: 167). Rekonstruksi sejarah menghasilkan suatu gambaran peristiwa sejarah namun tidak mungkin gambaran tersebut diperoleh secara utuh. Oleh karena itu, setiap konstruk senantiasa dituntut menghasilkan sesuatu yang utuh dan bulat, baik naratif dan deskriptif, maka dalam penyusunan fakta-fakta menjadi konstruksi yang utuh diperlukan tambahan unsur lain yakni imajinasi sejarawan (Kartodirjo, 1993: 90-91). Sejarah memerlukan imajinasi, dalam prosesnya sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sedang terjadi dan apa yang terjadi setelah suatu peristiwa berlangsung (Kuntowijoyo, 2013: 52).

Pada proses penulisan sejarah daya imajinasi dan kreatifitas harus terikat pada fakta-fakta sejarah dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam penulisan karya ilmiah. Sejarawan juga terikat pada keharusan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, tanpa diberi dilakukan penulis adalah dengan menyusun dan menulis cerita sejarah mengenai *Peristiwa Kanigoro : Konflik PKI dan PII underbow Masyumi di Kediri Tahun 1965* dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah heuristik, kritik dan

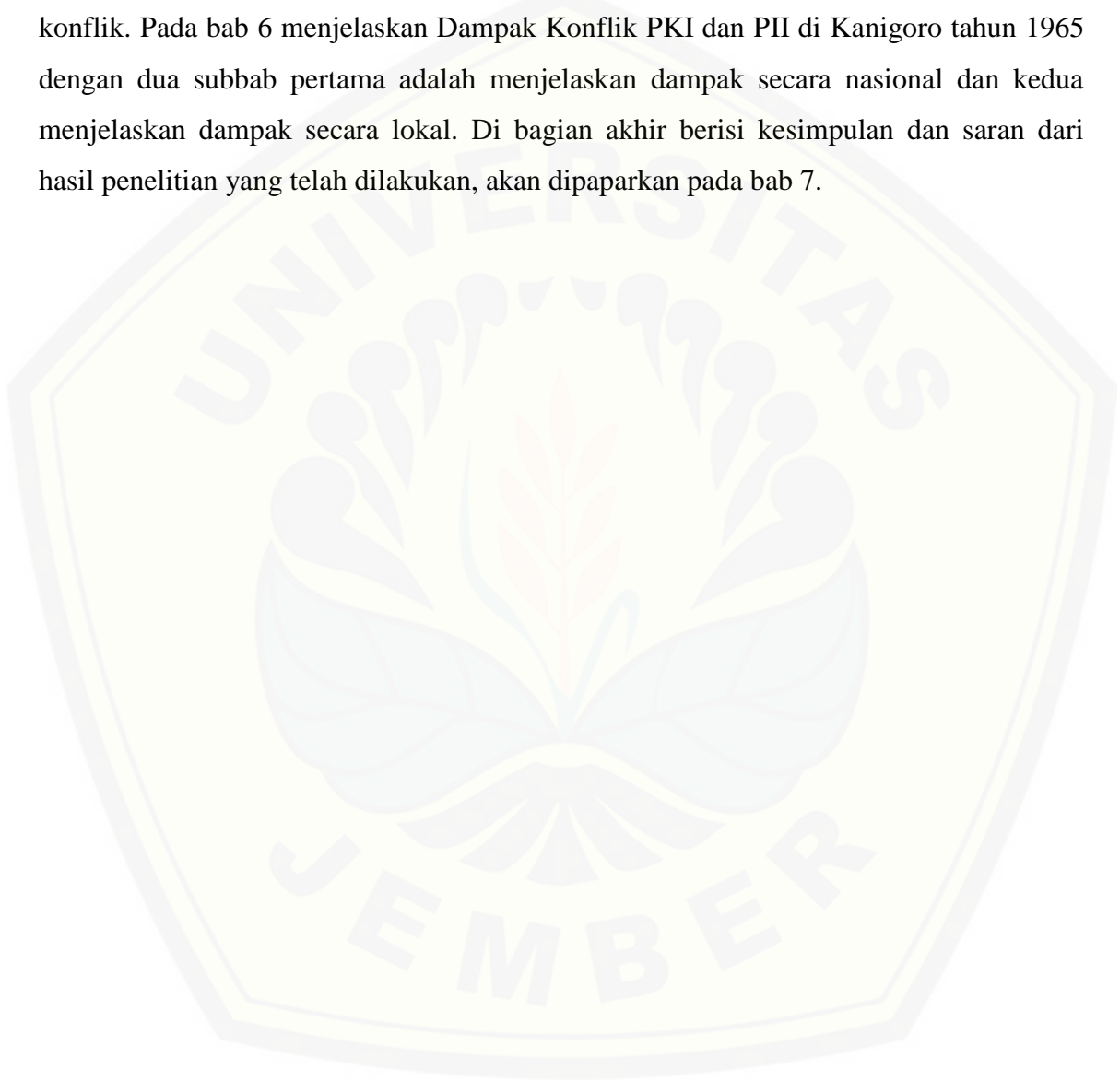
interpretasi sehingga menjadi cerita sejarah yang kronologis, logis, rasional, faktual dan kausalitas (Gottschalk, 1975: 32). Hasil dari proses historiografi berupa penyajian penelitian dalam bentuk karya ilmiah skripsi, dengan sistematika yang terdiri 7 Bab. Bagian pengantar terdapat dalam bab 1 sampai bab 3, bagian hasil penelitian terdapat bab 4 sampai bab 6, bagian kesimpulan terdapat dalam bab 7.

Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan dilakukannya penelitian ini, yang memaparkan Peristiwa Kanigoro: Konflik PKI dan PII underbow Masyumi di Kediri tahun 1965. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menemukan berbagai permasalahan yang ingin dikaji. Fakta-fakta yang diperoleh dari pengumpulan sumber penulis gunakan untuk menjawab permasalahan, sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Bab 2 membahas mengenai tinjauan pustaka dan merupakan hasil dari book review. Berdasarkan pada permasalahan yang akan dibahas penulis menggunakan pendekatan Politikologis selain itu digunakan pula teori konflik. Pendekatan politikologis Menurut Sartono Kartodirjo digunakan menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan, dan lain sebagainya. Dengan sendirinya jelaslah bahwa berbagai pendekatan itu hanya dapat dilakukan dengan bantuan pengetahuan konsep, dan teori ilmu-ilmu sosial, yaitu sosiologi, antropologi, dan ilmu politik dan relevan dengan Peristiwa Kanigoro yang hakikatnya juga merupakan perebutan kekuasaan di region Kediri terutama Kanigoro. Sedangkan teori konflik milik Lewis A Coser digunakan untuk mengetahui konflik antar kelompok PKI dan PII yang notabene adalah underbow masyumi. Dengan demikian teori ini penulis gunakan untuk menganalisis konflik PKI dan PII di desa Kanigoro yang terjadi pada Januari 1965.

Bab berikutnya adalah metode penelitian. Pada bab 3 ini dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode sejarah. Langkah-langkah dalam metode sejarah meliputi, heuristik, kritik (verifikasi), interpretasi dan historiografi atau penulisan sejarah. Pada bab selanjutnya dibahas mengenai hasil penelitian yang dijelaskan dalam bab 4 memaparkan mengenai latar belakang terjadinya Konflik PKI dan PII underbow Masyumi di Kanigoro Kediri tahun 1965 dan dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama membahas faktor politik yang menyebabkan kedua belah pihak ini berkonflik

di Kanigoro dan subbab kedua membahas ketegangan antara Masyumi yang merupakan partai underbow PII yang melakukan mental training di basis PKI, kanigoro dan PKI. Kedua Partai Politik ini memang bersitegang sejak pemilu tahun 1955, bab 5 memaparkan tentang meletusnya Konflik PKI dan PII di Kanigoro tahun 1965 dengan terdapat tiga subbab, pertama membahas Pelatihan mental training PII di basis PKI, kedua jalannya konflik/peristiwa Kanigoro dan subbab ketiga membahas penyelesaian konflik. Pada bab 6 menjelaskan Dampak Konflik PKI dan PII di Kanigoro tahun 1965 dengan dua subbab pertama adalah menjelaskan dampak secara nasional dan kedua menjelaskan dampak secara lokal. Di bagian akhir berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan, akan dipaparkan pada bab 7.



BAB 4. LATAR BELAKANG TERJADINYA KONFLIK PKI DAN PII DI KANIGORO TAHUN 1965

Konflik PKI dan PII di Kanigoro terjadi saat masa krisis politik pada tahun 1965. Ketegangan antara partai Politik PKI dan Masyumi sesaat setelah selesai Pemilu tahun 1955 menyulut sikap ofensif revolusioner yang digagas oleh DN Aidit dengan menyebarkan aksi-aksi sepihak di berbagai daerah khususnya Jawa termasuk di Kediri khususnya basis PKI di Kanigoro. Berikut ada beberapa faktor-faktor yang akan dikaji peneliti mengenai latar belakang terjadinya konflik PKI dan PII di Kanigoro Tahun 1965 dari aspek penyebab peneliti mengklasifikasikan berdasarkan sebab khusus dan sebab umum. Sebab Umum yang dikaji peneliti adalah Faktor Politik dan Militer, Ketegangan Masyumi dan PKI tahun 1965 peneliti mengkaji Faktor Agama dan Faktor Sosial Ekonomi sedangkan untuk sebab Khusus adalah Mental Training PII di Kanigoro Tahun 1965.

4.1 Sebab Umum/Tidak Langsung

4.1.1 Faktor Politik dan Militer

Dinamika politik terdapat hal yang menyangkut aspek spiritualitas basis santri cukup beragam walaupun sebagian besar adalah Nahdliyin. Begitupula dengan kekuatan Islam yang lain yaitu abangan juga cukup mendapat pengaruh yang besar pula. Dengan memperhatikan aspek ini maka tak pelak lagi faktor spiritualitas sangat berpengaruh dalam kehidupan politik. Wajah politik pada kekuatan agama dan non agama yang konservatif dan non agama yang menjadi basis pertarungan politik, maka situasi politik yang berkembang sangat keras dan berimbang. Buktinya ketika menyimak pertarungan dan peroleh dalam pemilu 1955, dimana NU mendapat peroleh suara peringkat pertama dan diikuti PKI di Kotamadya Kediri sedangkan di Kabupaten Kediri PKI peringkat pertama diikuti NU (Tim PBNU, 2013: 78).

Terdapat hal yang menarik selain faktor diatas adalah kehidupan politik di Kediri adalah peranan dan bargaining position yang dimiliki dalam kancah percaturan politik regional bahkan nasional. Banyak peristiwa politik yang berkembang di Kediri selalu tak dapat dipisahkan dengan perkembangan politik nasional. Bahkan dalam beberapa momentum politik. Kediri menjadi barometer perkembangan politik nasional, sehingga apa yang berkembang di Kediri selalu disimak dan diamati karena

biasanya akan membawa dampak politik yang luas di tingkat nasional. Hal lainnya juga dapat dijadikan indikator dari tingkat peranan dan bargaining position yang dimiliki Kediri adalah banyaknya tokoh politik yang mengkonsentrasikan diri di Kediri, tidak kurang tokoh-tokoh politik jaman revolusi seperti Semaun, Tan Malaka, Jenderal Soedirman dan Musa pernah berkonsentrasi di Kediri. Pada perkembangan sejarah jaman pergerakan Kediri lebih banyak menjadi lahan perkembangan organisasi-organisasi pergerakan (Susanto & Emingahayu, 2007: 18).

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 secara faktual diikuti pembunuhan massal di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kediri pun terjadi pergolakan-pergolakan yang berujung pada tindak kekerasan dan pembantaian diantaranya adalah terjadinya Peristiwa Kanigoro, Peristiwa Jengkol, Peristiwa Grogol, Peristiwa Ngrangkah Spawon maupun Peristiwa Perkebunan Secang di Mojo. Yang tidak sedikit meninggalkan berbagai penderitaan yang sangat mendalam bagi rakyat setempat dan menimbulkan berbagai dampak seperti adanya traumatis yang begitu hebat bagi si korban juga munculnya stigma-stigma negatif yang hal tersebut juga berakibat pada hilangnya akses politik, ekonomi, sosial, bahkan pendidikan maupun pekerjaan (Sulistyo, 2000: 20).

Memorandum yang terbit pada November 1965 menyebutkan bahwa Jenderal AH Nasution telah memerintah beberapa elit-elit dari PII untuk menyebarkan atau mengencarkan pelatihan mental politik di basis-basis PKI, seperti dikatakan Emingahayu (2007: 77) bahwa Kanigoro merupakan salah satu basis dari PKI di Jawa Timur dan banyak sekali anggota BTI dan PR yang hidup dan bersembunyi di Kanigoro. Hal ini senada bahwa sebenarnya adanya ketegangan politik bukan hanya pada Masyumi tetapi petinggi TNI AD yang juga tidak sepaham dengan PKI dan ingin membuat mereka tersurut untuk menguasai politik era orde lama. Teks memorandum dapat dilihat di *Lampiran 3*.

PKI beserta beberapa organisasi underbownya juga mengencarkan penyebaran basis di beberapa daerah terpencil seluruh Indonesia untuk membuat kekuatan politik PKI semakin kuat karena banyak anggota yang dapat menyebarkan paham politik PKI di tempat yang didatangi. Khususnya di Kanigoro sampai daerah Blitar Selatan, di daerah yang berdekatan ini PKI mampu membangkitkan semangat pemuda-pemuda yang tergabung dengan PKI menyebarkan dan merekrut beberapa

dari orang di tempat-tempat terpencil ini untuk memperkuat basis PKI di setiap tempat yang mereka klaim sebagai pusat markas PKI. Namun anehnya, diketahui juga sebenarnya Kanigoro di Kras Kediri ini juga ditempati seorang Kyai Besar bernama Jauhari yang gencar mengadakan kegiatan Islami dan pengajian. Abiyoso saksi mata kejadian ini mengatakan PKI mungkin merasa terusik karena kegiatan pada Januari 1965 ini merupakan training politik yang diadakan oleh musuh PKI Masyumi di tempat basis PKI yang sejatinya mengancam keberadaannya disana (Sulistyo, 2000: 50).

Selain itu Harian Rakjat yang memuat berita Kanigoro edisi 11 Februari 1965 mengatakan bahwa ada campur tangan pihak ABRI yang dituding AH Nasution memerintahkan kepada elit PII untuk mengadakan mental training / kegiatan politik di basis-basis PKI agar keberadaannya dapat terendus oleh ABRI. Tudingan PKI ini masih abu-abu karena sejatinya AH Nasution dalam bukunya tidak menyebutkan bahwa dirinya melakukan hal tersebut, namun yang menjadi bukti bahwa PKI mencari AH Nasution untuk dibunuh saat Peristiwa G 30 S /PKI meskipun AH Nasution berhasil melarikan diri. Jenderal-jenderal TNI AD menjadi korban kebingungan PKI dalam mempertahankan politiknya pada 30 September 1965 dan menjadi suatu kesadaran bagi rakyat Indonesia apalagi yang mengalami tindakan ofensif revolusioner di berbagai daerah termasuk Kanigoro bahwa kejadian terbesar ini diklaim sebagai puncak dimana PKI benar-benar ingin menguasai politik Indonesia pada masa itu (Harian Rakjat, 1965: 2).

Faktor lain yang menjadi penyebab PKI terdesak keberadaannya di Politik Indonesia tahun 1965 karena kealahannya terhadap Masyumi pada pemilu tahun 1955. Pada Konflik PKI dan PII underbow Masyumi yang terjadi di Kanigoro ini menjadi bukti memang benar pernyataan TNI dalam buku Pusjarah PKI menjadi kegiatan ofensif revolusioner dengan menyebarkan basis-basis di seluruh Indonesia untuk memperkuat kekuatan politiknya. PII yang menjadi organisasi dibawah Masyumi juga mendapat perintah langsung dari ABRI untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik di basis-basis PKI sehingga mereka dapat menekan jumlah keberadaan PKI yang menurut ABRI saat itu tidak sejalan dengan ideologi pancasila. Konflik PKI dan PII di Kanigoro ini juga terdorong oleh faktor tersebut hingga memunculkan kegaduhan sampai memicu protes berkepanjangan di berbagai daerah di Indonesia

karena pada akhirnya dari dua belah pihak menjadi tahanan politik yaitu pimpinan PKI basis Kanigoro Suryadi dan pimpinan PII Jawa Timur Abiyoso dipenjara karena telah menyebabkan kekacauan di Kediri serta menambah kekacauan politik antara PKI dan Masyumi ketika memasuki tahun 1965. Hasil pemilu tahun 1955 bisa dilihat di *Lampiran 2*.

Menurut PKI, ofensif revolusioner adalah seluruh aksi untuk menciptakan “situasi revolusioner” dengan menggalang kekuatan progresif revolusioner untuk menghancurkan Oldefo (Old Established Forces) dan Nekolim (Neo kolonialisme-imperialisme). Aksi-aksi itu dilakukan di seluruh bidang kehidupan baik dengan cara aksi massa yang terbuka (seperti demonstrasi, aksi tuntutan, mogok), maupun aksi yang tertutup (bloc within, infiltrasi menyulut kontradiksi langsung ke tubuh partai politik, organisasi massa, dan ABRI) atau sabotase sampai tercapainya situasi revolusioner (Mortimer, 2011: 20). Ciri-ciri utama dari situasi revolusioner menurut PKI ialah :

1. Massa rakyat aktif melakukan aksi-aksi menuntut perubahan yang dapat memperbaiki kehidupan mereka.
2. Kelompok “anti rakyat” (baca anti komunis) dalam kekuasaan politik semakin terdesak, segi “pro rakyat” (baca komunis) makin unggul dan politik pemerintah makin banyak disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan rakyat.
3. Aksi massa makin meluas sehingga peranan rakyat makin besar dan makin menentukan dalam kehidupan masyarakat dan politik negara (Mortimer, 2011: 21-22).

Ofensif revolusioner secara resmi dikomandokan oleh Ketua Politbiro CC PKI D.N. Aidit kepada seluruh jajaran PKI pada 1 Januari 1965. Dalam pesan tahun baru 1965, Ketua Politbiro CC PKI D.N. Aidit menyatakan bahwa perkembangan politik di dalam negeri ditandai oleh pidato kenegaraan Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1964, yang berjudul Tahun Vivere Pericoloso (Tavip). Pidato ini dianggap sebagai komando politik konfrontasi di segala bidang (Aidit, 1964: 11-12).

Selanjutnya D.N. Aidit menyatakan “Seluruh rakyat dikomando untuk melakukan massa aksi (dengan kegotong-royongan nasional yang berporoskan Nasakom) menentang nekolim, menentang kaum komprador, kapitalis birokrat dan

tuan tanah feodal mendobrak kemacetan dalam pelaksanaan UUPA/UUPBH, mengganggung kaum subversi, kontra revolusi, dan Manipolis munafik” (Aidit, 1964: 12).

Semangat kegotong-royongan nasional berdasarkan seruan Bung Karno dimanfaatkan oleh PKI untuk membangkitkan aksi-aksi buruh tani di seluruh Indonesia, terutama di Jawa, Bali, dan beberapa provinsi di Sumatra. Aksi-aksi buruh dan demonstrasi yang dilakukan berlindung pada pidato kenegaraan itu. Demikianlah manipulasi PKI atas pidato Tavip tersebut (Aidit, 1964: 13).

Di dalam pidato tahun baru itu D.N. Aidit juga menuduh bahwa “ketegangan di dalam negeri pada akhir tahun 1964 ditimbulkan oleh ulah kombinasi imperialis, kapitalis birokrat dan Trotskis, untuk menarik kekuatan tengah ke pihaknya”. Menurut Aidit, mereka (musuh PKI) melontarkan fitnah bahwa kaum komunis akan “merebut kekuasaan” berdasarkan apa yang disebut “dokumen rahasia PKI”. Menurut PKI dokumen itu hanya buatan kaum imperialis, kapitalis birokrat dan Trotskis. Memburuknya ekonomi Indonesia adalah ulah dan tanggung jawab kaum kapitalis birokrat yang mencuri kekayaan negara dan mencengkeramkan kukunya sangat dalam pada tubuh perekonomian Indonesia. Selanjutnya Dewan Nasional SOBSI (D.N. SOBSI) menambahkan bahwa situasi ekonomi Indonesia semakin gawat, ongkos hidup sangat mahal dan upah merosot. Teror kenaikan harga dan tarif dipelopori oleh Menteri Perdagangan Adam Malik, yang menetapkan harga beras naik 35 %. Menteri Perdagangan yang berasal dari Partai Murba dituduh secara sengaja mengacaukan harga dengan mengkomandokan dan memimpin kenaikan harga-harga beras di pasar bebas (Aidit, 1964: 17).

Dalam keadaan ekonomi dan keuangan yang sulit ini, pimpinan PKI melakukan ofensif revolusioner dan mengeluarkan pernyataan tuntutan :

1. Ritual semua kapitalis birokrat dari semua aparaturnegara baik di pusat maupun di daerah, serta pejabat-pejabat bekas partai terlarang harus disingkirkan.
2. Laksanakan segera UUPA/UUPBH dengan konsekuen. Selesaikan sengketa tanah dengan kaum tani dengan musyawarah tanpa merugikan kaum tani.
3. Hukum berat koruptor-koruptor bahkan kalau perlu hukum mati.

4. Batalkan kenaikan-kenaikan harga dan tarif.
5. Batalkan penswastaan perusahaan-perusahaan dan proyek-proyek negara (Aidit, 1964: 22)

Semua pernyataan pimpinan PKI dan organisasi massanya itu adalah dalam rangka menggerakkan organisasi massanya untuk memperhebat ofensif revolusioner di segala bidang. Ketua Politbiro CC PKI D.N. Aidit dalam laporan politiknya kepada Sidang Pleno V CC PKI di Jakarta tanggal 13 Mei 1965 mempertegas hal itu dalam judul “Perhebat Ofensif Revolusioner di segala bidang”. Seruan itu kemudian dipertegas lagi oleh pernyataan Politbiro CC PKI dalam rangka merayakan HUT ke-20 RI: “Revolusi Agustus 1945 di tahun 1965, lancarkan terus ofensif revolusioner sampai kepada puncaknya”.

Organisasi-organisasi massa PKI kemudian bergerak melakukan aksi-aksi tuntutan dengan mengadakan rapat-rapat umum, resolusi, demonstrasi serta aksi-aksi lainnya yang dilakukan di tempat-tempat terbuka. Sasaran ofensif revolusioner adalah partai-partai politik, organisasi massa, organisasi fungsional, organisasi agama, organisasi budaya, Angkatan Bersenjata, dan perorangan atau siapa saja yang dinilai menghalang-halangi tujuan politiknya. Ofensif yang terbuka diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi massa, seperti propaganda, demonstrasi, aksi sepihak, aksi pengutukan, aksi pengecaman nama baik, aksi tunjuk hidup, aksi mogok, aksi-aksi teror seperti sabotase, pembakaran, pengeroyokan. Sasaran ofensif revolusioner selain partai politik penentang PKI, juga adalah ABRI. Menurut Bung Hatta hanya ABRI-lah (khususnya TNI-AD) yang masih mampu menghadapi PKI dalam upayanya meraih kekuasaan. Oleh karena itu pimpinan TNI-AD harus disingkirkan dengan suatu cara yang termasuk dalam rangkaian ofensif revolusioner (Harian Rakjat, 1965: 3).

Dalam memorandum yang tercantum pada lampiran bahwa AH Nasution memberikan perintah tersembunyi untuk menggencarkan kegiatan politik di basis PKI agar kekuatan politik PKI melemah karena basisnya yang diambil alih, namun dalam memorandum tersebut hanya dicantumkan elit PII yang mendapat perintah langsung dari AH Nasution, tetapi tidak dijelaskan lewat mana perintah itu apakah secara langsung atau ada surat perintah. Namun yang menjadi penguat bahwa PII dapat

melakukan kegiatan di Kanigoro adalah surat ijin dari pemerintah kabupaten. Teks Memorandum dapat dilihat di *Lampiran 3*.

Menurut Harold Crouch (1986), tentara Indonesia tidak pernah membatasi dirinya hanya sebagai kekuatan militer. Pada masa revolusi 1945-1949, tentara terlibat dalam perjuangan kemerdekaan di mana tindakan politik (diplomasi) dan militer merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pengumuman keadaan darurat perang tahun 1957, di samping membuka peluang tentara masuk dalam pemerintahan juga meningkatkan peran militer dalam bidang ekonomi. Namun peristiwa 1965 merupakan tonggak sejarah paling penting, karena saat itu militer berhasil menghancurkan Partai Komunis Indonesia, musuh besar (Adam, 2004: 119).

Kemudian dilakukan konsolidasi di kalangan tentara: pengikut dan simpatisan Sukarno serta perwira yang mempunyai potensi menjadi penentang Soeharto disingkirkan. Setelah terwujud dominasi Angkatan Darat dalam politik, mereka dengan leluasa merambah ke dunia bisnis. Menurut Harold Crouch (1986), pembunuhan Jenderal ini Hari 1 Oktober 1965 sebenarnya bukanlah kudeta terhadap pemerintah, tetapi pada umumnya di Indonesia kejadian itu dilukiskan sebagai “percobaan kudeta yang gagal,” sehingga ia meneruskan memakai istilah tersebut. Sebagaimana diketahui paling sedikit ada 4 versi dalang peristiwa tersebut; a) PKI, b) klik Angkatan Darat; c) Soeharto; d) Soekarno (Adam, 2004: 119).

4.1.2 Ketegangan antara Masyumi dan PKI tahun 1965

Ketegangan antara Masyumi dan PKI tahun 1965 disebabkan oleh banyak faktor, terutama banyak disorot dari faktor politik serta militer. Menurut Pandangan salah satu partai Islam yaitu NU mengatakan bahwa berkoordinasi dengan TNI dalam meredam permasalahan selama rentang waktu tersebut diputarbalikkan oleh para pengamat dan juga oleh PKI sendiri bahwa NU diperalat oleh TNI. Hal itu tentu tidak sesuai dengan kenyataan, sebab permusuhan NU dengan PKI itu didasari atas perbedaan akidah dan ideologi perjuangannya. Dan perbedaan serta konflik sosial antara NU dengan PKI itu telah terjadi sejak tahun 1947 dan terus berkelanjutan hingga tahun 1948 lalu berlanjut lagi pada tahun 1950-an dan berpuncak pada pertengahan tahun 1960-an,, dimana kedua kelompok itu bertikai dan bertempur untuk memperebutkan tanah, yang diklaim PKI dan membalas PKI yang menghina agama dan Tuhan. Artinya tanpa disuruh TNI pun NU telah berhadapan dan benturan dengan PKI, karena PKI

merupakan musuh yang sudah berkonflik selama beberapa dasa warsa. Sementara kerjasama NU TNI dalam menghancurkan PKI baru terjadi di penghujung tahun 1965 itupun dengan TNI yang segaris. Sebelumnya NU sendirian menghadapi berbagai serangan yang dilakukan PKI sejak awal tahun 1950-an hingga pertengahan tahun 1965 (Tim PBNU, 2014: 21).

Dengan Persepsi itu, Soekarno didukung oleh tentara mengumumkan sistem pemerintahan baru yang disebut Demokrasi Terpimpin 1959. Berpusat pada Soekarno, sistem ini berlandaskan pada dua pilar kekuasaan politik, AD dan PKI. Dalam sistem ini, Soekarno harus selalu menjaga keseimbangan kekuasaan kedua pilar tersebut. Sebagai kelompok profesional, militer tidak memiliki kontrol secara langsung terhadap PKI. Sebaliknya PKI memiliki strategi yang dikenal dengan Kerja di Kalangan Musuh (KKM) menyusup ke hampir semua sektor politik yang strategis termasuk ABRI (Sulistyo, 2000: 15).

Ketegangan PKI dan PII underbow Masyumi terus berlanjut terutama setelah pembubaran Masyumi di tahun 1960. PKI menggelari anak-anak PII sebagai Masyumi. Puncak ketegangan itu berubah menjadi teror yang dilancarkan orang PKI di Kanigoro, Kediri. Konflik ini dikenal dengan Konflik Kanigoro pada Januari 1965. Saat itu ratusan kader PII yang sedang melaksanakan kegiatan Mental Training diserbu oleh ratusan anggota PKI (Susanto & Emingahayu, 2007: 25).

Sementara dalam Aidit (1957: 5) menyebutkan bahwa mengapa Pemuda Rakjat sangat sensitif terhadap konflik antar partai ia mengatakan bahwa konfrontasi dari Peristiwa Madiun 1948 ditengarai oleh kekalahan dalam ajang pemilihan umum berhasil mendalangi sebuah partai besar dan oknum-oknum liar, yang tidak melihat kemungkinan dengan djalan menggunakan saluran partai-partai lain, dengan djalan mempertadjam pertentangan antara partai-partai agama dengan PKI dan PNI, dengan buatan menimbulkan kemarahan rakjat di daerah-daerah supaya memberontak terhadap pemerintah pusat. Dari buku yang di tulis oleh DN Aidit ini ia menuduh Pemerintah Pusat dibalik dalang peristiwa Madiun 1948, Peristiwa Madiun merupakan tonggak awal dimana Peristiwa Kanigoro terjadi yang dijelaskan oleh Abiyoso ketua sekjen PII yang terlibat dalam Peristiwa Kanigoro. Dia mendengar dengan jelas teriakan pemuda Rakjat dan BTI di basis Kanigoro meneriakkan balas Peristiwa Madiun.

Dalam rangka retooling di bidang kepartaian, Presiden Soekarno telah menetapkan keputusan terhadap Masyumi dan PSI. Pada tanggal 17 Agustus 1960, Masyumi dan PSI yang dituduh terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta, dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai politik terlarang. Dengan dibubarkannya kedua partai itu, PKI telah berhasil mengalahkan lawan politik terberatnya selama ini melalui tangan Soekarno. Sejak itu telah terjadi perubahan perimbangan kekuatan politik di Indonesia, yang bergeser menguntungkan PKI, dan mendekatkan partai itu pada kekuasaan. Dalam bidang kepartaian, retooling berlangsung dengan radikal. Dari sejumlah 45 partai politik (termasuk Masyumi dan PSI yang dibubarkan), diritul menjadi 10 partai, yang diakui eksistensinya berdasarkan Penpres No.7 /1959 dan Penprep No. 13/1960. Kesepuluh partai politik yang diakui eksistensinya itu adalah : 1. Partai Nasional Indonesia(PNI), 2. Nahdlatul Ulama (NU), 3. Partai Komunis Indonesia (PKI), 4. Partai Katholik, 5. Partai Indonesia (Partindo), 6. Partai Murba, 7. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), 8. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP- KI), 9. Partai Kristen Indonesia (Parkindo), 10. Partai Tarbiyah Islamiyah (Perti) (Purwanta, 2016: 2 (4)).

Meskipun retooling dalam kepartaian berlangsung dengan radikal dan lancar, tetapi PKI menyatakan kecewa karena rituling dalam berbagai lembaga pemerintah, termasuk alat-alat negara (AD, AL, AU, dan Repolisian Negara), belum berjalan seperti rituling di bidang kepartaian. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin PKI dengan berani dan bersemangat melontarkan kritik-kritiknya. PKI menginginkan rituling dalam lembaga-lembaga pemerintahan itu dilakukan secara radikal,

Dengan mengadakan pergeseran besar- besaran, pemecatan -pemecatan, perombakan-perombakan serta menyingkirkan PKI yang disebutkan tidak becus dan tidak Manipolis. PKI menuntut dilaksanakan Nasakomisasi dan demokratisasi dalam lembaga-lembaga yang diritul. Dengan menasakomisasi lembaga-lembaga yang diritul itu, berarti mengikutsertakan komunisme dalam pelaksanaan Pancasila. Padahal komunisme didasarkan atas dialektis materialisme, yang bertentangan dengan Ketuhanan atau dengan kata lain anti agama. Selain itu, komunisme juga mengandung konsepsi perjuangan kelas, yang sama sekali tidak dikenal oleh Pancasila.

Sesudah Masyumi dan PSI dibubarkan, terjadi perkembangan yang menguntungkan PKI. Dalam rangka *Nasakomisasi Front Nasional*, pada bulan Agustus

1960, Presiden Soekarno mengangkat D.N. Aidit, sebagai Wakil Ketua Pengurus Besar Front Nasional. Front Nasional pada mulanya dimaksudkan sebagai alat demokrasi dan wadah pusat perjuangan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan revolusi, ternyata tidak memenuhi harapan. Dalam kenyataannya kemudian, perkembangan Front Nasional jauh menyimpang dari maksud semula ketika didirikan. Front Nasional yang diketuai oleh Presiden Soekarno itu; dalam perkembangannya dikuasai oleh orang-orang PKI yang menjadi anggota organisasi itu. Dengan dalih menjaga persatuan nasional berporoskan Nasakom, PKI memperkuat posisi politisnya dengan mempengaruhi dan menarik kaum tengah menjadi kekuatan progresif revolusioner. Selanjutnya mereka digunakan untuk mendukung atau memperkuat dan memenangkan aksi tuntutan dan program-program PKI (Harian Rakjat, 1965: 2).

Dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1960 yang berjudul Jalannya Revolusi Kita (Jarek), Presiden Soekarno telah mempertegas lagi pelaksanaan Manipol. Atas permintaan Presiden Soekarno, DPA kemudian ditugasi untuk merinci pidato Jarek sebagai pedoman pelaksanaan Manipol. Pada bulan Januari 1961, DPA telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan memerinci pelaksanaan Manipol sebagai berikut :

1. Gotong royong, yang diartikan sebagai mempraktekkan *samenbundeling van alle revolutionaire krachten* (kerjasama semua kekuatan revolusioner). Di Indonesia ada tiga *revolutionaire krachten*, yaitu Islam, Nasionalis dan Komunis atau disingkat Nasakom, yang masing-masing tidak boleh saling *kena phobi*.
2. Front Nasional bertujuan untuk menggalang persatuan rakyat revolusioner.
3. Tanah untuk tani, artinya diadakan *landreform*, mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur (Mortimer, 2011: 50).

Dalam menyusun pedoman pelaksanaan Manipol berdasarkan peraturan itu, tokoh-tokoh PKI yang diikutsertakan dalam tugas itu, dengan leluasa memasukkan program-program partainya. Begitu juga dalam penyusunan garis besar politik luar negeri yang didasarkan atas pidato Presiden Soekarno tanggal 30 September 1960 di depan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berjudul *Membangun Dunia Kembali*, PKI juga memasukkan program –programnya (Mortimer, 2011: 51).

Aspek kedua sudut pandang bahwa ketegangan antara PKI serta Masyumi tahun 1965 dapat diolah dan dianalisis berdasarkan pandangan Bung Hatta yang melakukan beberapa pidato perjuangan mengenai pasal-pasal UUD 1945 dimana menyinggung Hak Asasi Manusia dan Defending Amandemen (Desentralisasi Kekuasaan) untuk menghindari keberpihakan peneliti antara PKI maupun Masyumi.

Undang-Undang Dasar 1945 memuat masalah Hak Asasi Manusia, meskipun UUD 1965 disusun sebelum digagasnya Declaration of Human Right, ternyata banyak yang mencantumkan Hak Asasi Manusia dalam beberapa pasal. Bung Hatta sebagai salah satu sosok yang gigih memperjuangkan HAM dalam penyusunan UUD 1945. Masalah HAM menjadi perdebatan dalam sidang pembahasan Undang-Undang Dasar. Soepomo menggagas tawaran bentuk negara integralistik menganggap HAM tersebut dianggap berlebihan, dibayangkan akan memiliki dampak yang negatif dan sebagai hak-hak perorangan selalu di bawah kepentingan bersama. Pendapat Soepomo didukung oleh Soekarno yang menganggap bahwa individualistik inilah yang akan menimbulkan konflik di negara apabila dimasukkan dalam UUD 1945 (Hatta, 2015: 50) .

Hatta yang sudah lama ikut dalam pergerakan kemerdekaan mengasah pikirannya dengan menulis di berbagai media massa, menganggap bahwa penting untuk memasukkan hak-hak individu tersebut. Usulan Bung Hatta mendapat dukungan dari Mohammad Yamin, akhirnya karena usaha keras Bung Hatta itulah UUD memiliki pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Tanpa pasal ini yang didasarkan pada paham integralistik hanya akan menjadikan negara Indonesia sebagai negara kekuasaan yang memberikan kepada para pemimpin. Kekuasaan dengan asumsi pemimpin adalah negarawan tanpa pamrih pribadi, suatu slogan yang lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan (Hatta, 2015: 51-52).

Pada tulisan Hatta “Tuntut Kemerdekaan Pers” (1931) Bung Hatta menulis, “kemerdekaan tiap-tiap orang berbicara menulis mencetak dan membentangkan pikirannya, sedang ditulisnya itu tidak guna diperiksa dulu oleh yang berkuasa.” Hal ini berhubungan dengan usulnya dalam sidang BPUPKI dimana Bung Hatta mengusulkan untuk memasukkan masalah tersebut yang kemudian dikenal dengan pasal 28 UUD 1945. Perhatian Bung Hatta tercurah pada masalah kemakmuran rakyat, saat itu masalah ini tidak terdefinisi secara eksplisit bahwa yang diperjuangkan oleh Bung Hatta masalah

yang sedang banyak dibicarakan semua orang, tetapi setelah dipelajari secara mendalam dalam pasal-pasal yang ditulis Bung Hatta adalah isinya melindungi hak-hak asasi manusia terutama demi kepentingan seluruh rakyat pada umumnya (Hatta, 2015: 55).

Sejak tahun 1961, program-program PKI sudah menjadi bagian dari program pemerintah. PKI makin lama makin kuat dan termasuk pengaruhnya terhadap Presiden Soekarno. Namun PKI menyadari, selama belum ada perubahan dalam sistem politik yang menurutnya “mencerminkan kegotong-royongan nasional” sesuai dengan Konsepsi Presiden tahun 1957, selama itu pula PKI tidak akan diikutsertakan dalam kekuasaan pemerintahan. Sejak Pemilu tahun 1955 (PKI keluar sebagai salah satu partai “empat besar”), berjuang keras untuk dapat mengambil bagian dalam pemerintahan. Sejak Konsepsi Presiden tahun 1957 sering disebut oleh Presiden untuk diikutsertakan dalam kabinet, ternyata sampai Kabinet Kerja II (18 Februari 1960 – 6 Maret 1962) PKI belum mendapat kursi dalam kabinet. Kegagalan itu terutama berkat perjuangan pimpinan TNI – AD, sehingga PKI berhasil dicegah masuk kabinet (Mushed & Tadjoeddin, 2015: 8).

Dari pernyataan itu PKI secara tegas meninggalkan cara-cara parlementer, dan beralih dengan cara ofensif Manipolis. Perjuangan antara pro dan anti Manipol ini dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, militer, ilmu, dan kebudayaan. Menurut PKI, yang termasuk pro Manipol ialah rakyat yang digolongkan kaum buruh, tani, borjuasi kecil kota, intelegensia, dan borjuasi nasional. Sedangkan yang anti Manipol ialah kaum imperialis, tuah tanah, komprador, dan kapitalis birokrat Perjuangan ini akan berhasil dengan kemenangan yang dicapai satu demi satu di pihak pro Manipol. Kemenangan kaum Manipolis berarti peluasan dan konsolidasi kekuatan progresif dan persatuan nasional (Pusjarah TNI, 1999: 24-25).

Pada bulan April 1963, PKI telah menyelesaikan dua kali Plan 3 tahunnya dalam bidang ideologi dan organisasi partai. PKI mengaku berhasil menjadi partai Marxis-Leninis dengan menghimpun anggota sekitar 2,5 juta. Mereka umumnya terdidik dalam pandangan, pendirian, metode, dan semangat Marxisme Leninisme. Sementara itu di bawah pimpinan PKI telah terorganisasi pula lebih 7 juta kaum tani dalam Barisan Tani Indonesia (BTI). Dengan demikian dapat disimpulkan, setelah menyelesaikan dua kali Plan 3 tahunnya, PKI telah berhasil mengindonesiakan *Marxisme Leninisme* dan

mengintegrasikannya dengan kaum tani, khususnya yang berhimpun dalam BTI (Harian Rakjat, 1965: 3).

Mengandalkan keberhasilan sebagai partai massa dan partai kader serta simpati Presiden Soekarno, PKI semakin giat dan keras menuntut dibentuknya Kabinet Gotong Royong berporoskan Nasakom. Jika sampai akhir tahun 1962 tuntutan PKI hanya menyebutkan *dibentuk* Kabinet Nasakom, tetapi sejak tahun 1963 tuntutan itu diperkeras *Bentuk Kabinet Nasakom* dengan penekanan “*tahun ini juga*”. Untuk mendukung tuntutan itu, PKI menggerakkan delegasi – delegasi dan demonstrasi – demonstrasi terhadap pemerintah. Selain itu kader-kader PKI juga diharuskan mengirimkan surat petisi secara langsung kepada Presiden Soekarno ataupun melalui Pengurus Besar Front Nasional, yang berisi tuntutan “*Bentuk Kabinet Nasakom tahun ini juga*”. Untuk memperkuat dukungan terhadap tuntutan politisnya itu, PKI dan ormas-ormasnya berusaha mempengaruhi partai-partai politik dan ormas – ormas non komunis, dengan cara membuat pernyataan bersama, yang isinya identik dengan tuntutan pokok mereka (Mortimer, 2011: 52).

Anggapan mengenai hanya PKI lah yang mendukung cita-cita Soekarno mengenai “marxisme nasionalis” adalah keliru. Semua elemen masyarakat, paling tidak di permukaan mendukung “kosa kata revolusioner” Presiden, tak terkecuali Tentara. Seruan politik Angkatan Bersenjata juga menggunakan kosakata seperti yang sama digunakan oleh partai-partai politik (Sulistyo, 2000: 23).

Sesudah reorganisasi TNI AD tahun 1962, Abdul Haris Nasution menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan (Menko Hankam) merangkap sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB). Dalam rangka menghadapi ofensif PKI di bidang politik, Jenderal Abdul Haris Nasution memprakarsai berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), yang terdiri atas Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI), Koperasi Gotong Royong (Kosgoro), dan Musyawarah Kerukunan Gotong Royong (MKGR). Sementara itu sebagai Wakil Ketua Pengurus Besar Front Nasional (PBFN), Jenderal Abdul Haris Nasution memberi restu diubahnya ide pembentukan satu organisasi tunggal Musyawarah Kekayaan Indonesia (MKI) menjadi satu forum koordinasi bernama Musyawarah Kerja Karyawan Indonesia (MKKI) (Sulistyo, 2000: 24-25).

Sementara itu, masih dalam menghadapi ofensif revolusioner PKI, Abdul Haris Nasution menolak gagasan-gagasan yang diajukan oleh PKI di berbagai bidang, antara lain di bidang pers, budaya, teritorial, dan militer. Di bidang pers, Abdul Haris Nasution memerintahkan pembentukan Pemberitaan Angkatan Bersenjata (PAB) dan Harian Angkatan Bersenjata (HAB), Berita Yudha beserta edisi daerahnya. Selain itu di lingkungan Staf Angkatan Bersenjata (SAB), dibentuk Biro Sejarah yang kemudian berkembang menjadi Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI atau kini bernama Pusat Sejarah TNI. Di bidang budaya berlangsung Konferensi Karyawan Pengarang Seluruh Indonesia (KKPI). Di bidang Pertahanan-Keamanan, Jenderal Abdul Haris Nasution dengan tegas menolak Nasakomisasi ABRI yang ingin diterapkan PKI. Selain itu, ia juga memprakarsai pembentukan organisasi Pertahanan Sipil (Hansip), Pertahanan Rakyat (Hanra) dan Resimen Mahasiswa di setiap Universitas dalam upaya menangkis ofensif PKI di bidang teritorial. Di bidang militer, Pak Nas menolak pembentukan Angkatan V dengan mempersenjatai buruh dan tani. Pada tanggal 20 Mei 1965 atas prakarsa Abdul Haris Nasution diresmikan berdirinya pendidikan tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata yang dikenal dengan nama Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta. Siswanya terdiri dari para perwira menengah ABRI (Roosa, 1965: 30).

Rangkaian ceramah yang dilakukan D.N. Aidit terhadap para perwira ABRI itu, dimaksudkan sebagai ofensif Manipolis guna meningkatkan kekuatan legal dan illegal PKI dalam tubuh ABRI. Prajurit-prajurit ABRI yang sudah dipersenjatai Manipol dinilai tidak akan mengkhawatirkan lagi bagi PKI, karena dalam menerima komando para anggota PII tentu tidak akan melaksanakan komando begitu saja untuk memusuhi PKI dan ormas-ormasnya. Melalui ceramah ceramahnya itu, D.N. Aidit berharap akan besar pengaruhnya terhadap ABRI dalam menerima dan melaksanakan komando, bahkan PKI bisa memihak rakyat (Aidit, 1964: 46).

Pada Konperensi Nasional I CC PKI tanggal 3 – 5 Juli 1964 di Jakarta, dalam suatu resolusinya dikatakan, bahwa PKI tetap membantu aksi-aksi sepihak kaum tani yang Manipolis, untuk mengkonsekuenkan UUPBH dan UUPA. Dalam resolusi itu juga disebutkan, dalam rangka usaha penyempurnaan Kotrar untuk menjamin pelaksanaan rituling Manipolis, PKI mendesak supaya Kotrar dapat segera dilengkapi. dengan mengikutsertakan PKI, sehingga Kotrar benar-benar mencerminkan Nasakom. D.N. Aidit mengemukakan pendirian PKI, bahwa untuk memeriksa pembangkangan dan

kecurangan tuan-tuan tanah dan alat-alat negara yang membantu PKI, perlu secepat mungkin diadakan rituling terhadap Panitia-panitia Landreform pada semua tingkat, dan dilaksanakan pembentukan Pengadilan Landreform (Mushed & Tadjoeddin, 2015:8).

Perlu diketahui, atas desakan PKI dan ormas-ormasnya, organisasi panitia landreform yang sudah terbentuk berdasarkan Keppres No. 131 tahun 1960, akhirnya disetujui oleh pemerintah untuk disempurnakan. Penyempurnaan itu menyeluruh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat II (kabupaten). Adapun perubahan yang mendasar dengan diadakannya penyempurnaan itu, ialah duduknya wakil-wakil ormas tani Nasakom sebagai Wakil-wakil Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform daerah Tingkat I dan II secara bergiliran. Selain itu, Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II juga diberikan wewenang yang lebih luas sebagai basis pelaksanaan landreform (Mushed & Tadjoeddin, 2015: 9).

Dalam kuliahnya tentang Manipol/USDEK di depan Pendidikan Kader Revolusi tanggal 16 Oktober 1964 di Jakarta, Ketua CC PKI DN. Aidit mengatakan, landreform yang menguntungkan kaum tani penggarap tidak hanya merupakan syarat mutlak bagi pembebasan tenaga produktif di desa, tetapi juga sangat penting bagi perkembangan bangsa Indonesia sendiri. Untuk memenangkan tuntutan politisnya, PKI tampaknya masih terus menggunakan kaum tani dan buruh menjadi ujung tombaknya (Abiyoso & Herfanda, 1995: 16).

Di tengah gencarnya aksi-aksi dan tuntutan-tuntutan PKI itu, Ketua CC PKI DN. Aidit memberikan serangkaian ceramah di depan Pendidikan Kader Revolusi di Jakarta. Dalam kuliahnya tentang Manipol/USDEK pada tanggal 16 Oktober 1964, D.N. Aidit menyebutkan bahwa "Pancasila hanya sebagai alat pemersatu dan kalau sudah bersatu, Pancasila tidak perlu lagi". Berbeda dengan ucapannya pada bulan Mei 1964, yang mempertanyakan keabsahan Pancasila sebagai falsafah negara, yang berlalu tanpa masalah, ucapannya sekali ini menimbulkan heboh. Ucapan D.N. Aidit itu makin memperjelas belang PKI, bahwa PKI menerima Pancasila hanya sebagai taktik perjuangan sementara, untuk mendapat kekuasaan pemerintah dan negara. Partai-partai politik, ABRI, dan golongan-golongan non komunis mempersoalkan ucapan Ketua CC PKI itu, namun Presiden Soekarno bersikap melindungi kepentingan politik PKI, sehingga D.N. Aidit dengan PKI dan ormas-ormasnya tetap bebas melakukan ofensifnya (Aidit, 1964: 27).

Oleh karena sikap melindungi dan keberpihakan Presiden Soekarno terhadap PKI dan ormas-ormasnya makin menjadi-jadi, maka kaum politisi non komunis mulai berani mengkritiknya. Seorang tokoh Angkatan 45 Pusat yang juga tokoh Partai Murba, Sukarni, dalam ceramahnya di depan Musda Angkatan 45 Jawa Timur tanggal 30 November 1964 di Surabaya menyatakan, bahwa Pemimpin Besar Revolusi kita bukanlah pribadi Bung Karno tetapi ide-ide Amanat Penderitaan Rakyat itulah Pemimpin Besar Revolusi Indonesia. Ceramah Sukarni itu diprotes keras oleh PKI dan ormas-ormasnya. Sukarni dituduh oleh mereka sebagai anti Presiden Soekarno, yang juga ditafsirkan anti Nasakom (dan lebih eksklusif lagi anti komunisme). Atas desakan PKI dan ormasnya, maka sidang pleno Komisi Politik Musda Angkatan 45 Jawa Timur kemudian memutuskan, menolak prasaran Sukarni dan menyatakan persoalan tersebut menjadi tanggungjawab pribadi Sukarni serta menyerahkan persoalannya kepada Angkatan 45 Pusat untuk diselesaikan (Kurniawan et al, 2012: 17).

Peristiwa Kanigoro ini dilihat dari sisi sejarah nasional menunjukkan latar belakang terjadinya memang disebabkan oleh situasi politik yang terjadi sebelum peristiwa Kanigoro bermula. Kekacauan dan banyak sekali tudingan antar kelompok partai tertentu membuat banyak sekali kubu yang saling menyerang baik secara verbal maupun non verbal. Kelompok PII yang terlibat ini juga merupakan salah satu bawahan masyumi yang diketahui pada tahun 1965 merupakan musuh dari PKI. Maka dari itulah kemunculan penyerangan di Kanigoro ini juga ditengarai PII mengadakan acara mental training atau kegiatan politik kubunya di Kanigoro yang merupakan wilayah kekuasaan PKI pada waktu itu. Bahkan setelah peristiwa ini berakhir dengan bebasnya Abiyoso pada akhir tahun 1965 terjadi tragedi nasional pembunuhan para jenderal oleh PKI di lubang buaya yang dikenal sebagai peristiwa G 30 S/PKI. Menurut dua sumber yaitu Sari Emingahayu dan Anis Abiyoso Peristiwa Kanigoro adalah awalan sebelum PKI melakukan pengkhianatan pada akhir september 1965 tersebut.

4.1.3 Faktor Agama

Faktor Agama adalah salah satu faktor penting yang menyebabkan terjadinya konflik PKI dan PII di Kanigoro tahun 1965. Mental training politik yang dilaksanakan oleh PII di Kanigoro juga isinya mengenai doktrin agama dan menyebabkan PKI yang berada di Kanigoro menyerang para peserta mental training politik terdiri atas anggota PII di seluruh Jawa Timur. Mental training memuat isi-isi keagamaan yang membuat

PKI berang karena mengancam penggeseran doktrin paham mereka yang pada dasarnya tidak beragama.

Mental training atau disebut Mentra adalah kegiatan kaderisasi PII yang berusaha untuk melakukan penanaman, pemupukan dan pemeliharaan, pengembangan dan pengekalan Aqidah Islamiyah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah yang berintikan tauhid agar para anggota PII memiliki kepribadian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu manusia yang beriman dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, agar para anggota PII memahami akidah Islamiyah dengan baik, melalui Mental Training diperkenalkan pula ideologi-ideologi lain seperti Komunisme, Kristenisasi dan lain sebagainya (Tim PBNU, 2013: 60) . Dengan jalan tertanamnya akidah Islamiyah dalam Mental Training, diharapkan anggota PII dapat memiliki :

1. Rasa cinta Kepada Allah Subhanahu wata'ala dan Rasulullah Shallallahu'alaihi wassalam.
2. Keberanian bersikap dan bertindak
3. Rasa Ukhuwah Islamiyah, dan
4. Kepribadian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Materi yang diberikan kepada peserta Mental Training di Kanigoro adalah ilmu penguatan agama Islam yang tentu saja berbenturan dengan PKI yang menjadi Kanigoro adalah basisnya untuk merekrut paham komunisme di Kediri dan sekitarnya. Pelaksanaan mental training ini tentu akan mengancam keberadaan PKI di basis-basis yang dibangunnya di Jawa Timur (Dahlan, 2020: 191). Sebagian materi yang disampaikan di acara ini adalah berkaitan dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan pelajar, diantaranya :

1. Aqidah

Orientasi dalam materi ini peserta diharapkan mampu menyadari dan meyakini bahwa Allah SWT menjadi realitas utama dalam kehidupan. Hal itu sebagai pedoman bagi setiap kader PII dalam mencegah berbagai bentuk penyimpangan aqidah yang berdampak pada semakin jauhnya seseorang dari hakikat dari misi penciptaan manusia sebagai hamba (Abdullah) dan wakil Allah SWT (Khalifatullah). Keadaan demikian mendorong seseorang cenderung menjadikan kepentingan hawa nafsu, pemikiran sebagai sesuatu yang dituhankan. Dampak lebih jauh dari hal itu adalah masyarakat akan mengalami disorientasi kehidupan

sehingga akan terjadi pola dan langkah hidup yang salah arah, longgar nilai, hedonistik dan terjebak dalam materialisme.

2. Personal Introductions (kedirian)

Orientasi dari materi ini peserta diharapkan mampu mengenali diri sendiri dan menyadari identitasnya di tengah realitas sosial. Hal tersebut untuk menghindari krisis identitas yang menjadikan seseorang tidak memiliki konsep dan citra diri yang berdampak pada kesulitan untuk mengambil keputusan dan menentukan sikap. Kesulitan bertindak dalam rangka aktualisasi diri. Kondisi seperti ini menjadi seseorang tidak bisa mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk menunjang tugas-tugas kehidupan, dan tidak mampu menyikapi dan mengatasi problem-problem diri dan masyarakat. sehingga kehadirannya cenderung menjadi beban sosial, bukan dinantikan oleh masyarakat sekitarnya.

3. Kepemimpinan.

Orientasi dari materi ini peserta diharapkan menyadari bahwa setiap manusia diciptakan sebagai pemimpin, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Hal tersebut untuk menghindari adanya budaya paternalisme yang akan mengungkung potensi kreativitas dan kemandirian seseorang, karena tertutup oleh ketakutan dan ketergantungan kepada orang lain. Hal ini menyebabkan kepribadian seseorang tidak bisa tumbuh dan berkembang sehingga potensi kepemimpinannya tidak teraktualisasi secara optimal.

4. Keumatan (Sosial Politik)

Orientasi dari materi ini peserta diharapkan mengetahui kondisi sosial politik yang terjadi dan mau ikut terlibat sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat. probel dan tantangan dalam bidang keumatan dan sosial politik meliputi eksklusifme, sekterianisme, lemahnya struktur politik dan akses terhadap kekuasaan, lemahnya perlindungan HAM, menguatnya hegemoni tata dunia baru, struktur politik yang feodal, perimbangan kekuasaan (demokratisasi) dan krisis ideologi.

Selama ini PKI masih sering melontarkan propaganda damai bahwa mereka tidak anti agama, bersahabat dan menghormati kebebasan beragama. Mereka hanya membela rakyat dan melawan kapitalisme serta imperialisme dibuktikan masyarakat

sendiri sebagai suatu taktik belaka. Memang hal itu sebagian bisa mereka buktikan beberapa tokoh agama yang menjadi tokoh PKI, tetapi masyarakat tidak mudah terkecoh oleh kenyataan yang langka itu. Sebaiknya masyarakat menganggap tokoh agama yang mengikuti garis perjuangan PKI itu dianggap tidak tahu agama dan tidak tahu PKI (Tim PBNU, 2013: 80).

Berbagai propaganda itu tidak mengubah kepercayaan masyarakat yang berpegang sikap dan perilaku PKI sehari-hari di lapangan yang jauh berbeda dengan apa yang mereka propagandakan. Dalam perilaku sehari-hari PKI Pesindo sangat kejam menghadapi lawan politiknya dan sikapnya yang jelas sangat anti agama dan anti Tuhan. Selain itu partai ini juga diidentifikasi masyarakat sebagai partainya para preman dan perampok. Partai ini memang menampung dan melindungi para perampok untuk melancarkan tindakannya, bahkan oleh PKI dijadikan sebagai sarana melakukan subversi. Masyarakat merasakan semuanya ini sebagai pengalaman sehari-hari yang sangat meresahkan kehidupan mereka (Susanto & Emingahayu, 2007: 45).

Dalam pemberontakan dalam waktu yang cukup singkat di Madiun dan sekitar Jawa timur Jawa Tengah yang mereka kuasai telah mengakibatkan banjir darah yang mengorbankan para ulama, kalangan pejabat pemerintah dan rakyat biasa. Peristiwa pembantaian para tokoh agama, dan pengrusakan terhadap masjid serta pesantren yang mereka lakukan selama pemberontakan itu tidak pernah dilupakan oleh umat Islam. Selain itu umat Islam dan bangsa ini mengetahui betul kekejaman yang dilakukan oleh partai komunis di Negara yang mereka kuasai melalui kudeta berdarah, yang mengorbankan ribuan rakyat, seperti di Uni Soviet dan Cina yang mengorbankan hingga puluhan Juta, sementara itu di Vietnam dan Korea Utara Partai Komunis telah membantai dua jutaan rakyat (Abiyoso & Herfanda, 1995: 10).

Walaupun terbukti melawan pemerintah yang sah dan mengakibatkan korban jiwa, tetapi PKI tidak dilarang dan tidak dibubarkan, bahkan masih diberi hak hidup yang sama dengan partai lainnya. Ketika diselenggarakan Pemilu 1955 bisa mengikuti Pemilu dengan leluasa seolah tidak memiliki cedera politik. Bahkan kemudian mereka memutarbalikkan fakta bahwa mereka tidak melakukan pemberontakan, tetapi semata diprovokasi oleh Muhammad Hatta. Padahal mereka melakukan tindakan sendiri dengan melakukan kerjasama dengan musuh RI yaitu Belanda untuk menghancurkan Republik ini. Propaganda itu diterima oleh rakyat yang tidak mengerti sejarah, sehingga

PKI bisa ikut Pemilu dan tetap mendapat dukungan besar dari masyarakat. Bayangkan sehabis melakukan pemberontakan berdarah itu PKI masih mapu meraih posisi empat besar setelah PNI, Masjumi dan NU. Sementara itu di beberapa basis PKI, maka kekuatan PKI bisa menandingi par tai lain. Di Trenggalek misalnya PNI mendapatkan 11 Suara, PKI mendapatkan 10 Suara, sementara NU mendapat 6 Suara, maka Bupati di kota ini bisa dipegang oleh PKI (Tim PBNU, 2013: 47).

PKI memiliki paham komunisme dan ateis, komunisme merupakan antitesis dalam memahami Tuhan. Paham komunis itu tidak mengakui adanya Tuhan. Sebab pengikutnya meragukan eksistensi Tuhan. Penganut komunisme menganggap Tuhan tidak ada ketika kaum miskin dan kaum tertindas membutuhkan pertolongan. Gerakan radikal kiri yang dilakukan komunis di Indonesia, sangatlah berkaitan dengan ideologi dan paham ateis yang diyakininya. Kalau dilihat doktrin-doktrin komunisme yang sudah berkembang, gerakan radikal merupakan perwujudan dari doktrin-doktrin yang sudah dimatangkan oleh pencetus komunisme (Kurniawan et al, 2012: 34).

Sebelum komunis melakukan gerakan-gerakan atau aksi-aksinya, mereka melakukan doktrin-doktrin ideologi ateis terlebih dahulu. Tidak ada kader PKI yang melakukan gerakan radikal tanpa memahami doktrin atau keyakinan mereka. Di Indonesia, lanjut mantan Ketua I PII Jawa Timur ini, doktrin ideologi komunis sudah masuk sampai pada lapisan paling bawah. Selain itu, paham komunis juga merupakan antitesis dominasi struktural. Paham komunis banyak menjamur di kalangan masyarakat miskin korban kebijakan struktural pemerintah. Jadi bukan miskin alami yang disebabkan karena ketidakmampuan orang-perorang. Mantan Ketua GSNI (Gerakan Sosial Nasional Indonesia) ini mengibaratkan komunis itu layaknya tanaman. Ia akan tumbuh menawan pada tanah yang subur. Begitu juga dengan komunis (Mortimer, 2011: 50).

Ladang Indonesia memiliki tanah yang subur bagi pertumbuhan komunis yang Ateis. Hal tersebut disebabkan oleh hukum di Indonesia yang masih belum bisa tegak dan keadilan tak dilaksanakan sungguh-sungguh. Korupsi dan salah-guna jabatan meluas dan merajalela. Situasi chaos, anarkis, kacau, massa gampang dihasut-merusak-membakar-membunuh. Jarak antara orang sangat kaya dengan sangat miskin seperti jurang. Kondisi bangsa Indonesia yang sedang mengalami gejala distabilisasi ekonomi, sosial dan keamanan serta berkepanjangannya konflik-konflik, sangat

memungkinkan bagi perse-maian komunisme. Hal itu dapat mengakibatkan eksistensi gerakan dan aktivitas komunis kembali lagi. Mereka akan mengelola dan memanfaatkan kelemahan pemerintahan dan lawan-lawan politiknya, untuk dijadikan dasar menghancurkan melalui saluran politik dan hukum. Saat ini mereka telah menjajakan citra palsu bahwa mereka adalah pejuang Hak Asasi Manusia, pro-demokrasi, dan tidak anti agama. “PKI ilegal” – seperti kata Muso – kini telah melakukan strategi metamorfosis dalam segala bidang. Meski tidak memakai kata langsung komunisme, tapi dari pola pemikiran dan gerakan jelas menunjukkan bahwa ia adalah wajah baru komunisme. Negara dapat merevitalisasi dan menumbuhkan pemahaman Pancasila melalui pendidikan sejak dini. Untuk menghadapi ancaman PKI harus dengan dua kekuatan; yakni nasionalisme dan agama (Pohlman, 2013: 11).

Dalam kesadaran terdalam aktivis PKI dan Lekra, moralitas bangsa harus tetap dilindungi dari destruksi yang ditimbulkan budaya-budaya nekolim. Gelombang demonstrasi dan propaganda menjebol, misalnya, produksi film-film Amerika Serikat yang disebar oleh Association Picture American of Indonesia (AMPAI) dilangsungkan secara massif dan berhasil. AMPAI pun jebol pada Oktober 1964 (Susanto & Emingahayu, 2007: 56).

Seringkali PKI dan Lekra dituding melecehkan agama. Di film-film bagaimana orang-orang PKI dan seluruh ormas yang sealiran dengannya diperlihatkan memasuki masjid, menginjak-injak Alquran, seperti kejadian di Kanigoro, Kras, Kediri. Dan rekaman itu terus berulang hingga merasuki bawah sadar dan melahirkan kebencian yang tiada tara. Barangkali tudingan itu benar. Tapi tidakkah PKI—ketika mereka berada pada titik konsolidasinya yang kuat—sudah memberi bantahan yang tak pernah terungkap dalam dua kali pemuatan di Harian Rakjat edisi 13 Februari 1965 (Dahlan, 2020: 81).

4.1.4 Faktor Sosial Ekonomi

Faktor Sosial Ekonomi Konflik PKI dan PII di Kanigoro Tahun 1965 adalah berawal dari Kebijakan land reform di Jawa Timur dilakukan oleh panitia yang ditunjuk pada tahun 1961 untuk mendistribusi tanah di pedesaan. Berbagai kepemilikan secara individu mulai dibatasi dengan kuota maksimal yang harus dipatuhi karena jika tidak sisa tanah yang dikuasai oleh perorangan tersebut akan diambil alih Negara. Tetapi dalam prakteknya sering terjadi penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan oleh

para tuan tanah. BTI yang terkena dampak langsung selama kebijakan itu muncul melakukan protes dan sangat agresif akan infiltrasi berbagai kajian politik luar pemahannya. Mulai dari pemalsuan luas tanah yang dilaporkan sampai pembuatan akta palsu dengan nama orang lain atau nama fiktif. Berbagai penyuapan juga terjadi kepada panitia pelaksana, dan ini merupakan fenomena yang umum terjadi karena sudah mengakar. Dalam sejarahnya proses penyuapan ini sering terjadi dalam hal perizinan (Sulistyo, 2000: 67).

Tidak meratanya pembagian tanah dan berbagai bentuk penyimpangan pelaksanaan tersebut mengindikasikan adanya kemandulan pihak pemerintah khususnya panitia pelaksana land reform yang ditunjuk pada tahun 1961 untuk mengurus wilayah-wilayah otonom sehingga membuat banyak petani di Jawa khususnya Jawa Timur merasa tidak sabar untuk menanti realisasi UUP Agraria tersebut. Ujung-ujungnya adalah banyak terjadi aksi sepihak dari para petani untuk “merampas” tanah-tanah milik tuan tanah yang besar. Di samping itu perampokan terhadap hasil bumi dari tanah milik tuan tanah juga sering terjadi pada periode ini (Schaefer, 2013: 40)..

Polarisasi kekuatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari karena memang dalam pedesaan Jawa Timur terdapat dua kelompok besar yang mempunyai kepentingan yang bertolak belakang. Di satu pihak para tuan tanah yang ingin mempetahankan tanah-tanah mereka dan kaum petani gurem yang menginginkan agar tanah para tuan tanah tersebut terdistribusi secara merata. Dapat dipahami bahwa kedua pihak melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya, karena seperti yang disebutkan di atas bahwa tanah bagi penduduk desa adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Keadaan ini diperparah oleh berbagai partai politik yang melakukan campur tangan dalam polarisasi kekuatan masyarakat pedesaan. PKI yang bersemboyan “tanah untuk rakyat” berada dipihak para petani gurem ini. Maka dibentuk BTI untuk mewedahi aspirasi para petani gurem dalam memperjuangkan haknya untuk memperoleh tanah. Di sisi lain PNI dan Masyumi berada di pihak para tuan tanah karena memang dalam arena politik mereka adalah partai yang sangat menentang PKI yang terlalu berpengaruh di pemerintahan. PNI dan Masyumi juga sangat menentang berbagai aksi yang digalang oleh PKI lewat BTI untuk melakukan aksi secara sepihak untuk merebut secara paksa tanah-tanah milik para tuan tanah, karena mereka menganggap bahwa proses pendistribusian harus melalui berbagai prosedur yang sudah

ada. Di sisi lain PKI sangat menentang berbagai prosedur yang ada karena dianggap lebih menguntungkan para tuan tanah daripada para petani gurem (Mushed, 2015: 14).

Keadaan desa di Jawa Timur yang sangat kompleks ketidakmerataannya adalah akibat berbagai kebijakan pemerintah kolonial dalam masa tanah paksa. Beberapa keluarga sikep mengangkat dirinya menjadi cikal-bakal atau keluarga pendiri desa, dan berusaha memonopoli kedudukan-kedudukan desa. Selanjutnya ada golongan pemilik halaman. Dan akhirnya masih ada kelompok numpang di antara mereka yang tidak pernah lenyap seluruhnya seperti halnya dengan golongan sikep. Apa yang terjadi ialah bahwa karena beban-beban negara setiap orang menjadi semakin miskin. Di samping itu pertambahan penduduk yang pesat dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang dapat diperoleh membuat petani gurem merasa hidupnya sangat tertekan (Cribb, 1990: 60).

Persengketaan tanah ini juga melibatkan pihak pesantren, dimana pihak pesantren ini dengan digalang oleh Masyumi berpihak kepada para tuan tanah. Aksi-aksi sepihak kelompok petani untuk mengambil alih tanah milik para tuan tanah tersebut juga merupakan bentuk awal konflik sosial di wilayah Jombang-Kediri. Pada bulan Juni 1962, misalnya, di Kaliboto, Kediri, terjadi pengambilalihan sepetak sawah oleh ratusan anggota PKI terhadap tanah milik Haji Syakur, dan di Kentjong sawah milik Haji Samur juga diambil alih oleh massa PKI. Konflik sosial akibat penerapan UUPA dan UUPBH itu ternyata tidak hanya melahirkan konflik antara tuan tanah dan petani, tetapi juga antara pihak pabrik gula dengan petani. Pada November 1964 misalnya, ketika Pabrik Gula Ngadiredjo mengambil-alih tanah milik Pabrik Gula Jengkol yang lama tidak dimanfaatkan tetapi sehari-hari digarap oleh para petani BTI (Barisan Tani Indonesia, organisasi petani underbouw PKI), terjadi insiden penembakan yang menewaskan 15 petani. Konflik terdahsyat adalah kasus bentrokan anggota PKI dengan para pemuda yang tergabung dalam organisasi Persatuan Pelajar Islam (PII), sayap pelajar Masyumi, di Kanigoro (wilayah Kediri, Jawa Timur) pada bulan Januari 1965 (Abiyoso & Herfanda, 1995: 46).

Berbagai doktrin perjuangan PKI yang dipergunakan sebagai dasar perlawanan sosial terhadap pihak tuan tanah sering dilakukan. Diantaranya adalah melalui BTI (Barisan Tani Indonesia), SOBSI dan Pemuda Rakyat, PKI juga mulai menggarap desa-desa dan mengeluarkan slogan “Tujuh Setan Desa”. Mereka yang disebut setan itu

adalah tuan tanah, lintah darat, tengkulak, tukang ijon, kapitalis birokrat, bandit desa serta pengirim zakat. Setelah slogan ini dipropagandakan, mulailah terjadi pembantaian dan pembunuhan terhadap mereka yang oleh penduduk desa dianggap 'setan'. Dengan maraknya aksi brutal PKI, enam partai mengeluarkan pernyataan yang sifatnya mengecam tindakan PKI. Mereka adalah PNI, NU, Parkindo, Partai Katolik, PSII dan IPKI. Di samping slogan "tujuh setan desa juga terdapat lagu perjuangan yang sering dinyanyikan. Lagu perjuangan tersebut adalah kembang- kembang genjer, yang merupakan lagu daerah masyarakat Banyuwangi. Penggagas agar lagu ini dibuat sebagai lagu perjuangan adalah D.N. Aidit, karena menurutnya lirik dari lagu ini merefleksikan berbagai penderitaan yang diderita oleh petani gurem dan perjuangannya dalam menjalani hidup (Pusjarah TNI, 1999: 81).

Berbagai doktrin bahwa tanah adalah milik rakyat dan bukan milik Negara ataupun tuan tanah telah membuat PKI merekrut ribuan simpatisan yang nantinya akan berjuang secara sepihak untuk menuntut hak mereka atas tanah. Setiap hari PKI Mengumpulkan ratusan lelaki dan perempuan yang bersenjatakan pacul, arit, dan palu untuk merampas secara paksa tanah milik tuan tanah yang dianggap melebihi batas ketentuan. Kalau tidak melakukan perampasan tanah maka dilakukan penjarahan terhadap hasil bumi yang ada di atasnya. Di lain pihak para tuan tanah memiliki preman-preman bayaran yang diutus untuk menjaga dan melakukan perlawanan terhadap gerakan petani yang digalang PKI. Di samping preman- preman bayaran tersebut kesatuan pemuda muslim juga aktif melakukan perlawanan terhadap gerakan petani. Sehingga perkelahian yang berujung pada pembunuhan terjadi dalam kedua pihak dan tidak dapat dihindari (Susanto & Emingahayu, 2007: 70).

Dengan besarnya jumlah kenggotaan, BTI mendinamisir kehidupan pertanian dan politik pedesaan, terutama ketika organisasi ini menjadi pendukung dan pendorong utama program *land reform* yang menjadi mandat UU Pokok Agraria No 5/1960 dan UU No. 56 PRP/1960. Melihat pelaksanaannya yang mengalami kemacetan akibat keengganan para pemilik dan tuan tanah untuk menyukseskan program ini, BTI melancarkan "aksi-aksi sepihak" guna mengambil alih dan menduduki tanah-tanah yang dianggap akan didistribusikan kepada petani penggarap. Serangkaian peristiwa di berbagai daerah inilah yang seringkali dirujuk sebagai akar tensi dan konflik di pedesaan yang memuncak pada pembantaian-pembantaian selama kurun waktu 1965-

1966, dengan menysasar para anggota PKI dan organisasi-organisasi yang dianggap terafiliasi dengannya (termasuk BTI di dalamnya) (Pusjarah TNI, 1999: 70).

Aksi-aksi sepihak” yang seringkali diilustrasikan penuh kekerasan pula yang selalu ditekankan oleh rezim Orde Baru dan aparatusnya dalam menggambarkan BTI. Tak sampai di situ, Orde Baru juga menjadikan gambaran ini sebagai dalih untuk “mendisiplinkan” gerakan tani dengan hanya melegalkan satu organisasi tani yang bisa dipantau dan dikontrol oleh negara, HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Karenanya, tak banyak yang kita tahu dari BTI sebagai gerakan petani terbesar di zamannya ini, selain dari apa yang digambarkan oleh Orde Baru (Schaefer, 2013: 44-45).

Menurut Aidit, ada dua segi positif yang perlu dikembangkan dari koperasi. Pertama, bahwa ia dapat mempersatukan rakyat pekerja yang lemah ekonominya dan menghambat proses diferensiasi produsen kecil. Dengan persatuan dan kerjasama ini, kaum tani dapat mengurangi eksploitasi tuan tanah, lintah darat, tukang ijon, tengkulak dan kelas pemodal. Sebab, perjuangan membebaskan kaum tani dari penghisapan tuan tanah dan lintah darat sebagai sisa-sisa feodalisme adalah bagian dari perjuangan revolusi untuk Indonesia yang demokratis. Kedua, koperasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan produksi, sehingga dapat menambah pendapatan anggota-anggotanya (Aidit, 1964: 66).

Sebagai wujud keseriusan untuk membangun koperasi petani ini, pada 1964, BTI membentuk sebuah pusat sekolah koperasi petani untuk sekitar 400 kader-kader BTI di tingkat provinsi. Di bawah itu, di tingkat provinsi, ada sekolah-sekolah regional yang melatih kader di tingkat kabupaten, dan seterusnya hingga ke tingkat kecamatan, yang di situ kursus kilat diorganisir untuk mendidik kader di cabang lokal (ranting) dan para pemimpin kelompok. Bahan-bahan pendidikan banyak disuplai oleh Akademi Ilmu Sosial Aliarcham (AISA), di mana departemen Ekonomi Politik dalam institusi tersebut memberi perhatian cukup besar tentang tema koperasi (Cribb, 1990: 56-57).

Presiden Soekarno mengumumkan *Deklarasi Ekonomi (Dekon)* sebagai strategi dasar (basic strategy) ekonomi Indonesia, dalam rangka pelaksanaan *Ekonomi Terpimpin*. Menurut Dekon, pada tahap pertama harus diciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan feodalisme. Tahap pertama (tahap nasional dan demokratis) adalah persiapan untuk

tahap kedua, yaitu tahap Ekonomi Sosialis Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, Dekon tidak segera disertai tindakan-tindakan penyehatan ekonomi yang diperlukan (Dahlan, 2020: 70).

Ketenangan dan keleluasaan untuk membangun dan merehabilitasi keadaan perekonomian yang sudah buruk itu, akhirnya menjadi terganggu oleh kejadian-kejadian yang cukup serius, yang berasal dari dalam dan luar negeri. Gangguan dari dalam negeri dilakukan oleh aksi-aksi PKI untuk menjatuhkan lawan-lawan politik mereka yang duduk dalam kabinet. Sedang gangguan dari luar yang hampir bersamaan waktunya dengan aksi-aksi PKI itu adalah dilancarkannya politik konfrontasi terhadap Malaysia, yang oleh Presiden Soekarno disebut proyek nekolim (neo kolonialisme imperialisme).

Memasuki tahun 1964 kemerosotan ekonomi dan tekanan inflasi tambah mengganas dan semakin tidak terkendali. Dalam situasi yang demikian, Indonesia masih terus memberikan bantuan keuangan kepada kaum pemberontak Serawak dan Brunei di Kalimantan Utara, yang sudah tentu menambah berat beban ekonomi dan keuangan Indonesia. Ketegangan di luar negeri itu ditambah oleh berbagai ketegangan baru di dalam negeri yang didorong oleh orang-orang PKI. Belum puas dengan aksi – aksi ini, rasa tidak senang PKI terhadap Inggris dicetuskan dengan mengerahkan buruh-buruh SOBSI pada perusahaan-perusahaan Inggris setempat untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. Ketua SOBSI Njono menyebutkan, tindakan ambil-alih yang dilakukan kaum buruh terhadap perusahaan-perusahaan Inggris itu, adalah sebagai sumbangan positif dalam memperkokoh kedudukan Indonesia untuk mengganyang Malaysia (Mushed & Mansoob, 2015: 44).

Pada saat meningkatkan aksi-aksi PKI itu, Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1964 menyampaikan pidato kenegaraannya berjudul “*Tahun Vivere Pericoloso*” (Tavip), atau “*Tahun Yang Menyerempet-nyerempet Bahaya*”. Dalam pidato Tavip itu, Presiden Soekarno dengan tegas memperingatkan untuk mengakhiri segala macam phobi. Dengan dibentunya Kabinet Dwikora tanggal 27 Agustus 1964, beberapa orang PKI diangkat sebagai menteri. Peristiwa ini ikut mendorong PKI untuk meningkatkan ofensif manipolisnya^[9] di bidang ekonomi. Beberapa menteri dalam Kabinet Dwikora, langsung telah dituduh PKI sebagai kaum reaksioner yang anti rakyat (Dahlan, 2020: 24).

Aksi-aksi yang dilancarkan oleh PKI makin lama makin berani serta bertambah keras. Bertolak dari kemerosotan ekonomi yang makin memberatkan kehidupan rakyat sehari-hari, PKI menggerakkan anak-anak organisasinya untuk melakukan aksi-aksi (demonstrasi) penghentian apa yang mereka namakan “penyelewengan 26 Mei” dan “teror harga”. Pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi sasaran mereka adalah Menteri Perdagangan Adam Malik dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh, yang keduanya berasal dari partai Murba.

Pada bulan terakhir tahun 1964, ofensif yang dilancarkan oleh PKI dan ormasnya makin meningkat. Ketua Dewan Nasional SOBSI Moh. Munir pada rapat umum HUT ke-18 SOBSI tanggal 6 Desember 1964 di Bandung, dengan tegas membantah bahwa kesulitan ekonomi Indonesia bukan disebabkan oleh konfrontasi terhadap Malaysia. Menurut Munir, kesulitan ekonomi disebabkan karena Dekon belum dilaksanakan secara konsekuen dan kaum kapitalis birokrat belum disingkirkan dari PN-PN dan badan-badan ekonomi lainnya, serta belum dilaksanakannya UUPA dan UUPBH secara konsekuen. Munir juga menegaskan, bahwa SOBSI menolak gagasan *Politik Ekonomi Baru* yang bertentangan dengan Dekon yang akan meliberalkan ekonomi, seperti menaikkan harga dan tarif, penswastaan PN – PN dan proyek-proyek pembangunan negara serta penghentian subsidi PN – PN. Kemudian Munir memperingatkan, siapa yang tidak sanggup melaksanakan Dekon atau menentang Dekon, lebih baik mengundurkan diri dari posnya, dan jangan menunggu tangan kaum buruh menyeret mereka dari kedudukannya (Abiyoso & Herfanda, 1995: 23).

SOBSI pada rapat umum itu menyerukan kepada segenap kaum buruh untuk segera menentukan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak kepada pemerintah agar membatalkan segala rencana untuk menswastakan proyek-proyek negara.
2. Proyek-proyek yang sudah selesai supaya segera dijadikan Perusahaan Negara (PN) didasarkan UU No. 19/1960
3. Mendesak kepada pemerintah agar meninjau kembali PP/RI/1964,[16] terutama pasal-pasal yang mengatur penswastaan supaya dihapus.
4. Bagi perusahaan-perusahaan negara yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah supaya dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

5. Pelaksanaan pendaerahan sesuatu PN harus dilakukan secara demokratis, melalui musyawarah dan persetujuan dengan SB-SB (Serikat Buruh) yang bersangkutan
6. Hak-hak sosial ekonomi kaum buruh harus diperbaiki.
7. Hak-hak politik kaum buruh dan hak-hak kebebasan SB diperluas.
8. Dalam Direksi Perusahaan harus diangkat calon yang diusulkan oleh Serikat Buruh (Pusjarah TNI, 1999: 41).

Dalam situasi dan kondisi ekonomi dan keuangan yang sudah sangat buruk itu, pemerintah menghadapi dilema yang melingkar, yang sulit untuk dipecahkan. Di suatu pihak PKI dan ormasnya menentang swastanisasi PN-PN dan menuntut penurunan harga-harga dan tarif, di lain pihak pemerintah mengalami kesulitan dana untuk melanjutkan proses produksi. Dengan demikian, selain persediaan barang-barang tidak dapat mencukupi kebutuhan, juga kenaikan harga -harga tidak dapat dibendung (Pusjarah TNI, 1999: 41-42).

4.2 Sebab Khusus/Langsung

Setelah Penjelasan mengenai sebab-sebab umum mengapa Konflik PKI dan PII di Kanigoro Kediri ini bisa terjadi terdapat sebab langsung yang dikemukakan oleh peneliti. Bahwa Konflik PKI dan PII di Kanigoro adalah karena adanya pelaksanaan mental training politik yang dilakukan oleh PII. Dalam Harian Rakjat (1965: 2) dijelaskan bahwa mengapa BTI dan Pemuda Rakyat menyerang kegiatan itu karena telah mengancam persatuan revolusioner Nasakom.

Perlu diketahui, bahwa Peristiwa ini yang disebut sebagai ‘konflik’ antar kedua belah pihak yaitu PKI maupun PII memang menjadi perhatian khusus bahwa di dalam suatu lingkup wilayah juga ada penyebaran sayap basis dimana PKI sendiri sudah mulai melebarkan wilayahnya di berbagai tempat di pulau Jawa. Mulai dari Jawa Tengah hingga merebak ke Jawa Timur. Bukan hanya Madiun yang dijadikan pusat kuasa PKI tetapi mulai disebarkan basis pertahanan PKI mulai dari Kediri hingga Blitar. Hal yang menyebabkan pemicu konflik adalah dimana PKI mengetahui bahwa ada ‘tamu’ yang mengusik daerah basisnya yaitu di Kanigoro Kabupaten Kediri yaitu Pemuda Islam Indonesia yang memiliki underbow dengan partai ‘musuh’ PKI yaitu Masyumi mengadakan kegiatan Mental Training untuk anggota baru PII di desa Kanigoro

membuat para pengikut PKI yang berada di basisnya berangkat akan kehadiran orang-orang yang mengadakan kegiatan politik lain di daerah basis PKI ini pada Januari 1965. Salah satu saksi sejarah peristiwa ini adalah Mantan Ketua Departemen Kader PII Wilayah Jawa Timur bernama Anis Abiyoso yang juga terlibat dalam Peristiwa Kanigoro ini hingga beliau sampai dipenjara karena dituduh sebagai provokator.

Mental training Pelajar Islam Indonesia se-Jawa Timur di Kanigoro Kediri untuk membentuk pribadi anggotanya, PII menyelenggarakan beberapa jenis training untuk pengkaderan. Diantaranya adalah Mental Training (latihan wajib) yang biasanya diadakan di pondok pesantren atau desa yang jauh dari kesibukan kota dan dilaksanakan pada saat liburan sekolah. Pelaksanaan mental training biasanya di bulan Ramadhan selama satu minggu. Sedangkan peserta Mental Training sendiri pada umumnya sebagian besar dari anggota-anggota yang bersekolah umum, dimana pelajaran agama dirasa masih kurang mencukupi. Mental training sendiri pada telah diterapkan oleh PII diberbagai tempat sejak tahun 1959. Sistem dan metode yang diterapkan dalam Mental Training PII mempunyai beberapa tujuan yaitu menyadarkan pelajar terutama di kota maupun desa dalam menjaga kestabilan dan keharmonisan mental dan spiritual (Abiyoso & Herfanda, 1995: 60).

Mental training (Mentra) sendiri adalah kegiatan kaderisasi PII yang berusaha untuk melakukan penanaman, pemupukan, pemeliharaan pengembangan dan pengekalan Aqidah Islamiyah yang bersumber dari Al-Quran dan As Sunah, yang berintikan tauhid agar para anggota PII memiliki kepribadian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu manusia yang beriman dan cinta kepada Allah dan Rasulnya.

Pada Tahun 1965, Pengurus Wilayah (PW) PII Jawa Timur melaksanakan Kegiatan Mental Training di Kanigoro mulai tanggal 9 Januari. Dipilihnya Kanigoro oleh PW PII Jawa Timur sebagai tempat pelaksanaan Mental Training sendiri telah memenuhi syarat setelah mempertimbangkan masak-masak dan setelah melakukan peninjauan. Panitia pelaksana diserahkan kepada Komisaris Daerah/Cabang Kediri, yang dalam hal ini penyelenggaranya terdiri dari anggota-anggota PII ranting Kras dan Ngadiluwih (Abiyoso & Herfanda, 1995: 61).

Materi yang disepakati selama kegiatan Mental Training oleh PW PII Jawa Timur dengan panitia adalah sebagai berikut :

- a. Indoktrinasi ideologi Negara/Pancasila/manipol/usdek diberikan oleh

1. Jawatan Penerangan Kediri
2. Bpk. Asisten Wedana (camat) Kras
- b. Indoktrinasi agama diisi oleh:
 1. Tauhid : Usman Effendi, PW PII Jawa Timur / Mahasiswa IAIN Surabaya
 2. Ibadah : Idem
 3. Kebudayaan Islam :A. Mudzakir, PW PII Jawa Timur / Mahasiswa F.I.A.D Surabaya
 4. Akhlakulkarimah: Idem
- c. Keorganisasi diisi oleh :
 1. Ke-PII-an : M. Zainudin Dimyathi, Komisariat Daerah PII Kediri/ Mahasiswa IAIN Kediri
 2. Diskusi : Anis Abiyoso, PW PII Jatim/Mahasiswa Akademi Kewartawanan SurabayaDan juga ke-Hansip-an : Komandan Uterpra Kras.

Pelindung panitia dalam Mental Training se-Jawa Timur adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Kediri, Kapolsek Kras, Danramil wilayah Kras dan Camat Kras, Danramil wilayah Kras dan Camat Kras. Jadi jelas penyelenggaraan kegiatan Mental Training tersebut telah melalui jalur yang benar, sehingga para pejabat setempat dengan senang hati memberi bantuan yang dibutuhkan (Abiyoso & Herfanda, 1995: 76).

Peristiwa Kanigoro secara geografis hanyalah noktah yang teramat kecil, namun secara politik Kanigoro memegang posisi penting dan sekaligus menjadi bensin yang menggerakkan pembunuhan besar-besaran atas orang-orang yang dituduh sebagai umat komunis. Peristiwa penyerbuan masjid di lingkungan pesantren Al-Jauhar Kras Kanigoro Kediri yang diasuh H. Jauhari itu dijadikan bara pengobar dendam memperhadapkan PKI dan ormas Islam hingga di struktur paling bawah.

Kanigoro jika dilihat dari segala aspek memang isu yang paling basah untuk dieksploitasi, terutama sekali untuk menggerakkan dendam. Semua unsur-unsur pembakarnya jelas tersedia: agama (PII), ateis (PKI dan ormas-ormasnya), masjid (rumah suci), kitab suci (Al-Qur'an). Teror itu makin merasuk dalam arus kesadaran nasional saat mendapat "kehormatan" sebagai pembuka scene film dahsyat Arifin C.Noer Pengkhianatan G 30 S/PKI (Dahlan, 2020: 141).

Di sebuah masjid desa segerombol massa berziarah hitam-hitam memasuki masjid tanpa perlawanan. Melemparkan tembakan jemaah yang salat. Sabit-sabit berkelebat membat kader-kader PII yang sedang khusyuk mendengarkan lantunan imam membaca surah-surah. Dengan arit juga, gerombolan itu memporak-porandakan kitab suci. Hal ini bertolak belakang dengan pengakuan PKI di *Harian Rakjat* edisi 12 Februari 1965 bahwa menginjak kitab suci (Al-Quran) itu tidak terjadi. Kedua pengakuan ini menjadi bukti bahwa kedua belah pihak yang berkonflik pasti akan membela masing-masing, tetapi peneliti mempunyai cukup bukti bahwa yang diakui anggota PII adalah benar buktinya koran *Harian Rakjat* sudah ditiadakan/dihilangkan saat PKI turun di tahun 1966 (Dahlan, 1999: 148-149).

Awal terjadinya penyerangan PKI terhadap PII di Kanigoro menurut penuturan Anis Abiyoso adalah berawal pada pagi hari tanggal 13 Januari 1965, di awal bulan puasa 1385 Hijriyah, di sebuah pesantren daerah Kanigoro kecamatan Keras para peserta mental training PII dengan warga sekitar melaksanakan Sholat Shubuh di Masjid Pesantren tersebut, Anis yang juga akan melaksanakan ibadah pagi itu tiba-tiba mendengar suara tembakan dan suara gebrakan keras dari pintu serta teriakan mengatakan bunuh dan ganyang. Ketika sholat sudah selesai Anis Abiyoso mendapat tendangan di punggung dengan suara perintah untuk bangun. Menurutnya ada beberapa orang berpakaian kumal atau kusut dengan membawa senjata tajam menangkap dirinya. Menurut penuturannya ada salah satu diantara orang PKI yang mengambil Al-Qur'an merobeknya serta diinjak-injak di lantai dengan berbagai umpatan yang terdengar ditelinga Anis Abiyoso sebelum diseret keluar masjid bersama peserta mental training yang lain se usai sholat shubuh (Abiyoso & Herfanda, 1995: 2).

Di era 1960-an gesekan antara massa pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan kelompok-kelompok penentangannya terus memanas. Tak jarang berujung bentrok antara kedua pihak. Saat PKI di atas angin, maka yang menindas lawannya adalah orang PKI. Saat angin politik berubah, massa antikomunis ganti membantai orang-orang PKI (Pusjarah TNI, 1999: 68).

Para santri dan Kiai diserang massa bersenjata ketika sedang melakukan sholat shubuh pada hari ketiga mental training di Kanigoro. Orang-orang yang menyerang tergabung dalam Partai Komunis Indonesia dan sejumlah organisasi sayap partai itu (BTI dan PR). Tragedi penyerangan besar-besaran oleh PKI kepada kalangan pesantren

untuk pertama kalinya di Kediri. Pelatihan kaderisasi atau mental training yang diadakan pelajar Islam Indonesia di Pondok Pesantren Al-Jauhar Desa Kanigoro Kecamatan Kras Kediri Jawa Timur. Pelatihan dilakukan ketika liburan karena sudah menjadi rutinitas kelompok itu setiap momen libur tiba (Emingahayu & Susanto, 2007: 40).

Pelatihan mental yang berisi kegiatan penguatan nilai keagamaan. Pada waktu yang bersamaan digelar pula pelatihan tingkat dasar dan training kepemimpinan. Pelatihan itu dimulai pada 9 Januari dan direncanakan berakhir pada 22 Januari 1965. Pesertanya terdiri dari 127 santri usia sekolah menengah atas. Pelatihan berhenti di tengah jalan.

Rabu tanggal 13 Januari 1965, Muawanah salah satu peserta training politik ini menceritakan awalnya ketika usai melaksanakan sholat shubuh, peserta training hendak mengikuti kuliah umum namun terdengar suara tembakan yang ternyata sebuah kode. Setelah bunyi tembakan, sekitar ribuan orang datang berbondong-bondong menyerang asrama putra dan putri serta masjid. Pintu asrama putri digedor. Ketika dibuka, para pria langsung menyerang masuk. Para penyerang lalu mengambil Al-Quran menginjak-injak, kemudian memasukkannya ke karung. Setelah itu para santri digiring keluar sambil diiringi umpatan kemarahan kader dan simpatisan PKI. Sebagian massa anggota PKI masuk ke masjid tanpa melepas alas kaki. Lantai masjid pun becek karena saat itu musim hujan. PKI juga menyerang rumah Kiai Jauhari, pengasuh Ponpes Al-Jauhar. Muawanah menyaksikan para kiai diseret keluar dan dianiaya, kemudian para keamanan ponpes dan peserta mental training dibawa ke kantor polisi kras dan digiring atau diculik. Panitia keamanan kala itu tak berdaya menghadapi aktivis dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) berpakaian hitam-hitam dengan jumlah mencapai ribuan orang pimpinan Suryadi yang langsung menyeruak ke dalam masjid membubarkan acara PII itu. Pada saat peristiwa itu terjadi, PKI telah menguasai seluruh pelosok Kediri bahkan pejabat pemerintahan, kepolisian dan tentara dikuasai oleh orang-orang dari partai pimpinan DN Aidit itu. Di Kanigoro sendiri perbandingan kalangan santri dengan orang komunis adalah 1:25. Sedangkan saat tragedi Kanigoro itu terjadi, memang PKI sedang giat-giatnya memberangus orang-orang masyumi. Kubu PKI ini melihat PII sebagai underbow dari Masyumi (Emingahayu & Susanto, 2007: 72).

BAB 6. DAMPAK KONFLIK PKI DAN PII UNDERBOW MASYUMI DI KANIGORO TAHUN 1965

Konflik PKI dan PII underbow Masyumi di Kanigoro Tahun 1965 tentu memiliki dampak setelah peristiwa ini terjadi, berikut peneliti membagi subbab pembahasan dikaji dari dampak Peristiwa ini dari secara Nasional dan dampak Peristiwa ini secara lokal.

6.1 Dampak Konflik PKI dan PII underbow Masyumi di Kanigoro Tahun 1965

secara Nasional

Dampak Konflik PKI dan PII underbow Masyumi di Kanigoro Tahun 1965 secara Nasional adalah munculnya isu agama yang membuat kemarahan umat Islam karena adanya isu-isu penghinaan agama. Respon ini tidak hanya dilakukan oleh umat Islam dalam regional lokal saja tapi di seluruh Indonesia. Protes keras yang terjadi setelah adanya isu penghinaan agama oleh PKI membuat umat Islam marah dan ingin mencari kebenaran bahwa Konflik PKI dan PII di Kanigoro apakah memuat unsur-unsur penghinaan agama. Dari kesaksian pihak PII yang terlibat langsung bahwa anggota PII melihat dengan sendirinya bahwa setelah kembali dari Kantor Polisi Kras untuk diperiksa mereka kembali ke tempat mental training banyak sekali barang-barang yang berserakan dan dihancurkan PKI termasuk Al-Quran (Abiyoso, 1995: 44), tetapi ada hal yang juga disangkal PKI terkait tudingan itu melalui surat kabar Harian Rakjat bahwa PKI tidak pernah melakukan pengrusakan kitab suci dan bukti adanya klarifikasi langsung dari Team PB Front Nasional Said Pratilakusuma yang melakukan peninjauan langsung ke Kanigoro, semua yang dituduhkan PII itu tidak benar sama sekali (Harian Rakjat, 1965: 2).

Pada pendapat Sari Emingahayu (2007) Peristiwa Kanigoro adalah Prolog dari G 30 S/PKI banyak hal-hal yang menjadi tanda tanya untuk dipecahkan dalam masalah hubungan antara kedua Peristiwa ini. Merujuk dari pendapat Asvi Varman adam bahwa dalang dari Gerakan 30 September adalah kontroversi peristiwa ini yaitu pembunuhan para Jenderal dini hari 1 Oktober 1965 sebenarnya bukanlah kudeta terhadap pemerintah, tetapi pada umumnya di Indonesia kejadian itu dilukiskan sebagai “percobaan kudeta yang gagal”. Sehingga ia meneruskan memakai istilah tersebut.

Sebagaimana diketahui paling sedikit ada 4 versi dalang peristiwa tersebut: a) PKI, b) klik Angkatan Darat, c) Soeharto, d) Soekarno.

Pakar Australia ini menampik pandangan Ben Anderson dan Ruth Mc Vey (yang kemudian dikenal sebagai Cornell Paper) yang mengemukakan tesis sementara bahwa PKI tidak memainkan peran apapun dalam perencanaan kudeta tersebut makalah Cornell beranggapan bahwa percobaan kudeta itu adalah suatu gerakan dari perwira yang tidak puas terutama dari Divisi Diponegoro melawan pimpinan tertinggi Angkatan Darat (Adam,2004: 120).

Harold Crouch tampaknya tidak setuju dengan hipotesis yang spekulatif dari Wertheim yang menekankan Soeharto adalah tokoh yang paling mendapat keuntungan dari konspirasi tersebut. Menurut Weirtheim, Sjam Kamaruzaman adalah intel Angkatan Darat yang disusupkan ke tubuh PKI bukan agen PKI yang bekerja di Angkatan Darat. Pada bagian lain Harold Crouch menulis bukti-bukti di pengadilan Mahmilub mengesankan bahwa sebenarnya para anggota komplotan tidak merencanakan pembunuhan terhadap para jenderal, Sjam dalam sidang perkaranya antara lain mengemukakan bahwa tujuannya adalah menahan para jenderal lalu menyerahkannya kepada Dewan Revolusi (Adam, 2004: 120-121).

Dalam menghindari spekulasi yang rumit peneliti menjelaskan dampak konflik PKI dan PII dalam rentang setelah G 30 S PKI secara nasional. Hubungan antar Peristiwa Kanigoro dan Peristiwa G 30 S PKI dan Peristiwa-Peristiwa lainnya yang terjadi pada tahun krisis politik 1965 memang berdampak luas setelah terkuaknya pembunuhan tujuh jenderal. Semua kalangan mulai dari Tentara hingga massa Islam mulai menggerakkan diri melakukan pembunuhan terhadap orang-orang PKI dan 'terduga' PKI. Termasuk di Kediri yang juga dijadikan lahan tempat pembunuhan PKI setelah terjadinya Peristiwa Kanigoro oleh Pemuda Ansor.

Setelah berlangsung begitu lama ketegangan ini, saat beberapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa Kanigoro ditangkap dan diadili karena memunculkan keriuhan di Kanigoro dan Kediri akhirnya beberapa bulan muncul kabar adanya konflik berdarah yang dimulai di Jakarta, ketika para jenderal diculik dan dibunuh, disusul oleh konfrontasi langsung antara dua kelompok perwira AD dan pasukan masing-masing di Ibukota. Tetapi setelah jeda sesaat darah merah segera mengalir dan menggenangi tanah di seluruh negeri. Jawa Tengah menjadi ladang pembantaian yang pertama; di propinsi

ini tentara melancarkan operasi-operasi militer. Tanpa perlawanan yang berarti tentara yang diujung tombak oleh RPKAD, memburu Aidit yang melarikan diri ke Jawa Tengah dan menumpas basis PKI yang tak siap disana. Laporan CIA menyatakan bahwa operasi tersebut berisiko terhadap prestise tentara (Sulistyo, 2000: 41).

Selama enam minggu tentara Indonesia terlibat dalam suatu gerakan besar melawan PKI. Anggota dan simpatisan PKI dikumpulkan dan ditawan oleh tentara; sementara yang lain dibersihkan dari berbagai posisi di pemerintahan daerah; dan di Jawa Tengah pengikut PKI dilaporkan ditembak di tempat oleh tentara. Tentara sangat mempertaruhkan prestise dan masa depan politiknya dengan gerakan ini. Tentara melarang dan melumpuhkan partai ini untuk selama-lamanya, tetapi sikapnya terhadap marxisme jauh lebih rumit daripada sekedar antikomunisme. Tentara tak hanya melancarkan operasi terhadap para pengurus PKI, melainkan juga terhadap anggota dan simpatisannya di Jawa Tengah (Sulistyo, 2000: 42).

Berbeda dengan operasi militer di Jawa Tengah dan kemudian di tempat-tempat lain di daerah-daerah dimana ketegangan sosial dan politik telah tercipta, dalam waktu dua hingga tiga minggu setelah peringatan HUT ABRI pada 5 Oktober 1965, korban mulai berjatuhan akibat konflik antarpenduduk yang sempat terhenti sementara oleh Peristiwa Gestapu, Pembunuhan baik dalam bentuk operasi militer atau konflik sipil terjadi hampir di seluruh negeri dengan jumlah korban di tiap propinsi berbeda. Sejak jatuhnya korban pertama muncul masalah interpretasi. Hingga saat ini tidak mungkin disimpulkan faktor-faktor penyebab dan siapa yang harus bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut secara berimbang. Analisis PKI menyatakan bahwa pembunuhan tersebut adalah hasil dari perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Jenderal Nasution yang dapat ditafsirkan sangat luas, yang kurang lebih memerintahkan untuk membasmi kaum komunis hingga ke akar-akarnya dan harus diambil tindakan terhadap siapapun yang dicurigai terlibat langsung maupun tidak langsung dalam Gerakan 30 September. Berdasarkan perintah-perintah inilah pembunuhan massal dilakukan. Apakah pengadilan sependapat dengan PKI bahwa Jenderal Nasution harus bertanggung jawab atas pembunuhan massal ini ? (Sulistyo, 2000: 42).

Berbagai laporan yang belum diverifikasi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali sebagian wilayah di Jawa Barat, berbagai daerah di Sumatra, seluruh propinsi di Kalimantan dengan jumlah korban terbesar di Kalimantan Selatan, sebagian Sulawesi

dan pulau-pulau luar di Jawa Lainnya, mengungkapkan jumlah korban yang sangat besar. Sangat sulit menarik kesimpulan yang memuaskan mengenai jumlah korban yang terbunuh dalam aksi pasca-Gestapu. Pada awal Desember 1965, sebuah tim dari AD secara resmi menyimpulkan bahwa jumlah korban terbunuh di seluruh Indonesia 78.000 orang, padahal pembunuhan masih berlangsung hingga sekitar setahun kemudian. Perkiraan jumlah korban sangat bervariasi, mulai dari yang paling kecil sebesar 78.000 jiwa hingga yang paling tinggi dua juta. Jumlah korban umumnya diterima berkisar antara 500.000 hingga 600.000 jiwa. Setiap perkiraan jumlah korban membawa muatan politik tersendiri (Sulistyo, 2000: 43).

Beberapa fakta berikut ini menambah keruwetan. Pertama tidak ada statistik sensus regional (apalagi lokal) yang dapat dibandingkan, misalnya antara periode menjelang dan setelah peristiwa Gestapu. Para pemimpin daerah yang masih hidup setelah periode yang bergejolak itu biasanya mengecilkan atau membesarkan jumlah korban. Ada juga kemungkinan para pemimpin yang masih hidup itu memanipulasi statistik untuk menyingkirkan musuh-musuh lokalnya, terlepas dari afiliasi politik mereka. Kedua tidak ada catatan tentang perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, atau dari satu propinsi ke propinsi lain. Perkiraan jumlah korban terbunuh yang paling rendah mungkin ditarik dari catatan jumlah korban yang sesungguhnya. Sebaliknya perkiraan yang paling tinggi mungkin didasarkan pada jumlah orang yang hilang, termasuk orang yang pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain dan perhitungan ganda atas mayat yang ditemukan, sekali lagi tidak ada statistik yang bisa dipercaya tentang perkiraan jumlah korban di seluruh Indonesia (Sulistyo, 2000: 44). Berikut adalah beberapa catatan perkiraan jumlah korban dapat dilihat di tabel dibawah ini.

Sumber	Perkiraan Jumlah Korban
Nasional	
Adam Malik	160.000
Anderson	500.000-1.000.000
Anderson dan McVey	200.000
Brackman (dalam angka yang masuk akal)	150.000
Brackman	70.000
Caldwell dan Utrecht	500.000

Contenay	100.000-200.000
Dahm	200.000
The Economist	1.000.000
Komisi Pencari Fakta	78.000
Anggota Komisi	780.000
Feith	150.000
Frederick	750.000
Fryer dan Jackson	100.000-500.000
Grant	200.000-300.000
Henderson	200.000-400.000
Hughes	200.000
Kirk	150.000
Kopkamtib	1.000.000
Legge	250.000
Lyon	200.000-500.000
Mellor	2.000.000
Mody	500.000-1.000.000
Moser	400.000
Neil	750.000
The New York Times	150.000-400.000
The New York Times Magazines	300.000
Paget	100.000-300.000
Palar	100.000
Palmier	200.000
Politbiro PKI yang dikelompokkan kembali	200.000
Pluvier	500.000-1.000.000
Polomka	150.000-300.000
Repression and Exploitation	500.000-1.000.000
Ricklefs	500.000
Robinson	500.000-1.000.000
Sievers	200.000-400.000
Sloan	300.000

Sudisman	(lebih dari) 180.000
Laksamana Sudomo, Pangkopkamtib	450.000-500.000
Soekarno	87.000
Sullivan	300.000-500.000
Tornquist	100.000-1.000.000
Turner	300.000-600.000
Kedutaan Amerika	300.000 atau kurang
Vittachi	300.000-500.000
The Washington Post	500.000
Wertheim	400.000
Bali:	
ABRI	40.000
Para Pemimpin Bali	100.000
Anggota Misi Pencari Fakta	100.000
Soe Hok Gie	80.000
Robinson	40.000-100.000
Sudisman	50.000
Wertheim	100.000
The New York Times	100.000-150.000
Jawa Tengah	
Hughes	100.000
Sudisman	70.000
Jawa Timur	
Seorang Jenderal AD (dalam Hughes, hlm. 188)	100.000
Sudisman	60.000
Jombang	
RA (Algojo)	2.000-5.000
Studi ini	3.000-3.500

Kediri

SS (Algojo)		20.000
	“operasi teratur”	15.000
	“operasi tidak teratur”	5.000
Studi ini		8.256-13.760

Sumber : (Sulistyo, 2000: 45-46)

Beberapa fakta berikut ini menambah keruwetan, tidak adanya statistik sensus regional (apalagi lokal) yang dapat dibandingkan, misalnya antara periode menjelang dan setelah Peristiwa Gestapu. Para pemimpin daerah yang masih hidup setelah periode yang bergejolak itu biasanya mengecilkan atau membesarkan jumlah korban. Ada juga kemungkinan para pemimpin yang masih hidup itu memanipulasi statistik untuk menyingkirkan musuh-musuh lokalnya, terlepas dari afiliasi politik mereka. Di Kediri khususnya sekitar Kanigoro setelah Gestapu berakhir terjadi pembantaian habis-habisan oleh Massa Islam terhadap PKI untuk menghilangkan jejak PKI di Kediri. Dalam data CIA yang ada di lampiran pembunuhan atau pembantaian besar-besaran terjadi sesaat setelah gencaran pembubaran PKI dan Massa Islam di Kanigoro juga membalaskan perlakuan PKI saat Januari ada training politik di Kanigoro. Data CIA dapat dilihat di *Lampiran 2*.

6.2 Dampak Konflik PKI dan PII underbow Masyumi di Kanigoro Tahun 1965 secara Lokal

6.2.1 Di Kediri

Kabupaten / Kota Kediri merupakan daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur yang mayoritas penduduknya bersuku Jawa. Orang Suku Jawa di Kediri lebih cenderung inklusif, dinamis dan sedikit kasar pembawaannya. Hal ini sangat berbeda dengan orang suku jawa di Jawa Tengah atau Yogyakarta yang agak kalem dan dikenal lebih tenang dalam menghadapi suatu hal. Tipikal orang Kediri yang berbeda menjadikan karakter serta sikap dasar yang kemudian membawa implikasi-implikasi tertentu terhadap aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan masyarakat

Kediri. Konflik PKI dan PII di Kanigoro berdampak pada tempat disekitarnya dari dinamika politik yang ada. Semua orang yang terlibat dalam kejadian ini juga merasakan bagaimana kekisruhan politik baik sebelum atau sesudah peristiwa ini terjadi (Susanto & Emingahayu, 2007: 71).

Dalam perspektif lokal, regional yang terjadi hanya di sekitar Kanigoro hal ini peristiwa ini dapat dilihat dari kacamata sejarah lokal namun bukan hanya semata konflik PKI dan PII ini terjadi tidak memiliki dampak yang luas karena ditengarai peristiwa ini juga karena memiliki pengaruh politik nasional. Hal ini dikatakan oleh Abiyoso di bukunya bahwa memanglah benar Peristiwa Kanigoro dianggap sebagai awalan Peristiwa besar G 30 S/PKI. Orang-orang PKI yang terprovokasi oleh pemimpinnya DN Aidit bahwa peristiwa-peristiwa regional termasuk Kanigoro adalah suruhan dari elit-elit politik dan musuh mereka yaitu TNI AD. Sudah disebutkan pula bahwa AH Nasution juga memberikan perintah kepada elit-elit PII underbow Masyumi untuk mengencarkan training politik di basis-basis PKI termasuk Kanigoro.

Kemudian dilihat dari sejarah lokal, peristiwa ini hanya terjadi di satu desa. Bertepatan di Kanigoro Kecamatan Keras Kabupaten Kediri. Alurnya pun diketahui bahwa sejarah yang terjadi dalam satu tempat dalam cakupan sempit dinamakan sejarah lokal tetapi melihat dari latar belakang serta jalannya peristiwa Kanigoro dengan menggunakan kesaksian Anis Abiyoso kejadian inti memang terjadi di desa Kanigoro namun seperti penangkapan Abiyoso sampai pelariannya dari kota satu ke kota yang lain serta latar belakang terjadi peristiwa kanigoro masih erat kaitannya dengan cakupan nasional karena melibatkan pihak partai politik yang besar pada saat itu yaitu tahun 1965.

Berita-berita di surat kabar, ditambah dengan brosur-brosur yang kami sebar, telah membuat umat Islam di seluruh Indonesia marah. Mereka melakukan aksi-aksi dan demonstrasi. Ormas-ormas Islam juga mendukung aksi-aksi balik melawan PKI. Dalam berbagai aksi di Jawa Timur, misalnya juga tampak para pemuda Anssor, IPNU/IPPNU dan IPM. Pertentangan ideologis antara Islam dan Komunis pun menajam dan memanas. Di mana-mana umat Islam dalam keadaan siap tempur melawan PKI.

Aksi teror PKI pun ternyata tak terbatas di Kanigoro saja. Mereka melakukan teror di banyak tempat, ribuan orang PKI membat dan menghancurkan sawah-sawah milik orang Islam yang hampir panen di Gontor. Sawah wakaf milik Pondok Pesantren

Gontor hancur total. PKI juga melakukan perampokan terhadap banyak orang Islam, melakukan pembunuhan dan menganiaya beberapa ulama. Tetapi kasus Kanigoro agaknya menjadi bumerang bagi PKI. Arus perlawanan umat Islam makin besar setelah teror itu (Abiyoso & Herfanda, 1995: 49).

Kasus Kanigoro agaknya benar-benar memaksa pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih khusus terhadap pertentangan antara umat Islam dan PKI. Pemerintah Pusat dan Front Nasional segera membentuk Tim Khusus yang terdiri atas Tim Resmi dan Tim Tidak Resmi. Sebuah surat kabar Jakarta menulis bahwa Tim Resmi dipimpin oleh Kolonel Said Pratilakusuma, S.H. Wakil Sekjen Front Nasional. Tim ini bersama Pemerintah Daerah Jawa Timur bertugas mengumpulkan fakta-fakta memeriksa tempat kejadian dan memeriksa para pelaku teror Kanigoro.

Sedangkan Tim Tidak Resmi terdiri atas beberapa tokoh Nasakom. Bahkan ada ulama Nasakom yang menjadi anggota. Tim ini mendatangi pesantren-pesantren, ulama-ulama, serta mengadakan beberapa kali pertemuan dengan orang-orang PII dan Dipowardoyo. Intinya tim ini meminta kita untuk menghentikan perlawanan terhadap PKI dan mempercayakan semuanya kepada Pemerintah. Secara khusus tulis sebuah surat kabar pusat, Presiden Soekarno meminta kepada anggota front nasional untuk dapat meredam dan menghentikan segala bentuk pertentangan, terutama antara umat Islam dan Komunis, yang dianggap membahayakan kehidupan bangsa. Maka dibuatlah Deklarasi Persatuan dan Kesatuan yang ditandatangani oleh pimpinan partai-partai dan ormas-ormas yang menjadi anggota Front Nasional. Deklarasi ini kemudian dikenal dengan Deklarasi Bogor (Abiyoso & Herfanda, 1995: 50).

Keras, 29 Januari 1965, sejak pagi truk-truk penuh massa Islam menderu jalan-jalan menuju kota kecamatan itu. Tapi ratusan aparat keamanan mencegat truk-truk itu, hingga tak bisa masuk Keras. Sebuah aksi besar melawan PKI sepakat mereka lakukan hari itu. Mereka sepakat untuk berkumpul sekitar pukul 10.00, di halaman sebuah sekolah, sekitar satu kilometer sebelah utara kantor polisi Keras. Dari sinilah aksi akan mereka mulai menuju kantor polisi itu dan keliling Kota Keras (Abiyoso & Herfanda, 1995: 32).

Tapi agaknya aparat keamanan telah mencium rencana tersebut. Sampai pukul 10.15 baru sedikit massa yang berkumpul dengan membawa berbagai poster dan bendera merah putih. Tampak pula beberapa tokoh PB PII dipimpin ketua umumnya,

Syarifuddin Siregar Pau. Sejak malam kota kecil Keras, bahkan Kediri, memang benar-benar seperti dalam suasana perang. Massa Islam, dimana-mana. Orang-orang bersenjata pedang, bambu runcing, belati, kelewang, tampak berjalan-jalan waspada atau duduk-duduk menggerombol di mana-mana. Suasana terasa sepi, tapi mencekam. Semuanya seperti menanti, apa yang bakal terjadi (Abiyoso & Herfanda, 1995: 33).

Suasana penuh kewaspadaan itu bahkan bertahan semalam suntuk, sampai pagi, sampai menjelang aksi besar dimulai. Tapi ada kabar orang-orang PKI sudah melarikan diri atau mengungsi dari Keras. Agaknya mereka merasa keder juga melihat situasi yang makin memanas. Dengan berbagai cara mereka ‘menghilang’ bahkan banyak yang sudah mengungsi bersama seluruh keluarganya. Penantian mereka tak sia-sia, sekitar pukul 13.00 sekitar 10.000 massa Islam berkumpul di halaman sekolah itu. Agaknya dengan berbagai cara mereka berhasil menerobos barikade aparat keamanan. Mereka menyelip dan menerobos jalan-jalan kampung dengan berjalan kaki sejauh sekitar 20 km. Banyak juga yang naik motor, naik kendaraan umum, atau mencegat truk lain yang kebetulan lewat (Abiyoso & Herfanda, 1995: 32-33).

Alun-Alun Kediri di seberang selatan Masjid Agung menjadi semacam Ikada kala apel akbar Banser/Ansor NU dan ormas-ormas lainnya yang sokong 100 persen tentara digelar. Kronik penyembelihan besar-besaran terhadap siapa pun yang terkait dengan aktivitas Partai Komunis Indonesia (PKI) dimulai dari sini. Banser adalah nama lain dari Ansor, sayap pemuda dari NU (Dahlan, 2020: 51).

Matari sepenuhnya telah jatuh dari cakrawala saat saya memarkir tunggangan di halaman Masjid Agung, sekira 16 kilometer dari Kanigoro. Ekor dari azan baru saja berlalu dan puluhan orang berduyun-duyun menyeberangi jalan utama yang membelahi Alun-Alun Kota dan Masjid Agung.

Di tangga masjid, setelah berwudhu, saya menuang air mineral ke kerongkongan untuk mengibasi haus. Di tangga masjid itu juga pandangan saya bebas berhadapan dengan Alun-Alun Kota. Di Alun-Alun Kota itu, lampu-lampu berkelap-kelip di taman yang mirip “pasar malam” terakhir menjelang lebaran. Lampu-lampu itu menandai kemeriahan, kegembiraan dan sekaligus memungkasi konsumsi besar-besaran di pengujung Ramadan.

Mungkin menjadi aneh dan asing di saat malam kegembiraan dan kemenangan dirayakan di Alun-Alun itu saya justru dicumbu kenangan murung yang pernah melekat

dan berlangsung ekstensif dari Alun-Alun Kota ini. Ada kemarahan besar, duka besar, pembunuhan besar-besaran berlangsung semeriah malam takbiran Ramadan menyambut syawal ini. Bukan sekarang, bukan tahun kemarin, tapi masa berpuluh tahun yang silam di mana kenangan padanya lambat-lambat saja dalam memori. Peristiwa geger politik, malapetaka kemanusiaan, tepat setelah September lewat, dan Oktober masuk separuh jalan di tahun 1965. Di Alun-Alun Kota itu Ansor dan semua ormas Islam yang sepaham yang disokong pesantren menggelar apel besar. Sebelumnya, ormas-ormas ini berkonsolidasi dengan Korem 081 untuk menentukan sikap atas PKI dan *bromocorah-nya* (Dahlan, 2020: 78).

Pada tanggal 13 Oktober pagi itu, bergantian Bupati, Kodim, hingga tokoh-tokoh agama dari NU dan Masyumi, kiai dari Lirboyo menyampaikan tausiah yang memberi latar mengapa apel besar ini harus ada. Dan tentu saja jangan dilupa pemimpin operasi penjagalan dari pesantren Lirboyo, Maksu Jauhari, berpidato berapi-api untuk mengubur PKI dan semua organisasi pendukungnya seperti Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Ikatan Pemuda dan Pelajar Indonesia, Serikat Buruh Seluruh Indonesia dari bumi Kediri (Dahlan, 2020: 78-79)..

Selain soal bahwa Maksu Jauhari adalah pendekar dengan ilmu beladiri yang tinggi, penunjukannya sebagai operator penjagalan juga disebabkan bahwa pesantren orangtuanya yang digeropyok PKI di Kras, Kanigoro di awal tahun yang tentu saja membibitkan dendam yang berlarat-larat. Kanigoro adalah luka atas kenangan yang pahit saat pesantrennya digeruduk ratusan orang dari BTI dan Pemuda Rakyat yang dipimpin Suryadi dan Harmono. Hari-hari berikutnya setelah penggeropyokan itu pawai-pawai balasan dilakukan Banser yang dipimpin Maksu Jauhari dan juga kader-kader PII. Sementara Anis Abiyoso sejak peristiwa penggeropyokan Kanigoro mengobar-ngobarkan sentimen bahwa PKI menghina Islam dari kota ke kota di Jawa Timur yang membikin darah siapa pun mendidih.

Benar kata Kiai Makhrus Ali bahwa tanggal 13 adalah hari sial bagi PKI. Pada tanggal 13 Oktober—tanggal yang diusulkan Kiai Makrus untuk apel akbar itu—adalah tonggak pembunuhan besar-besaran. Banser/Ansor diplot menjadi imam pembantaian dengan ribuan santri dikerahkan untuk “menyekolahkan” orang-orang PKI. Militer di barisan kedua yang menyuplai logistik-logistik pembunuh yang diperlukan.

Hal yang membuat bulu kuduk saya meremang saat kata-kata terakhir meredup dari Alun-Alun dan peserta pawai digiring ke jalan-jalan melakukan penjemputan nama-nama orang-orang PKI dari rumah ke rumah, di seluruh jalanan kota. Inilah hasil nyata dari pertemuan rutin antara Ansor, GPII, dan militer sebelum-belum apel akbar ini yang diwakili Toyib Dahlan, Ma'fufin, Safii Sulaiman, Maksum Jauhari, H Idris, Makhrus Aly, serta sejumlah nama lain.

Kenangan atas penggambaran Hermawan Sulistyو dalam disertasinya di Arizona State University tentang pembantaian massal di Kediri dan Jombang melayang-layang kembali. Halaman-halaman disertasi yang dibukukan dengan judul *Palu Arit di Ladang Tebu* itu membuka dengan suasana yang lain sama sekali ketika saya membacanya di Yogyakarta, di luar kawasan di mana cerita itu digali dan dituturkan. Saat Sulistyو berbicara tentang Alun-Alun Kota sebelum senja saat saya duduk di sini, saya tak merasakan apa-apa (Dahlan, 2020: 80).

Berbeda dengan malam lebaran ini. Alun-Alun Kota yang disebut Sulistyو mendapatkan bobot karena letaknya hanya sekelebatan mata. Ya, di sana, 50 meter dari tempat saya duduk ini, saat ribuan massa yang diimami Banser/Ansor bergerak secara teratur dan sistematis melakukan pawai pembantaian atas nama Tuhan dengan rute yang sudah disusun.

Rumah pertama yang dihancurkan oleh pawai pembantaian ini adalah kantor Ranting PKI yang memang letaknya di dekat alun-alun, lalu massa berarak ke markas PKI yang berada di Pasar Paing, Burengan, yang ditengarai sebagai markas pengonsolidasian PKI untuk membunuh musuh-musuh ideologisnya. Silaturahmi berdarah seperti di hari pertama lebaran ini menggerebek markas CSS PKI di Jl Gudang Garam. Kantor SOBSI, Gerwani, BTI juga disowani dan dibakar. Silaturahmi berdarah di hari pertama “sukses” membunuh 24 orang PKI dan ribuan sepeda menjadi bara.

Merasa tak ada perlawanan sama sekali dari PKI, di hari keempat militer menangkapi 40 ribu kader dan simpatisan PKI. Namun kendala segera menyergap di depan mata, tentara tak ada uang untuk memberi makan tahanan yang begitu banyak. Saat itulah Sja'fii Sulaeman dari Ansor mengusulkan jalan keluar yang paling mudah: bunuh semuanya. Ini “operasi teratur”. Artinya, secara teratur sekira 15 ribu orang diserahkan pada algojo-algojo yang sudah disiapkan yang terdiri atas pendekar-pendekar dari Banser/Ansor dan serdadu tentu saja (Abiyoso & Herfanda, 1995: 88).

Mayat-mayat itu kebanyakan ditinggal begitu saja, dibuang ke jurang-jurang terdekat. Namun tempat paling favorit tentu saja dibuang ke Sungai Berantas. Tubuh-tubuh tanpa kepala yang mengapung tiap hari di bantaran sungai antara Oktober-November menjadi lagu sumbang paling memilukan dari sebuah kota tua Nusantara.

Sungai Berantas itu hanya beberapa meter dari tempat saya duduk kini, tempat saya menuliskan kenangan bisu yang sukar dinalar bagaimana itu bisa terjadi dengan dilambiri semangat dan titah atas nama Tuhan dari institusi-institusi keagamaan. Perburuan dan penyembelihan itu berlangsung di kota dan merembet di kecamatan-kecamatan, ke desa hingga perbukitan dan lereng-lereng gunung yang menyebabkan Kediri penyumbang jumlah korban pembunuhan terbanyak dan juga penyeter terbesar tahanan di seantero Jawa Timur. Oktober 1965 hingga Agustus 1966 menjadi lini masa bagaimana teater pembantaian dilangsungkan dengan sukacita. Dan itu mula-mula dimulai dari sini, dari Alun-Alun Kota di mana warga Kediri memungkasi konsumsi belanjanya menyambut syawal keesokan harinya (Emingahayu & Susanto, 2007: 61)..

Teater pembantaian itu, kini, seperti tak ada tersisa gemanya di Alun-Alun Kota ini. Seperti hanya ada dalam dongengan cerita pewayangan. Padahal, algojo dan mesin pembantai itu ada, di sini, dan tenang-tenang saja seperti keluarga dewata yang tak tersentuh hukum buatan siapa pun di mayapada setelah melakukan pembunuhan besar-besaran.

6.2.2 Di Jawa Timur

Dampak Konflik PKI dan PII di Kanigoro Kediri Tahun 1965 di Jawa Timur adalah ketika Dalam rangka menguji strategi untuk melemahkan kekuatan TNI-AD di daerah Kodam VIII/Brawijaya, Rustomo, Ketua Biro Khusus PKI Jawa Timur pada bulan Juni 1965 melapor kepada Sjam Kamaruzaman di Jakarta tentang beberapa anggota TNI-AD yang dapat didaerah Jawa Timur (Mortimer, 2011: 41).

Pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Agustus 1965 Rustomo pergi ke Jakarta menghadiri rapat atas panggilan Ketua Biro Khusus PKI Pusat. Dalam rapat yang dihadiri pula oleh Pono dan Bono tersebut. Rustomo menerima instruksi agar segera membentuk Komando Kesatuan di tingkat Propinsi dan tempat lain yang dipandang perlu. Tujuannya agar dapat memproduksi dan menggerakkan kesatuan TNI-AD yang telah dibina, menentukan obyek vital yang menjadi sasaran, dan

mengadakan pemilihan oknum di lingkungan TNI – AD yang pro dan kontra terhadap program PKI (Mortimer, 2011: 41-42).

Selanjutnya pada bulan September 1965 dengan mengambil tempat di rumah Soma, Wakil Ketua Biro Khusus PKI Jawa Timur, Rustomo mengadakan pertemuan dengan petugas Biro Khusus PKI Jawa Timur. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meneruskan instruksi Ketua Biro Khusus Pusat guna menyusun Komando Kesatuan Propinsi. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Soma, Slamet, Sama'un dari Besuki, Abdul Syukur dan Adji dari Malang, Sabdo dan Teguh dari Madiun (Cribb, 1990: 55). Susunan Komando Kesatuan Propinsi Jawa Timur yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

1. Rustomo sebagai Ketua
2. Soma sebagai Anggota
3. Kapten Sumbodo sebagai anggota
4. Pembantu Letnan Satu Sudono sebagai anggota
5. Pembantu Letnan Dua Sutrisno sebagai anggota (Pusjarah TNI, 2008: 31).

Dalam kesempatan itu, Rustomo menginstruksikan kepada Slamet, Sama'un agar menghubungi Kapten Parikesit di Jember dan Mayor Djangkung di Bondowoso untuk menyiapkan dan menggerakkan kesatuannya jika sewaktu-waktu gerakan PKI dimulai. Sedangkan Sudarno diberi tugas menghubungi Letnan Satu Ngadimo di Madiun. Soma ditugasi untuk menghubungi Kapten Sumbodo, Pembantu Letnan Satu Sudono, dan Pembantu Letnan Dua Sutrisno untuk merencanakan gerakan di Surabaya (Pohlman, 2013: 12).

Sebagai tindak lanjut instruksi tersebut di atas, Rustomo kemudian mengadakan rapat di rumah Kapten Ali Kustomo. Rapat tersebut dihadiri oleh Kapten Sumbodo, Soma, Mayor Djangkung, Pembantu Letnan Satu Sudono, Letnan Dua Israwan dan Misloha. Tujuan rapat adalah untuk membahas pematangan rencana yang disusun, dan mempersiapkan pelaksanaan gerakan bersenjata di daerah Madiun, Malang, Jember dan Surabaya. Kepada masing-masing diminta kesediaannya untuk mengizinkan sebagian dari pasukannya membantu gerakan di Surabaya bila tiba saatnya (Purwanta, 2016: 14).

Pada tanggal 22 September 1965, Rustomo mendapat tugas dari Ketua Biro Khusus Pusat di Jakarta yang isinya :

1. Mempertegas instruksi Biro Khusus Pusat yang terdahulu.
2. Mengenai saat dimulainya gerakan bersenjata, supaya daerah selalu mengikuti siaran RRI Pusat.
3. Agar menyusun tim yang bertugas :
4. Menyusun Dewan Revolusi
5. Menghadap Pangdam VIII/Brawijaya pada saat gerakan dimulai
6. Membuat pernyataan mendukung Dewan Revolusi
7. Menguasai gedung-gedung vital setelah gerakan di mulai, seperti Markas-markas Komando Militer, RRI, Kantor Telegram dan Telepon, stasiun-stasiun kereta api, gedung-gedung resmi pejabat pemerintah dan penangkapan terhadap pejabat-pejabat penting, antara lain Gubernur Wijono (Pusjarah TNI, 2008: 31).

Dalam rangka meneruskan instruksi Ketua Biro Khusus Pusat tersebut di atas, maka dalam bulan September 1965, Rustomo mengadakan pertemuan dengan Soma, Kapten Sumbodo, Mayor Djangkung, Letnan Satu Ngadino, Letnan Dua Israwan, Pembantu Letnan Satu J. Ngaidi dan Susman bertempat di rumah Letnan Satu Ngadino di Malang (Cribb, 1990: 45). Selesai rapat, Rustomo memerintahkan Soma untuk melaksanakan tugas khusus sebagai berikut :

1. Selain mendengar siaran RRI Pusat tentang gerakan yang dilakukan di Jakarta, agar segera menghadiri rapat di rumah Kapten Ali Kustomo di Surabaya guna menerima perintah-perintah pelaksanaan gerakan.
2. Menyusun tim yang akan menghadapi Pangdam VIII/ Brawijaya dalam rangka memperoleh dukungan terhadap Dewan Revolusi (Zurbuchen, 2002: 12).

Sebagai realisasi instruksi Rustomo tersebut di atas, maka pada tanggal 27 September 1965 Soma mengadakan rapat di rumah Sugito di Surabaya yang dihadiri oleh Kapten Kasmijan, Pembantu Letnan Satu Sudono, Kapten Sumbodo, Surjatmin, Pembantu Letnan Satu Suradi dan Gatot Sutarjo (Zurbuchen, 2002: 12-13). Keputusan hasil rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kapten Sumbodo dan Kapten Samidjan ditugaskan menghadap Pangdam VIII/Brawijaya untuk minta kesediaannya mendukung Dewan Revolusi.
2. Pembantu Letnan Satu Sudono ditugaskan untuk membuat teks-teks pendukung Dewan Revolusi dan mengumumkannya melalui Studio RRI Surabaya (Zurbuchen, 2002: 13).

Pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 09.00 setelah mendengar siaran RRI Pusat saat dimulainya “Gerakan 30 September”, Rustomo segera memanggil Soma, Kapten Sumbodo, Pembantu Letnan Satu Sudono, dan Pembantu Letnan Dua Sutrisno untuk rapat di rumah Kapten Ali Kustomo di Surabaya. Sebelum Rustomo datang di tempat rapat, ia telah bertemu dengan Ketua Umum DPP SOBSI, M. Munir, yang diperintahkan oleh D.N. Aidit untuk membantu Rustomo dalam pelaksanaan Gerakan PKI di Jawa Timur. Dalam rapat tersebut Rustomo memerintahkan Soma untuk mengirim kurir yaitu Sunarjo, Sardi dan Sutarto untuk menemui petugas Biro Khusus PKI Malang, Jember dan Madiun agar segera melaksanakan gerakan bersenjata di daerah masing-masing. Di samping itu Rustomo juga memerintahkan Pembantu Letnan Satu Sudono untuk menyusun teks dukungan terhadap “Gerakan 30 September” dan mengumumkan melalui Studio RRI Surabaya. Pengumuman tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 13.30 melalui Studio RRI Surabaya yang telah dikuasai oleh Pembantu Letnan Satu Sudono sendiri dengan dikawal oleh Kapten Kasmijan bersama pasukan bersenjatanya. Sedangkan tim yang akan menghadap Pangdam VIII/Brawijaya tidak terlaksana, berhubung waktu itu Pangdam sedang berada di Jakarta. Di samping itu kesatuan yang diharapkan datang dari luar Surabaya ternyata tidak datang (Schaefer, 1965: 56).

Setelah pada tanggal 3 Oktober 1965 mengetahui bahwa Gerakan 30 September telah ditumpas oleh operasi ABRI di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto, Rustomo dan kawan-kawan menyadari rencana gerakannya telah gagal. Oleh karena itu pada tanggal 6 Oktober 1965 Rustomo selaku Wakil Sekretaris CDB PKI Jawa Timur mengadakan rapat khusus CDB PKI Jawa Timur yang dihadiri oleh Ruslan Widjajasastra, M. Munir, Suwandi (Ketua CDB- PKI Jawa Timur), HS. Sardi, Gatot Sutarjo, Karman, Manalu dan Djais (Memorandum of Conversation, 1965: 1). Dalam rapat itu dibahas masalah kegagalan di Jawa Timur dan sebagai tindak lanjut gerakan mereka, maka diambil keputusan sebagai berikut :

- Menggerakkan massa PKI yang berada di Surabaya untuk menjaga Kantor CDB PKI dan kantor lainnya dari serbuan golongan agama.
- Mengirim delegasi untuk menghadap pejabat-pejabat Pemerintah Daerah guna mencari jalan keluar dalam upaya mengatasi situasi yang semakin tegang (Memorandum of Conversation, 1965: 1).

Usaha PKI itu tidak satupun yang berhasil dilaksanakan. Sedangkan satuan-satuan Kodam VIII/Brawijaya yang diikuti oleh massa mulai mengambil tindakan terhadap orang-orang PKI. Melihat situasi demikian, Rustomo dan kawan-kawannya segera menyelamatkan diri (Pusjarah TNI, 1965: 45).

Banyak yang telah ditulis tentang pembunuhan yang terkait dengan apa yang disebut Gerakan 30 September. Suatu badan kerja yang tumbuh telah muncul yang menggambarkan pengalaman orang-orang yang sering tidak bersalah yang mati atau menderita ketidakadilan saat itu. Proyek ini terinspirasi oleh karya para cendekiawan sebelumnya dan para korban dan anggota keluarga mereka yang, meskipun mendapat tekanan besar untuk tetap diam selama dan bahkan setelah Orde Baru, berani menceritakan kisah mereka.

Catatan didapatkan oleh dua tempat. Pertama, besarnya pembunuhan, diperkirakan 500.000 orang, cukup besar sehingga harus terlihat dalam data demografis. Dan kedua, kehadiran sensus dari sebelum dan sesudah pembunuhan harus memungkinkan perkiraan perubahan populasi yang terkait dengan pembunuhan di provinsi-provinsi yang terkena dampak terburuk.

Latihan semacam itu seharusnya memungkinkan kita untuk mengkonfirmasi banyak aspek dari peristiwa yang dicitrakan oleh mereka yang telah menulis tentang mereka. Sama pentingnya, proyek semacam itu memiliki potensi untuk mengungkapkan atau menekankan fenomena penting yang mungkin tidak diketahui dalam catatan sebelumnya, yang sebagian besar menggunakan sumber informasi selain data sensus.

Infografis yang disajikan di sini datang dengan dua peringatan penting. Pertama, perkiraan perubahan populasi yang terkait dengan pembunuhan di beberapa kecamatan mungkin tidak akurat karena asumsi yang mendasari perhitungan kemungkinan tidak berlaku seragam di semua kecamatan.

Kedua, perkiraan mencakup perubahan populasi, yang merupakan kombinasi dari perubahan satu kali dalam kematian, migrasi, dan kelahiran daripada kematian

saja. Di daerah di mana kekerasan itu paling parah, orang akan mengharapkan perubahan dalam ketiga fenomena ini bertambah dalam arah yang sama – daerah yang rawan kekerasan cenderung melihat peningkatan kematian, peningkatan migrasi keluar dan kesuburan tertekan.

Meskipun peringatan ini, seperti yang ditunjukkan oleh infografik dan penelitian dasar, pola-pola yang muncul ketika suatu provinsi dipandang sebagai suatu keseluruhan yang meyakinkan dan umumnya sejalan dengan apa yang telah ditulis tentang pembunuhan. Sebagai akibatnya, fenomena baru yang diungkapkan oleh latihan-latihan ini juga cenderung mencerminkan fenomena nyata di lapangan selama periode yang penuh gejala ini.

Kedua infografis yang disajikan di sini berfokus pada Jawa Timur di mana pembunuhan, bagaimanapun, memakan korban besar. Infografis Gambar dapat dilihat di *Lampiran 5*.

Infografis pertama adalah peta kecamatan Jawa Timur yang menunjukkan perkiraan kerugian dalam populasi terkait dengan pembunuhan bersama dengan peringkat sepuluh kecamatan yang mengalami kerugian satu kali terbesar dan peningkatan populasi. Pembaca yang memiliki pengetahuan tentang pembunuhan akan segera mengenali hot spot untuk hilangnya populasi di Kediri. Gambar dapat dilihat di *Lampiran 5*.

Infografis kedua, yang merangkum sebuah makalah yang muncul di jurnal Indonesia, mengaitkan perkiraan dalam infografis pertama dengan Operasi Trisula, di mana Angkatan Darat Indonesia 'menghancurkan' apa yang tersisa dari kepemimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI). Gambar bisa dilihat di *Lampiran 5*.

Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk yang bertambah bertepatan dengan lokasi yang diidentifikasi oleh intelijen Angkatan Darat Indonesia sebagai lokasi pengelompokan ulang untuk kepemimpinan PKI setelah pembunuhan 1965-66.

Selain petunjuk tentang lokasi di mana kekerasan mungkin diucapkan secara khusus atau tempat sejumlah besar pengungsi melarikan diri, sebuah pola penting yang diungkapkan oleh perhitungan kami adalah sebuah fenomena sistematis dari pencarian pengungsian di markas PKI terpencil di pantai selatan. Jawa Timur.

BAB 7. PENUTUP

7.1 Simpulan

Latar Belakang terjadinya Konflik PKI dan PII di Kanigoro karena adanya Ketegangan antara partai Politik PKI dan Masyumi sesaat setelah selesai Pemilu tahun 1955 menyulut sikap ofensif revolusioner yang digagas oleh DN Aidit dengan menyebarkan aksi-aksi sepihak di berbagai daerah khususnya Jawa termasuk di Kediri khususnya basis PKI di Kanigoro. Faktor yang menyebabkan konflik PKI dan PII di Kanigoro ini terjadi adalah Politik dan Militer. Wajah politik kekuatan agama dan non agama yang konservatif dan non agama yang menjadi basis pertarungan politik, maka situasi politik yang berkembang sangatlah keras dan berimbang. Buktinya ketika menyimak pertarungan dan peroleh dalam pemilu 1955, dimana NU mendapat peroleh suara peringkat pertama dan diikuti PKI di Kotamadya Kediri sedangkan di Kabupaten Kediri PKI peringkat pertama diikuti NU.

Selain berbagai kecenderungan diatas, satu hal yang menarik disimak adalah kehidupan politik di Kediri adalah peranan dan bargaining position yang dimiliki dalam kancah percaturan politik regional bahkan nasional. Banyak peristiwa politik yang berkembang di Kediri selalu tak dapat dipisahkan dengan perkembangan politik nasional. Bahkan dalam beberapa momentum politik. Kediri menjadi barometer perkembangan politik nasional, sehingga apa yang berkembang di Kediri selalu disimak dan diamati karena biasanya akan membawa dampak politik yang luas di tingkat nasional. Hal lainnya juga dapat dijadikan indikator dari tingkat peranan dan bargaining position yang dimiliki Kediri adalah banyaknya tokoh politik yang mengkonsentrasikan diri di Kediri, tidak kurang tokoh-tokoh politik jaman revolusi seperti Semaun, Tan Malaka, Jenderal Soedirman dan Musa pernah berkonsentrasi di Kediri. Pada perkembangan sejarah jaman pergerakan Kediri lebih banyak menjadi lahan perkembangan organisasi-organisasi pergerakan.

Pembahasan mengenai Konflik antara Partai Komunis dan Partai Islam tertulis dalam sebuah buku Benturan NU-PKI 1948-1965, dari sini peneliti dapat menarik intisari bahwa telaah konflik antara keduanya karena politik yang dipertainkan oleh keduanya yang saling tuduh dan berbagai peristiwa Mulai tahun 1948 hingga puncaknya pada 1965. Menurut Pandangan salah satu partai Islam yaitu NU mengatakan bahwa

berkoordinasi dengan TNI dalam meredam permasalahan selama rentang waktu tersebut diputarbalikkan oleh para pengamat dan juga oleh PKI sendiri bahwa NU diperalat oleh TNI. Hal itu tentu tidak sesuai dengan kenyataan, sebaba permusuhan NU dengan PNI itu didasari atas perbedaan akidah dan ideologi perjuangannya. Dan perbedaan serta konflik sosial antara NU dengan PKI itu telah terjadi sejak tahun 1947 dan terus berkelanjutan hingga tahun 1948 lalu berlanjut lagi pada tahun 1950-an dan berpuncak pada pertengahan tahun 1960-an,, dimana kedua kelompok itu bertikai dan bertempur untuk memperebutkan tanah, yang diklaim PKI dan membalas PKI yang menghina agama dan Tuhan. Artinya tanpa disuruh TNI pun NU telah berhadapan dan benturan dengan PKI, karena PKI merupakan musuh yang sudah berkonflik selama beberapa dasa warsa. Sementara kerjasama NU TNI dalam menghancurkan PKI baru terjadi di penghujung tahun 1965 itupun dengan TNI yang segaris. Sebelumnya NU sendirian menghadapi berbagai serangan yang dilakukan PKI sejak awal tahun 1950-an hingga pertengahan tahun 1965.

Selain itu Harian Rakjat yang memuat berita Kanigoro edisi 11 Februari 1965 mengatakan bahwa ada campur tangan pihak ABRI yang dituding AH Nasution memerintahkan kepada elit PII untuk mengadakan mental training / kegiatan politik di basis-basis PKI agar keberadaan mereka dapat terendus oleh ABRI. Tudingan PKI ini masih abu-abu karena sejatinya AH Nasution dalam bukunya tidak menyebutkan bahwa dirinya melakukan hal tersebut, namun yang menjadi bukti bahwa PKI mencari AH Nasution untuk dibunuh saat Peristiwa G 30 S /PKI meskipun AH Nasution berhasil melarikan diri. Jenderal-jenderal TNI AD menjadi korban keberingasan PKI dalam mempertahankan politiknya pada 30 September 1965 dan menjadi suatu kesadaran bagi rakyat Indonesia apalagi yang mengalami tindakan ofensif revolusioner di berbagai daerah termasuk Kanigoro bahwa kejadian terbesar ini diklaim sebagai puncak dimana PKI benar-benar ingin menguasai politik Indonesia pada masa itu. Selain itu ada faktor penting lainnya yaitu Faktor Agama dan Sosial Ekonomi yang kompleks menjadi penyebab Konflik PKI dan PII di Kanigoro Tahun 1965 terjadi.

Jalannya Peristiwa Kanigoro ini meletus setelah ada beberapa faktor penyebab yang dijelaskan di bab sebelumnya. Berikut pembahasan mengenai meletusnya Peristiwa Kanigoro di Kediri Tahun 1965 yaitu Pelatihan Mental Training Pelajar

Islam Indonesia (PII) di basis PKI Kanigoro, Jalannya Peristiwa Kanigoro di Kediri Tahun 1965 serta Penyelesaian dari Peristiwa Kanigoro di Kediri Tahun 1965.

Salah satu saksi sejarah peristiwa ini adalah Mantan Ketua Departemen Kader PII Wilayah Jawa Timur bernama Anis Abiyoso yang juga terlibat dalam Peristiwa Kanigoro ini hingga beliau sampai dipenjara karena dituduh sebagai provokator. Para Anggota Mental Training disiksa secara fisik dan mental oleh Anggota PKI di Kanigoro dan diserahkan ke kantor polisi Kras. Puncaknya adalah tertangkapnya Abiyoso di Pengadilan Malang serta tertangkapnya tokoh PKI Suryadi yang kemudian muncul protes keras dari masing-masing massa PII maupun PKI. Berakhirnya Peristiwa ini adalah saat terjadinya Peristiwa G 30 S / PKI dan Abiyoso dibebaskan serta di berbagai tempat di Indonesia terjadi pembunuhan besar-besaran Anggota PKI dan khususnya di Kediri di dekat Kanigoro orang-orang PKI dibantai dan dibuang ke Sungai Brantas.

Dampak Nasional dari setelah Peristiwa ini terjadi adalah Pada tanggal 22 Oktober 1965, Anis Abiyoso dan Luhung Priyokusumo dibebaskan dengan suatu upacara pelepasan di Kantor Kabupaten Kediri. Sebelum dibebaskan Abiyoso sempat melihat, Suryadi dan kawan-kawannya digiring ke luar penjara dengan tangan diborgol, dan Abiyoso bertanya kepada petugas akan dibawa kemana mereka, ia hanya mendapat respon diam dengan kode mengangkat alisnya dengan senyuman tipis. Tampaknya, ia berharap agar Abiyoso memakluminya.

Pembunuhan Para Jenderal yang terjadi di Lubang Buaya membuat beberapa orang yang terlibat dalam Konflik Kanigoro merasakan adanya keterkaitan. Apalagi setelah diketahui bahwa AH Nasution juga menjadi incaran PKI untuk dibunuh namun akhirnya berhasil melarikan diri anggota training yang trauma akan kejadian Kanigoro, terutama Abiyoso yang menjadi tahanan politik beberapa bulan. PKI saat itu memang membawa luka dan trauma baginya, meskipun dari kedua belah pihak sama-sama dipenjara karena menimbulkan kekacauan di Kediri namun tetap saja setelah melihat ucapan mereka saat menyerang PII di Masjid Al Jauhari dengan kata-kata Balas Peristiwa Madiun ! Membuat Abiyoso sedikit merasa lega saat dirinya akhirnya dibebaskan karena sebenarnya Kanigoro merupakan tempat pergolakan politik yang menjadi dasar aksi balas dendam PKI atas peristiwa Madiun 1948. Selain itu setelah berakhirnya pergolakan politik di Jakarta karena aksi pengkhianatan PKI di berbagai tempat di Indonesia khususnya Jawa Timur yang banyak menjadi gembong para PKI

dan khususnya di Kediri di dekat Kanigoro terjadi penghabisan atau pembunuhan orang-orang PKI yang mayatnya di buang ke Sungai Brantas.

Dalam perspektif lokal, regional yang terjadi hanya di sekitar Kanigoro hal ini peristiwa ini dapat dilihat dari kaca mata sejarah lokal namun bukan hanya semata konflik PKI dan PII ini terjadi tidak memiliki dampak yang luas karena ditengarai peristiwa ini juga karena memiliki pengaruh politik nasional. Hal ini dikatakan oleh Abiyoso di bukunya bahwa memanglah benar Peristiwa Kanigoro dianggap sebagai awalan Peristiwa besar G 30 S/PKI. Orang-orang PKI yang terprovokasi oleh pemimpinnya DN Aidit bahwa peristiwa-peristiwa regional termasuk Kanigoro adalah suruhan dari elit-elit politik dan musuh mereka yaitu TNI AD. Sudah disebutkan pula bahwa AH Nasution juga memberikan perintah kepada elit-elit PII underbow Masyumi untuk mengencarkan training politik di basis-basis PKI termasuk Kanigoro.

Berita-berita di surat kabar, ditambah dengan brosur-brosur yang kami sebar, telah membuat umat Islam di seluruh Indonesia marah. Mereka melakukan aksi-aksi dan demonstrasi. Ormas-ormas Islam juga mendukung aksi-aksi balik melawan PKI. Dalam berbagai aksi di Jawa Timur, misalnya juga tampak para pemuda Anssor, IPNU/IPPNU dan IPM. Pertentangan ideologis antara Islam dan Komunis pun menajam dan memanas. Di mana-mana umat Islam dalam keadaan siap tempur melawan PKI.

Aksi teror PKI pun ternyata tak terbatas di Kanigoro saja. Mereka melakukan teror di banyak tempat, ribuan orang PKI membat dan menghancurkan sawah-sawah milik orang Islam yang hampir panen di Gontor. Sawah wakaf milik Pondok Pesantren Gontor hancur total. PKI juga melakukan perampokan terhadap banyak orang Islam, melakukan pembunuhan dan menganiaya beberapa ulama. Tetapi kasus Kanigoro agaknya menjadi bumerang bagi PKI. Arus perlawanan umat Islam makin besar setelah teror itu.

7.2 Saran

Berdasarkan simpulan dari penelitian penulis menyajikan beberapa saran yaitu,

1. Bagi pembelajar sejarah dan calon pengajar sejarah Pembelajaran dari Konflik PKI dan Pemuda Islam Indonesia underbow Masyumi di Kanigoro Kediri pada Tahun 1965 haruslah objektif, sikap sejarah adalah tidak memihak kepada siapapun apabila mempelajari

suatu peristiwa sejarah melibatkan beberapa pihak. Melihat perspektif manapun, sejarah pada tahun 1965 merupakan krisis politik yang sangat sensitif sampai sekarang, maka dari itu tidak sebagai seorang peneliti sejarah khususnya untuk memberikan pendapat pembelaan terhadap satu pihak. Namun di sisi lain juga harus menemukan fakta-fakta yang konkret agar nantinya kita sebagai calon pengajar sejarah mampu menyampaikan terhadap pembelajar sejarah terutama di sekolah dengan seobjektif mungkin. Sejarah memang ada di masa lalu tetapi di masa depan kita sebagai calon pengajar sejarah harus dapat menerangkannya secara benar dan tidak memihak kepada siapapun karena sejarah itu bisa dipelajari namun bukan untuk diulangi.

2. Bagi Almamater

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan sebagai bentuk perwujudan tugas Universitas Jember yaitu Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Abiyoso, A., Herfanda, Ahmadun Y. 1995. *Teror Subuh di Kanigoro*. Yogyakarta: Yayasan Trotoar Yogyakarta.
- Adam, AW. 2004. *Pelurusan Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Aidit, DN. 1957. *Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948*. Jakarta: Yayasan Pembaruan.
- Aidit, DN. 1952. *Menempuh Djalan Rakjat*. Jakarta: Yayasan Pembaruan.
- Aidit, DN. 1964. *Kibarkan Tinggi Pandji Revolusi*. Jakarta: Yayasan Pembaruan.
- Cribb, Robert. 1990. *The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali*. Australia: Monash University.
- Dahrendorf, Ralf. 1958. *The Journal of Conflict Resolution*. 2 (2). Sage Publications, Inc.
- Dahrendorf, Ralf. 2008. *The Modern of Social Conflict: The Politics of Liberty*. New Jersey: Transaction Publisher.
- Dahlan, M. Muhidin. 2020. *Politik Tanpa Dokumen*. Yogyakarta: Warung Arsip.
- Gottschalk, L. 2008. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Harian Rakjat. 1965. *Edisi 8, 9 Januari 1965 Kanigoro Affair*.
- Harian Rakjat. 1965. *Edisi 11, 12, 13 Februari 1965 Kanigoro Affair*.
- Hatta, M. 2015. *Politik, Kebangsaan, Ekonomi 1926-1977*. Penerbit Buku Kompas.
- Kartodirjo, Sartono. 1992. *Pendekatan dan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. 2008. *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Kurniawan et al. 2012. *Pengakuan Algojo 1965*. Jakarta : Tempo Publishing.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah. 2008. *Buku Panduan Monumen Pancasila Sakti*. Jakarta: TNI.

- Memorandum of Conversation tahun 1965. *The Situation in Indonesia after the Coup Attempt and Effort of Indonesian Moderates to Assist the Army to Destroy PKI*. 15 dan 19 Oktober 1965. Jakarta.
- Mimbar Indonesia. 1948. *Edisi 23 Oktober 1948 Independent non Party*.
- Mortimer, R. 2011. *Indonesian Communism Under Soekarno: Ideologi dan Politik 1959-1965*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Mushed, Syed Mansoob., Tadjoeeddin, M Zulfan. 2015. *Political Economy of The Indonesian Mass Killing Of 1965-1966: International Institute of Social Studies (ISS)*. Erasmus University of Rotterdam, University of Western Sydney, Australia.
- Pranoto, S.W. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Poeze, Harry A. 2011. *Madiun 1948*. Jakarta: KITLV Jakarta.
- Pohlman, Annie. 2013. *The Massacres of 1965-1966 : New Interpretations and The Current Debate in Indonesia*. 32 (3). GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of Asian Studies and Hamburg University Press.
- Poloma, Margaret M. 2003. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Purwanta, Hieronymus. 2016. *Discourses of the "1965's Bloody Coup" in Indonesian Education Historiography*. 2 (4). International Journal of Social Sciences and Educational Studies.
- Pusjarah TNI. 1999. *Komunisme di Indonesia Jilid IV: Pemberontakan G.30.S/PKI dan penumpasannya (tahun 1960-1965)*. Jakarta: Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB).
- Roosa, J. 2004. *Tahun yang tak pernah berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).
- Robinson, G. B. 2018. *Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966*. Jakarta: Komunitas Bambu JJ Rizal.
- Schaefer, Bernd dan Baskara, T. Wardaya. 1965. *Indonesia dan Dunia 2013*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sikap. 1948. *Edisi 29 September 1948 Mimbar Politik*.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Soepeno, Bambang. 2014. *Fungsi dan Aplikasi Teori dalam Penelitian Sosial*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

Sulistyo, Hermawan. 2000. *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966)*. Jakarta: KPG.

Susanto, Budi A., Emingahayu, S. 2007. *Sisi Senyap Politik Bising*. Yogyakarta: Kanisius.

Telegram American Embassy in Jakarta tahun 1965. *Foreign Service of the United States of America*. 6 pm 4 November 1965. Surabaya.

Telegram American Embassy in Jakarta tahun 1965. *Foreign Service of the United States of America*. 6: 10 pm 12 November 1965. Jakarta.

Telegram American Embassy in Jakarta tahun 1965. *Foreign Service of the United States of America*. 10 am 26 November 1965. Surabaya.

Tim PBNU. 2013. *Benturan NU-PKI 1948-1965*. Jakarta: Tim PBNU.

Zurbuchen, Mary S. 2002. *History, Memory, and the "1965 Incident" in Indonesia*. 42(4). University of California Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Telegram CIA

Gambar Telegram Amerika Serikat Mengenai peristiwa 1965 di Kanigoro, Kediri

TELEGRAM Foreign Service of the United States of America

INCOMING EAMEMBASSY DJAKARTA *FDL 27-9*

CONFIDENTIAL
Classification *SECRET*

Control: 930A
Recd: Nov 26, 1965
10 AM

FROM: SURABAYA

ACTION NO: 183, Nov 24, 1965 - ~~SECRET~~ DELAYED DUE SERVICING

P R I O R I T Y

ACTION DJAKARTA 183 INFO DEPT 41 CINCPAC UNN

CINCPAC FOR POLAD

REF: A. CONTEL 178
B. Sitrep 14
C. Sitrep 16

Joint Sitrep 17

1. Security Situation. We continue receive reports PKI being slaughtered by Ansor many areas East Java, Missionary, who returned from Kediri Nov 21 said local Missionary there had seen 25 bodies in river while Missionary Modjokarto told her he had seen 29 in river. She heard largest slaughter had taken place at Talungagung where reportedly 15000 Communists killed. According numerous sources, killing of PKI continues in villages bordering Surabaya and wounded released from Surabaya refuse return to their homes. According head East Java Railways, 5 stations closed because workers afraid come to work since some of them have been murdered. Actors in Ludruk (popular Farcial Theatre) shows, which have long been PKI kingdom, have in several instances reportedly been murdered. Victims, who have had temerity to continue cast aspersions at Islam have had throats cut by Ansor youths. Also reportedly killings here in East Java have coloration of Holy War: killing of Infidel supposed give ticket to heaven and if blood of victim rubbed on face path there even more assured.

ACTION: POL
INFO: CHRON
RELAY
AMB
MIN
RF
ECON
CAO
POL

EEM
MVT
RJM
HLH
RGR
PPG
RCH
FHM
HGI
OJE
DJH

DECLASSIFIED Authority *FRD 67259*

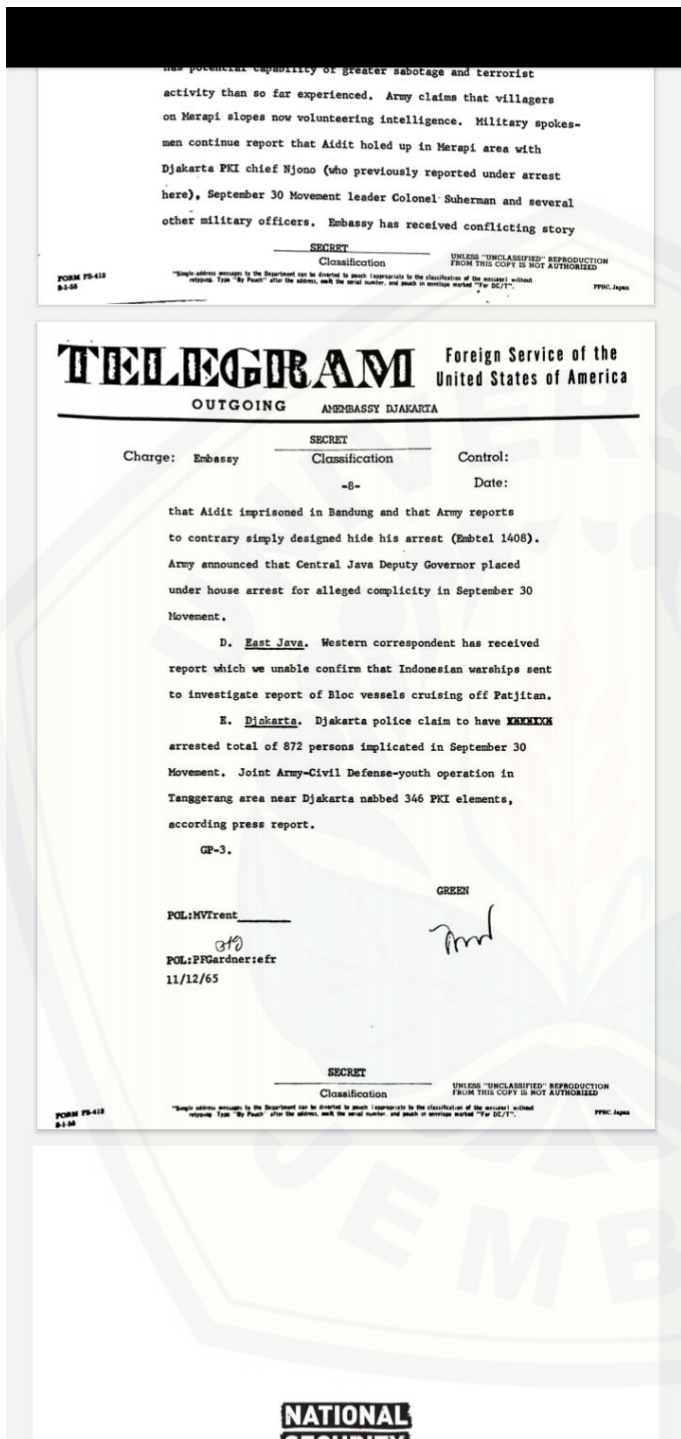
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL

Classification
POST ACTION COPY

FROM UNCLASSIFIED REPRODUCTION FROM THIS COPY IS NOT ALLOWED

Sumber : <https://nsarchive2.gwu.edu/dc.html?doc=4107025-Document-15-Action-Telegram-183-from-American> (diakses pada 28 April 2020).

Telegram CIA menunjukkan keterlibatan Nasution dalam peristiwa 1965 termasuk Kanigoro



Anti-communist drive continues in provinces and destructive anti-Chinese riot occurred in Makassar.

2. Moderates' Concern. Several Embassy sources who had previously displayed optimism over Army's chances of boxing in Sukarno state that there now widespread concern that Sukarno's display of authority and determination in November 10 speech

SECRET
Classification

UNLESS "UNCLASSIFIED" REPRODUCTION FROM THIS COPY IS NOT AUTHORIZED

FORM FS-413 8-1-55 "Single address messages to the Department can be directed to each (appropriate to the classification of the message) without reference. Type "By Patch" after the address, with the serial number, and patch in message marked "By DC". PPRC, Japan

TELEGRAM Foreign Service of the United States of America
OUTGOING AMEMBASSY JAKARTA

Charge: **SECRET**
Classification Control:
-3-

Date:

Presages renaissance of Presidential power. (Emtels 1406 and 1408 are representative of several views we have received.)

3. Palace Optimism. In conversation with DCM, DepFonMin Ganis Harsono stated Sukarno well on way to reestablishing his hold, that Subandrio will stay on and that Palace will dictate direction of Revolution while Army concentrated on difficult but menial tasks of restoring security and economy. Harsono indicated Army leaders had manufactured evidence against Subandrio and others and that President would investigate and determine invalidity of these charges.
COMMENT: Harsono's confidence undoubtedly forced to some extent to impress us.

4. Army Stance.

A. Nasution spent hour and half with President yesterday in their second meeting since September 30 ~~at~~ affair. Embassy has as yet no information on this crucial conversation other than Nasution's own terse and tantalizing answers to press queries. Nasution stated that he had reported to President on state of his health and had noted he now working as usual. (Nasution's health was excuse given for his absence from cabinet meetings.) Nasution added that "his work" also discussed but declared he could say nothing further on that subject. Nasution said he wished to make

SECRET
Classification

UNLESS "UNCLASSIFIED" REPRODUCTION FROM THIS COPY IS NOT AUTHORIZED

FORM FS-413 8-1-55 "Single address messages to the Department can be directed to each (appropriate to the classification of the message) without reference. Type "By Patch" after the address, with the serial number, and patch in message marked "By DC". PPRC, Japan

TELEGRAM Foreign Service of the United States of America
OUTGOING AMEMBASSY JAKARTA

Charge: Embassy **SECRET**
Classification Control:
-4-

Date:

clear that President and Armed Forces were united in accomplishing their tasks. Asked whether he had brought up Army's five recommendations to President (Sitrep 36), Nasution replied that he could not "go so far as to discuss this question." Some newspapers also reported that Nasution asked reporters to see

Sumber : <https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=4107025-Document-15-Action-Telegram-183-from-American> (diakses pada 5 Januari 2020).

Lampiran 2. Hasil Pemilu Tahun 1955

65

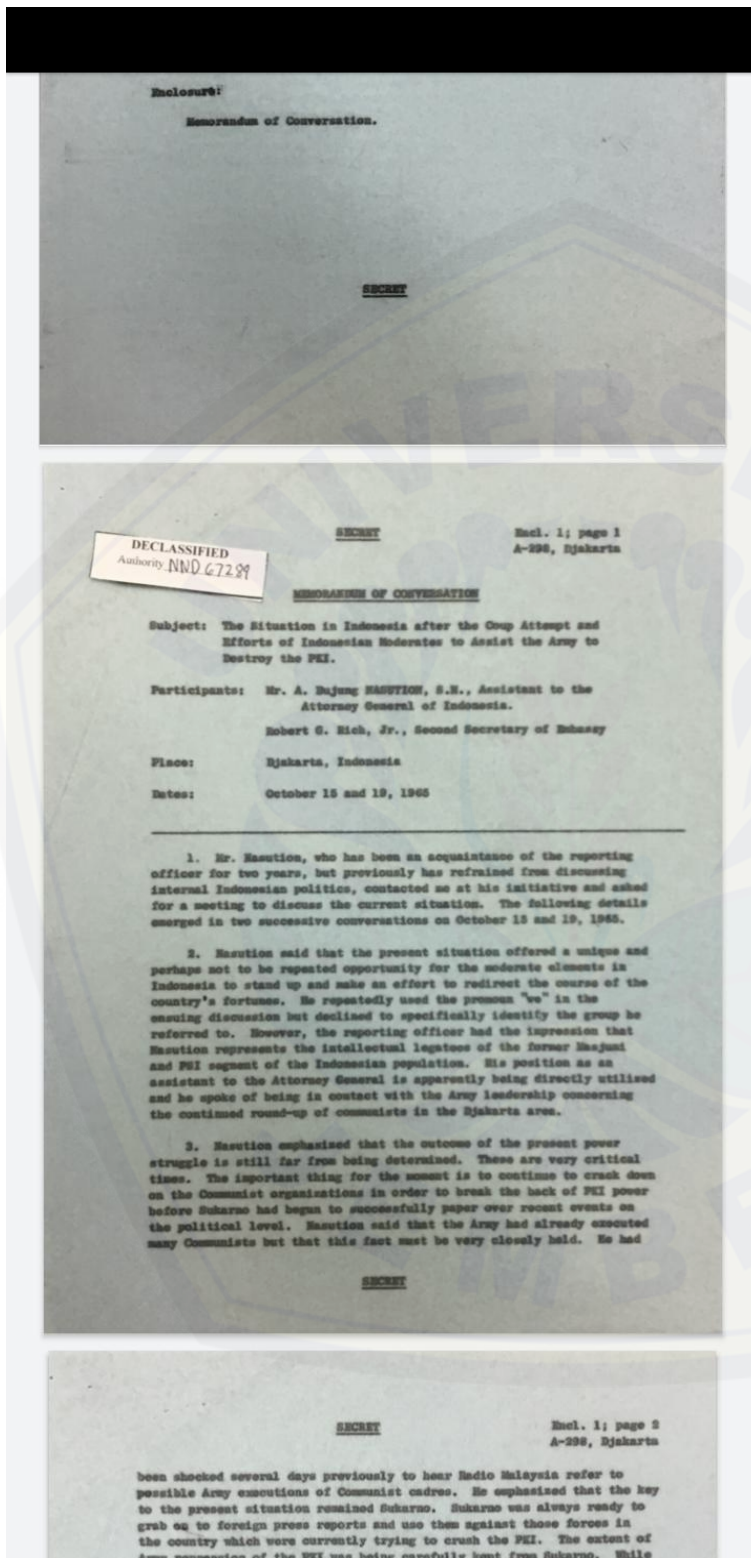
Table 2

THE PARTIES' TOTAL VOTES AT THE ELECTIONS
FOR PARLIAMENT AND THE CONSTITUENT ASSEMBLY *

	Parlia- mentary vote	Constit- uent Assembly vote	Differ- ence
1. P.N.I. (Indonesian Nationalist Party)	8,434,653	9,070,218	+635,565
2. <u>Masjumi</u> (Consultative Council of Indonesian Moslems)	7,903,886	7,789,619	-114,267
3. <u>Nahdatul Ulama</u> (Ulama Association)	6,955,141	6,989,333	+34,192
4. P.K.I (Communist Party)	6,176,914	6,232,512	+55,598
5. P.S.I.I. (Islamic Association Party)	1,091,160	1,059,922	-31,238
6. <u>Parkindo</u> (Christian Party)	1,003,325	988,810	-14,515
7. <u>Partai Katolik</u> (Catholic)	770,740	748,591	-22,149
8. P.S.I. (Socialist)	753,191	695,932	-57,259
9. I.P.K.I. (League for the Upholding of Indonesian Independence)	539,824	544,803	+4,979
10. <u>Perti</u> (Islamic Education Party)	483,014	465,359	-17,655
11. G.P.P.S. (Movement to Defend the Pantja Sila)	219,985	152,892	-67,093
12. P.R.N. (National People's Party)	242,125	220,652	-21,473
13. P.P.P.R.I. (Police Employees' Association)	200,419	179,346	-21,073
14. <u>Partai Murba</u> (Proletarian)	199,588	248,633	+49,045
15. <u>Partai Buruh</u> (Labor)	224,167	332,047	+107,880
16. P.R.I. (People's Party)	206,261	134,011	-72,250
17. P.I.R. (Greater Indonesian Union)--Wongsonegoro	178,481	162,420	-16,061
18. P.I.R. (Greater Indonesia Union)--Hazairin	114,644	101,509	-13,135
19. <u>Permai</u> (Proletarian People's Union)	149,287	164,386	+15,099
20. <u>Baperki</u> (Citizenship Consultative Council)	178,887	160,456	-18,431
21. <u>Gerinda</u>	154,792	157,976	+3,184
22. <u>Partai Persatuan Daya</u> (Dayak Unity Party)	146,054	169,222	+23,168
23. P.R.I.M. (Party of the People of Free Indonesia)	72,532	143,907	+71,375
24. A.K.U.I.	81,454	84,862	+3,408
25. <u>Acoma</u> (Young Generation Communists)	64,514	55,844	-8,670
26. P.P.T.I. (Tharikah Unity Party)	85,131	74,913	-10,218
27. P.R.D. (Village People's Party)	77,919	39,278	-38,641
28. R. Soedjono Prawirosoedarso and Associates	53,305	38,356	-14,949

* Votes obtained by parties through vote-pooling arrangements at the level of the electoral district are here included with the votes originally obtained by the parties themselves.

Lampiran 3. Memorandum Peristiwa 1965 dan keterlibatan AH Nasution



2. Masution said that the present situation created a unique and perhaps not to be repeated opportunity for the moderate elements in Indonesia to stand up and make an effort to redirect the course of the country's fortunes. He repeatedly used the pronoun "we" in the ensuing discussion but declined to specifically identify the group he referred to. However, the reporting officer had the impression that Masution represents the intellectual legacies of the former Masjumi and PEI segment of the Indonesian population. His position as an assistant to the Attorney General is apparently being directly utilized and he spoke of being in contact with the Army leadership concerning the continued round-up of communists in the Djakarta area.

3. Masution emphasized that the outcome of the present power struggle is still far from being determined. These are very critical times. The important thing for the moment is to continue to crack down on the Communist organizations in order to break the back of PEI power before Sukarno had begun to successfully paper over recent events on the political level. Masution said that the Army had already executed many Communists but that this fact must be very closely held. He had

SECRET

SECRET

Encl. 1; page 2
A-288, Djakarta

been shocked several days previously to hear Radio Malaysia refer to possible Army executions of Communist cadres. He emphasized that the key to the present situation remained Sukarno. Sukarno was always ready to grab on to foreign press reports and use them against those forces in the country which were currently trying to crush the PEI. The extent of Army repression of the PEI was being carefully kept from Sukarno. While Sukarno would probably hear reports to this effect, it was very important that he not be able to cite particular sources such as foreign radio and press reports since emphasis on these aspects in the foreign press would not only incite Sukarno to crack down on the Army's activities but also encourage him to wrongfully accuse military leaders of aiding and abetting Nekolin. Mr. Masution particularly stressed the delicate position of Indonesian moderates at this time. They currently have the initiative, but need more time to break the back of PEI strength. To do this Sukarno must not be handed submission from abroad which he can turn against the Army and its supporters.

4. The reporting officer stressed that the US Government was fully aware of the sensitive nature of current events and was making every effort to avoid stimulating press speculation which would redound to the detriment of moderate forces in Indonesia at this time. It was noted, however, that the USG has no control over its press.

5. Masution spoke of Sukarno as a man whose image in the country was irrevocably shattered for the long run and yet who still held a pre-eminent psychological position which the Army could not challenge directly. A distinct danger foreseen by the moderates at present was that Sukarno and Subandrio might yet be able to divert public attention to an alleged Nekolin threat and blame the US and "imperialists" in general for attempting to set Indonesians against themselves in early October. He noted the difficulty, and even impossibility, of pursuing a course of denials and refutations of spurious charges which might arise in this connection and recalled the effectiveness with which the PEI in the past had been able to utilize false documents and fabricated charges, resulting in Sukarno even turning against a long term friend, Bill Palmer. Rather than be placed on the defensive by such charges, he said, "we" are placing all our efforts in getting the true story of what happened to the Indonesian people in its fullest extent. By repeated emphasis on what really happened, little opening would be permitted for PEI fabrication. In searching for evidence of Subandrio's connection in the 30th September movement, however, the Army and moderate groups had thus far been unable to turn up firm useable evidence of Subandrio's

SECRET

SECRET

Encl. 1; page 3
A-288, Djakarta

participation. He asked specifically whether the American Embassy could provide any firm evidence of Subandrio's links with the PEI or with Communist China.

6. Masution stated that some elements in the Army had raised the

Lampiran 4. Arsip foto Peristiwa Kanigoro 1965

Gambar 1. Foto saat dimana PKI berjalan menuju Kanigoro untuk melakukan penyerangan.



Sumber : Arsip Kabupaten Kediri dari Koran Harian Rakjat Tahun 1965

Gambar 2. Massa BTI/PKI melakukan penyerangan di Kanigoro Tahun 1965



Sumber : Arsip Kabupaten Kediri dari Koran Harian Rakjat Tahun 1965

Gambar 3. Massa BTI/PKI menyerukan yel-yel khasnya saat menuju kantor polisi Kras Kediri



Sumber : Arsip Kabupaten Kediri dari Koran Harian Rakjat tahun 1965

Lampiran 5. Peta Pembunuhan Massal di Jawa Timur Dampak Konflik PKI dan PII di Kanigoro tahun 1965

INDONESIA

The Killings of 1965-66 in East Java

This map shows estimates of the one-time change in population in 1965-66 in percentage terms after adjusting for normal year-to-year growth in population in 491 districts, groups of districts, or cities in East Java. These estimates were calculated by comparing an estimate of population prior to the 1965 violence with an estimate of population in the immediate aftermath of the killings. The estimates include the combined effects of one-time changes in mortality, fertility, and migration.

Patterns of One-Time Population Change

Two phenomena are of particular interest. First, the northern coast of East Java almost uniformly displays one-time declines in population, suggesting that the violence was the most severe in this region. The southern coast of the province, as well as the region of volcanic outbursts in the western part of the province, by contrast, reveal unexpected and hitherto-unrelated jumps in population, suggesting systematic migration into these areas during the killings.



(-16,76%) KEDIRI CITY, KEDIRI	BANGOREJO, CILIRIK, MUNDOAR, BANYUWANGI (58,281)
(-9,51%) TAMBAK, SIDOARJO	CAMKIPURD, LIMALANG (79,716)
(-9,39%) NGILEGOK, BLITAR	PESANOGAMAH, BANYUWANGI (18,049)
(-8,09%) JARU, SIDOARJO	TEMPUREJO, JEMBER (11,848)
(-8,73%) TUBAN CITY, TUBAN	PONCOKUSUMU, MALANG (11,577)
(-7,64%) SIDOARJO, SIDOARJO	SUMBER PUCUNG, MALANG (11,006)
(-4,17%) GAMPENREJO, KEDIRI	WATULING, TRENGGALEK (8,597)
(-5,88%) GEDANAD, SIDOARJO	PARACIKI, GRESIK (7,494)
(-5,16%) KAMAL, BANGKALAN	GEMRANG, MAGLUN (4,718)
(-3,23%) SEBATI, SIDOARJO	BESUKI, TULLINGAGUNG (4,425)

Districts with the Largest Gains or Losses

This pie chart shows the ten districts that experienced the largest estimated percentage declines in population associated with 1965-66 and the largest increases in population (top). Districts in the regions of Krakatau and Sumbing appear repeatedly among those with the largest losses, as do small- and medium-sized cities. The largest gains occurred in districts on the southern coast of East Java. Many of these districts are remote, with little typical of volcanic complexes or marked by limestone karst formations.

MICHIGAN STATE UNIVERSITY
Asian Studies Center
International Studies & Programs
asia@msu.edu

Copyright 2016 Siddhant Chandra, Rachel White
Designed by Camille Muhs
See also Chandra, Siddhant, 2011, "New Findings on the Indonesian Killings of 1965-66," *Journal of Asian Studies* 70(4): 1029-46.
Acknowledgment: This project was supported by a research grant from the Harry Frank Guggenheim Foundation and a Fulbright-Abelardo Kuyat Scholarship for Study of the Holocaust and the Legacy and for Study of Genocide from James Madison College at Michigan State University.

Sumber : <http://ypkp1965.org/wp-content/uploads/2019/09/indonesia-killing.jpg> (diakses pada Sabtu 28 november 2020)

INDONESIA

Migration and Refuge in East Java during the Killings of 1965-66

Estimates of one-time changes in population during the killings reveal that populations abruptly increased in a number of districts. Such estimates are consistent with large inflows of people. The locations in which populations suddenly increased coincide with 18 locations that Indonesian army intelligence identified as areas where Indonesian Communist Party members were regrouping in the aftermath of the violence and the political purges of the Indonesian Communist Party.

Locations of Communist Project Committees

The map in the right shows locations of the Communist Project Committees (Korpri), shown as circles on the map showing districts with large one-time population gains. Headquarters of the Indonesian Communist Party were believed to be regrouping in these locations, identified by Indonesian army intelligence, after the killings. This map illustrates the overlap between districts with large and sustained one-time population increases and the locations of the Korpri.



Locations with Large Population Increases

The above map highlights districts that experienced large one-time increases in population in 1965-66. Such increases are an indication of large-scale migration, which in turn suggests that people were fleeing other parts of the province and the island of Java. These districts tend to be along the southern coast or in the southern part of the province.

Communist Party Strongholds

This map shows political strongholds of the Indonesian Communist Party, measured by its share of votes in the 1957 local elections. The locations of the Project Committees, shown as the aftermath of the killings by members of the Party, overlap with these strongholds and with the shaded areas in the former map, showing large one-time increases in population.

Copyright 2016 Siddhant Chandra, Rachel White
Designed by Camille Muhs
See also Chandra, Siddhant, 2011, "New Findings on the Indonesian Killings of 1965-66," *Journal of Asian Studies* 70(4): 1029-46.
Acknowledgment: This project was supported by a research grant from the Harry Frank Guggenheim Foundation and a Fulbright-Abelardo Kuyat Scholarship for Study of the Holocaust and the Legacy and for Study of Genocide from James Madison College at Michigan State University.

Sumber : <http://ypkp1965.org/wp-content/uploads/2019/09/indonesia-killing.jpg> (diakses pada Sabtu 28 november 2020)

Lampiran 6. Matrik Penelitian

Matrik Penelitian

Topik	Judul Penelitian	Jenis dan Sifat Penelitian	Permasalahan	Sumber Data	Metode Penelitian
Peristiwa Sejarah Tahun 1965	Konflik PKI dan Pelajar Islam Indonesia underbow Masyumi di Kanigoro Kediri Tahun 1965	a. Jenis Penelitian : Penelitian Sejarah. b. Sifat penelitian : studi Pustaka	1. Bagaimana Latar Belakang penyebab terjadi konflik PKI dan PII underbow Masyumi di Kanigoro Tahun 1965 ? 2. Bagaimana jalannya momentum dan penyelesaian Peristiwa / Konflik Kanigoro tahun 1965 ? 3. Bagaimana dampak konflik PKI dan PII di Kanigoro tahun 1965 secara nasional dan lokal?	Buku Pokok. Buku Penunjang. Diperoleh dari : a. Perpustakaan dan laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah b. Perpustakaan Universitas Jember. c. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.	Metode Penelitian sejarah, dengan tahap: 1. Heuristik 2. Kritik (Verifikasi) 3. Interpretasi 4. Historiografi Pendekatan Politikologis Teori : Konflik Dahrendorf